LAPORAN AKHIR

PENGUKURAN INDEKS HARMONI DI KABUPATEN TANGERANG

Berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) Masyarakat



2025

Pemerintah Kabupaten Tangerang

KATA SAMBUTAN

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 dapat diselesaikan. Pengukuran IHaI melalui pengisian *e-survey* yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret s.d. 24 Maret 2025 atas dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Enumerator, Kolaborator dan Koordinator yang didukung oleh perangkat daerah terkait dalam mensosialisasikan dan menyebarkan *e-survey* kepada berbagai unsur dan lapisan masyarakat di wilayahnya.

Melalui metodologi yang inklusif dan pendekatan *Wellbeing Methodology* (WM), Indeks ini bertujuan untuk melihat tingkat harmoni dari dimensi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagamaan pada suatu daerah dari waktu ke waktu dalam rangka memitigasi potensi-potensi yang mempengaruhi instabilitasi harmoni suatu daerah. Variabel dan indikator pada IHaI juga telah diselaraskan dengan Asta Cita sebagai visi misi pemerintahan saat ini agar dapat menjadi rujukan dan rekomendasi kebijakan bagi kepala daerah untuk menyusun rencana program dan anggaran berbasis data. Oleh sebab itu, pengukuran IHaI Tahun 2025 menjadi sangat strategis untuk kepentingan dan pembangunan kehidupan harmoni yang tidak sekadar mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memelihara kerukunan dan kemashalatan, tetapi juga menjadi cerminan aspirasi, pandangan, dan kebutuhan masyarakat.

Ucapan terima kasih kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Pengukuran IHaI Tahun 2025, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Pengukuran IHaI yaitu Dr. Herie Saksono, M.Si sebagai Ketua Tim, Prof. Dr. Ayub Muktiono, Dr. Jadi Suriadi dan Dr. Asep Kususanto, MPPPM, yang telah berperan serta dalam penyusunan dan penyelesaian laporan IHaI ini.

Saya mengapresiasi kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademik, organisasi kemasyarakatan dan sukarelawan dalam melaksanakan riset publik ini. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi dapat menjadi ***Evidence Based Data*** **(EBD)** bagi pemangku kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan di daerah untuk menciptakan kehidupan yang harmoni. Mari bersama-sama berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Salam Harmoni.

Jakarta, 20 Juni 2025

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shaloom, Om Swastiastu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025, telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai mitra kerja dalam upaya menjaga dan meningkatkan harmoni sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2025 ini, survei IHaI dilaksanakan di 24 provinsi dan 353 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah daerah yang berhasil mencapai target minimum responden 1.250 sebanyak 4 provinsi dan 119 kabupaten/kota. Total responden yang berpartisipasi mencapai **322.770 orang**, suatu angka yang mencerminkan antusiasme dan partisipasi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengukuran harmoni sosial yang kita laksanakan.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan IHaI tahun ini menunjukkan nilai **6,81 dari skala 9** dalam pengukuran langsung *(direct measurement)*. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, harmoni sosial di berbagai daerah berada dalam kondisi baik. Namun, hasil ini juga mengidentifikasi area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan variabel kesenjangan dan keseimbangan. Selain itu, pada setiap daerah dilengkapi dengan analisis dari Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) yang dilampirkan pada laporan masing masing kabupaten/kota dan provinsi yang mencapai target pengukuran, yang memberikan wawasan berharga yang tidak hanya mencerminkan persepsi masyarakat, tetapi juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan. Masukan dari masyarakat ini menjadi pondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Terima kasih kepada seluruh Tim Peneliti, pemerintah daerah, serta semua responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Kerja keras dan kolaborasi yang baik dari semua pihak telah memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan IHaI ke depan kita perlu terus meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, serta mengakomodasi umpan balik yang diterima dari responden. Ini penting agar IHaI terus berkembang dan dapat menggambarkan kondisi nyata harmoni sosial di Indonesia secara lebih komprehensif dan dinamis. Semoga upaya kita dalam menjaga harmoni sosial mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Salam Harmoni.

Jakarta, 18 Juni 2025
Direktur Kebahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya,

Agus Toyib, S. Sos, M. Si

Organisasi dan Tim Pelaksana Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Tahun 2025
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

1. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Agus Toyib, S.Sos, M.Si, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Budi Arwan, S.STP.,M.Si, Direktur Organisasi Kemasyarakatan;
5. Iwan, SE, MM, Penata Perizinan Ahli Madya Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
6. Aulia Zuhdi, S.Pd, MAP, Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
7. Anug Kurniawan, S.STP, M.Si, Kepala Sub Direktorat Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
8. Hartono, SH, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan;
9. Nika Sarmuria Saragih, S.STP, M.Si, Penata Perizinan Ahli Madya Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
10. Andi Purnamawaty Muchtar, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
11. Ferryan Mustaqim, S.STP, M.A.P, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kewaspadaan Dini;
12. Rama Ardhi Segara, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Informasi dan Komunikasi Partai Politik;
13. Budhy Widiyanti, SE, Penata Perizinan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
14. Dr. Marsudi, SE, M.Si, Penata Perizinan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
15. Muhammad Reza Yudistira, S.IP, M.Si, Perencana Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
16. Rio Yosiko, SE, Analis Hukum Ahli Muda pada Sub Bagian Perundang-Undangan;
17. Yasmin Lurusati, M.S.E, Perencana Ahli Muda Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
18. Andi Ilham Nuhadi, S.STP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
19. Henry, S.Sos, MM, Analis Pangan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
20. Teuku Muhammad Syauqan, S.STP, Analis Pola Komsumsi Pangan Masyarakat pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
21. Elvi Laela Saidah, S.Tr.IP, Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

22. Faris Azhar, S.Sos, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
23. Ade Wendy, S.Ikom, Analis Dampak Sosial pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
24. Indah Puspita Ningsih , S.IP, MM, Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
25. Aurina Anindya Nawang, S.Psi, Analis Pangan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
26. Fahrizal Malabali, S.IP, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
27. Arul Kusumawijaya Anggono Arga, S.Sos, Analis Investasi dan Permodalan Usaha pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
28. Desi Ester Masombe, S.S, M.Par, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subdirektorat Pembina Kerukunan antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan;
29. Achmad Rifky Mubaroq, SE, Analis Kebijakan Ahli Pratama Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
30. A. Muhammad Fitra, S.Tr.IP, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subdirektorat Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
31. Fauzy Maulana Malik, S.Tr.IP, Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
32. Muh. Ishlah Al- Kadri, S.Tr.IP, Analis Kebijakan dan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
33. Ani Lorenza, S.Tr.IP, Penata Kelola Pemerintahan pada Subdirektorat Pembina Kerukunan antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan;
34. Muhammad Fiqhi Fauzan Ibrahim, S.In, Penelaah Teknis Intelijen Pada Subdirektorat Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
35. Aurora Tanjayani Munandar, S.Tr.IP, Fasilitator Pemerintahan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
36. Muhammad Zulfi Musaffa, S.In, Penelaah Teknis Intelijen pada Subdirektorat Pembina Kerukunan antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan;
37. Ridwan Alamsyah, Supporting Staf pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
38. Sri Nur Wahyuni, S.IP, Supporting Staf pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
39. Melissa Nur Fajriani, Supporting Staf pada Subdirektorat Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
40. Rakhmad Ryan Ramadhan, Supporting Staf pada Subdirektorat Pembina Kerukunan antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan;
41. Gatot Wisiantoro, Supporting Staf pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

1. Bupati Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kabupaten Tangerang
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Tangerang
4. Kepala OPD Terkait, Kabupaten Brebes.

Tim Peneliti IhaI 2025

1. Dr. Herie Saksono, Peneliti Madya BRIN (Ketua)
2. Prof.Dr.Ir Ayub Muktiono, Msi: Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PGL (Anggota)
3. Dr. Jadi Suriadi, Direktur Wellbeing Institute (Anggota)
4. Dr. Asep Kususanto, Widyaiswara Bappenas (Anggota)

Resume Eksekutif
Laporan IHaI 2025 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

I. Penjelasan Umum Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025

Berdasarkan hasil *preliminary study* Tim Peneliti IHaI dan kemudian *expert group discussion* (EGD), ada 4 aspek dalam IHaI 2025, dan telah memasukkan substansi Astcita Pemerintah, yaitu: 1). Aspek harmoni Ekonomi; 2). Aspek Harmoni Sosial; 3) Harmoni Budaya; 4) Harmoni Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel, yaitu :

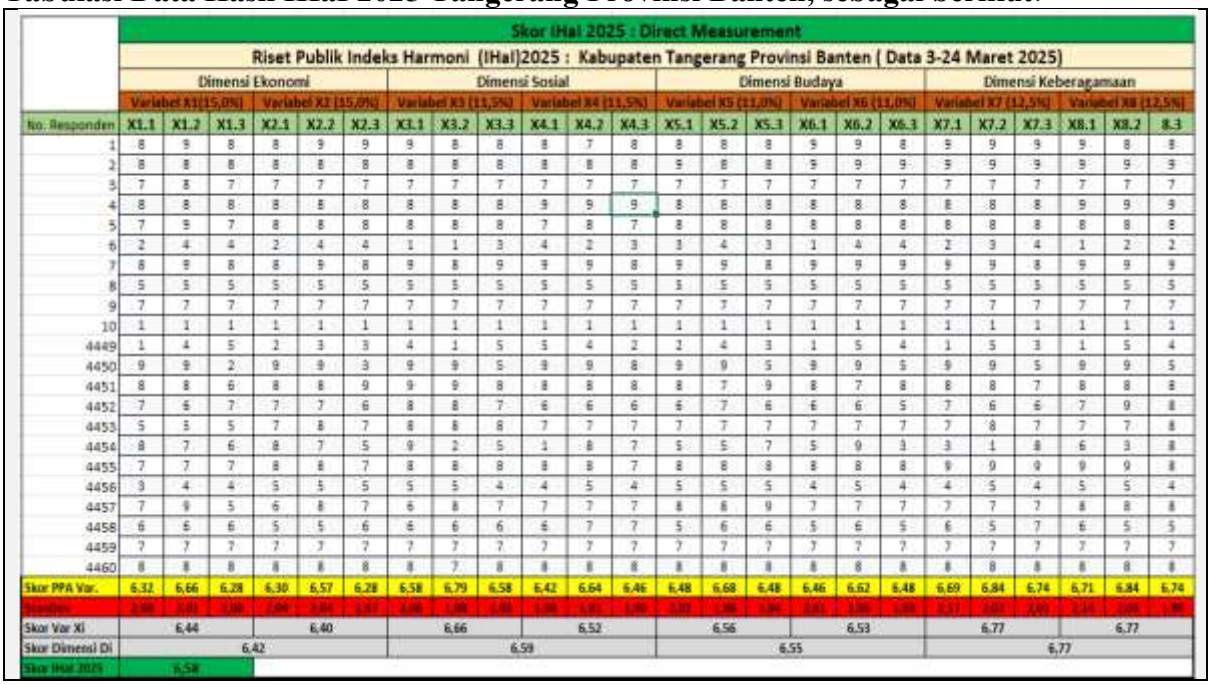
1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15%
2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15%
3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5%
4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5%
5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11%
6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya,11%
7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5%
8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%

Skor penilaian menggunakan skala 9 dengan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial dan ekonomi di Tangerang. Data yang dikumpulkan mencakup tiga aspek utama: pertama, **data identifikasi responden**, yang mencerminkan karakteristik demografi dan sosial masyarakat; kedua, **data skor penilaian PPA**, yang menunjukkan tingkat kepuasan serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan; dan ketiga, **data usul, saran, dan kritik (DUSK)**, yang menggambarkan aspirasi serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi objektif tetapi juga memperhitungkan sudut pandang serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

II. Data Hasil IHaI 2025 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Data hasil kajian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 mencakup berbagai aspek penting dalam menilai kondisi sosial di Kabupaten Tangerang BANTEN. Skor penilaian PPA pada setiap variabel **Xi** menggunakan skala 9, dengan pembobotan **20% untuk Persepsi, 40% untuk Partisipasi, dan 40% untuk Akseptabilitas**, yang memberikan keseimbangan dalam mengukur keterlibatan masyarakat. Selain itu, skor variabel **Xi** dirangkum menjadi **skor dimensi**, yang kemudian berkontribusi terhadap **skor IHaI 2025**, sebagai ukuran keseluruhan harmoni sosial di wilayah tersebut. Kajian ini juga dilengkapi dengan **berbagai statistik dasar**, yang tidak hanya memberikan angka kuantitatif tetapi juga interpretasi sosial yang mendalam, memungkinkan analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan masyarakat dan area yang memerlukan intervensi kebijakan.

Tabulasi Data Hasil IHaI 2025 Tangerang Provinsi Banten, sebagai berikut:



Skor IHaI 2025 : Direct Measurement

Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)

	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
7	8	9	8	8	9	8	9	8	9	9	9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4449	1	4	5	2	3	3	4	1	5	5	4	2	2	4	3	1	5	4	1	5	3	1	5	4
4450	9	9	2	9	9	3	9	9	5	9	9	8	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5
4451	8	8	6	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	7	9	8	7	8	8	8	7	8	8	8
4452	7	6	7	7	7	6	8	8	7	6	6	6	6	7	6	6	6	5	7	6	6	7	9	8
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skor PPA Var.	6,32	6,66	6,28	6,30	6,57	6,28	6,58	6,79	6,58	6,42	6,64	6,46	6,48	6,68	6,48	6,46	6,62	6,48	6,69	6,84	6,74	6,71	6,84	6,74
Standev	2,09	2,01	2,10	2,09	2,04	2,07	2,06	1,98	2,03	1,99	1,91	1,99	2,07	1,96	1,95	2,01	1,86	1,93	2,17	2,03	2,01	2,14	2,05	1,99
Skor Var Xi	6,44			6,40			6,66			6,52			6,56			6,53			6,77			6,77		
Skor Dimensi Di	6,42						6,59						6,55						6,77					
Skor IHaI 2025	6,58																							

Gambar: Tabulasi Skor PPA; Skor Variabel Xi, Skor Dimensi Di dan Skor IHaI 2025

Data responden yang dikumpulkan sebanyak **4.460 orang** (minimal 1250) dengan hasil **skor IHaI Direct Measurement sebesar 6,58 dari 9**, yang masuk dalam **kategori baik**. Skor ini mencerminkan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap berbagai aspek sosial di wilayah tersebut. Meskipun tergolong baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antarvariabel serta mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kohesivitas sosial dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

Pada tingkat dimensi, **dimensi ekonomi memperoleh skor 6,42** yang masuk dalam kategori **moderat**, menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat. **Dimensi sosial (6,59) kategori Baik, dimensi budaya (6,55) kategori baik, dan dimensi keagamaan (6,77)** berada dalam kategori "**baik"**, mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keagamaan yang tinggi. Sementara itu, pada level **variabel Xi**, skor tertinggi terdapat pada **variabel X7 dengan 6,77**, yang menunjukkan aspek ini memiliki persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas yang lebih baik dibandingkan yang lain. Sebaliknya, **variabel X2 mencatat skor terendah dengan 6,42**, yang perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas layanan yang terkait dengan variabel ini.

III. Identifikasi Perbaikan Berdasarkan Data

Berdasarkan data yang telah disampaikan dalam tabel "IHaI 2025 Direct Measurement", berikut adalah identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikannya:

1. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lapisan Bawah**

Jumlah responden sebanyak **4.460** sudah memenuhi standar yang sangat baik untuk representasi data, memastikan validitas hasil yang diperoleh. Namun, upaya peningkatan partisipasi tetap perlu dilakukan, terutama dalam rangka memperkuat **sosialisasi dan edukasi masyarakat** terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam penilaian kebijakan publik. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, termasuk **pemanfaatan media lokal, forum diskusi, serta pendekatan berbasis komunitas** agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

2. **Peningkatan Dimensi Ekonomi**

Dengan skor 6,42 dari 9 yang masuk dalam kategori moderat, dimensi ekonomi memerlukan perhatian lebih agar dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi ekonomi berbasis komunitas juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperbaiki indikator ekonomi dalam IHaI.

Peningkatan **Dimensi Ekonomi** menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan karena mencerminkan tantangan substansial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan skor **6,42** (kategori moderat), terdapat indikasi bahwa kondisi ekonomi di Tangerang BANTEN masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil dan berkelanjutan. Jika tidak ada langkah konkret dalam **perbaikan tata kelola ekonomi**, kondisi ini berisiko mengalami penurunan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, **Pemerintah Daerah perlu memperkuat kebijakan ekonomi**, termasuk peningkatan investasi, penguatan UMKM, peningkatan akses pasar, serta pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi daerah.

3. **Kohesivitas Masyarakat dan Standar Deviasi (SD)**

Standar Deviasi (SD) dalam Persepsi yang lebih tinggi dibandingkan Partisipasi dan Akseptabilitas mencerminkan adanya variasi pemikiran dan inovasi yang lebih dinamis dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keragaman pandangan yang dapat menjadi modal positif dalam pembangunan. Namun, besarnya SD tetap harus dikontrol dalam rentang 1,0–2,0 untuk menghindari perbedaan penafsiran yang terlalu tajam, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi serta menghambat kohesivitas sosial dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah.

4. **Menjaga Isu Sensitif**

Meskipun **Dimensi Keagamaan** telah memperoleh skor tertinggi **6,77** (kategori Baik), upaya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama tetap menjadi prioritas utama. Keberagaman agama di Tangerang harus terus dijaga melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan. Pemerintah Daerah perlu mendorong **pendidikan multikultural**, meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi

potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat tetap terjaga, dan nilai toleransi yang sudah baik dapat terus diperkuat.

5. **Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda**

   Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda perlu diperkuat dengan memberikan ruang bagi dinamika dan kreativitas mereka dalam memahami, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Pemerintah Daerah dapat mendorong program edukasi budaya di sekolah, festival seni dan budaya, serta pelibatan komunitas kreatif dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, pemanfaatan media digital dan teknologi dapat menjadi strategi efektif untuk menarik minat generasi muda dalam mengeksplorasi identitas budaya mereka secara lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dari permasalahan ini, langkah perbaikan yang sistematis dan berbasis bukti dapat membantu meningkatkan efektivitas IHaI sebagai alat ukur yang lebih representatif serta berkontribusi pada perbaikan kebijakan di Tangerang.

IV. Rekomendasi kebijakan

Rekomendasi RPJMD Bidang Ekonomi Berdasarkan Data DUSK Kabupaten Tangerang
Berdasarkan analisis data DUSK, ditemukan beberapa isu utama dalam bidang ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat. Berikut adalah rekomendasi kebijakan RPJMD yang dapat diimplementasikan:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan

- **Permasalahan:** Banyak responden mengungkapkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama di daerah mereka.
- **Rekomendasi:**
  a) Mendorong investasi di sektor industri kreatif, manufaktur, dan agribisnis untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
  b) Mempermudah akses modal bagi pelaku UMKM melalui skema pinjaman berbunga rendah atau hibah usaha.
  c) Mengembangkan program inkubasi bisnis bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan.

2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal

- **Permasalahan:** Beberapa responden menyarankan agar pemerintah memberikan lebih banyak dukungan bagi UMKM dan home industry.
- **Rekomendasi:**
  a) Menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk.
  b) Mendorong program kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar agar mereka bisa masuk ke dalam rantai pasok industri.
  c) Membantu pemasaran produk lokal melalui platform digital dan event ekonomi kreatif.

3. Peningkatan Akses terhadap Modal dan Bantuan Usaha

- **Permasalahan:** Masyarakat berharap adanya bantuan usaha dari pemerintah untuk mendukung bisnis kecil.
- **Rekomendasi:**
    a) Meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
    b) Mempermudah proses perizinan dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar mereka lebih mudah mendapatkan pendanaan.
    c) Mengembangkan program kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses pinjaman berbunga rendah.

4. Peningkatan Peran Pemerintah dalam Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

- **Permasalahan:** Masyarakat menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- **Rekomendasi:**
    a) Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan investasi yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal.
    b) Meningkatkan sinergi antara sektor pendidikan dan dunia kerja agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
    c) Meningkatkan transparansi dan kemudahan perizinan usaha agar lebih banyak investor tertarik menanamkan modal di daerah.

5. Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas

- **Permasalahan:** Beberapa responden menekankan pentingnya peran serta lingkungan dalam penguatan ekonomi.
- **Rekomendasi:**
    a) Mendorong model ekonomi berbasis komunitas melalui koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB).
    b) Memberdayakan desa wisata dan ekowisata untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
    c) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam mendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan di atas, diharapkan RPJMD dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tangerang serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesesuaian hasil Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) perlu diuji secara berkala dengan kondisi lapangan sepanjang tahun guna memastikan validitas dan relevansinya terhadap dinamika

sosial di masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara data survei dan realitas di lapangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat harmoni sosial ke depan.

Salam
Tim Peneliti IHaI

DAFTAR ISI

Cover Depan		i
Kata Sambutan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		ii
Kata Pengantar Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		iii
Organisasi dan Tim Pelaksana		iv
Resume Eksekutif		vii
Daftar Isi		xiii

I	Bab I : Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan Penelitian	7
1.3	Ruang Lingkup	10
1.4	Kontribusi Laporan	11
II	Bab II: Metodologi Penelitian	12
2.1	Desain Penelitian	14
2.2	Instrumen Pengumpulan Data	14
2.3	Responden dan Sampel	15
2.4	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	15
III	Bab III Data dan Analisis Data	19
3.1	Data Identifikasi Responden	20
3.2	Data Kuantitatif Skor Penilaian PPA Variabel Xi	23
3.3	Data Usul Saran dan Kritik (DUSK)	24
3.4	Resume Data Variabel Xi	28
	Bab IV : Hasil dan Temuan	49
4.1	Skor IHaI 2025	51
4.2	Analisis Data Dinamis	63
4.3	Korelasi Respon Publik (KRP)	67
4.4	Identifikasi Keseimbangan dan Kesenjangan	68
	Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi	72
5.1	Kesimpulan Umum	72
5.2	Rekomendasi Kebijakan	75
5.3	Rekomendasi Kebijakan RPJMD	78
5.4	Disklaimer dan Arahan Pengembangan IHaI	80
	Daftar Pustaka	82

BAB I PENDAHULUAN

Pengukuran **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** bertujuan untuk menilai tingkat harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia utamanya pada lingkup wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan terus berkembang, mempengaruhi keseimbangan dan interaksi masyarakat. Berbagai faktor, seperti urbanisasi yang pesat, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai sosial, turut membentuk pola hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Selain itu, tantangan seperti kesenjangan ekonomi, radikalisme, serta dampak pandemi global juga memberikan pengaruh terhadap tingkat harmoni sosial di Indonesia.

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pengukuran yang komprehensif dan berbasis data untuk memahami dinamika sosial yang terus berkembang. **IHaI hadir sebagai alat ukur berbasis Wellbeing Methodology (WM)** yang tidak hanya menilai tingkat harmoni sosial, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan harmoni di berbagai daerah.

Urgensi Pengukuran IHaI 2025

Seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, pemahaman terhadap harmoni sosial menjadi semakin penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pengukuran IHaI 2025 memiliki beberapa urgensi utama, di antaranya:

1. **Menilai dan Memantau Tingkat Harmoni Sosial**

   IHaI berfungsi sebagai indikator untuk mengukur dan memantau kondisi harmoni sosial secara berkala. Dengan data yang diperoleh, dapat diidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan atau penurunan harmoni sosial serta memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat stabilitas sosial.

2. **Membantu Perumusan Kebijakan Berbasis Data**

   Data yang dihasilkan dari pengukuran IHaI dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial, kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. **Mencegah Konflik Sosial dan Memperkuat Kohesi Masyarakat**

   Salah satu manfaat utama dari pengukuran IHaI adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik. Dengan adanya data yang akurat, langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mengurangi risiko konflik dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

4. **Menjadi Alat Evaluasi Efektivitas Program Sosial**

IHaI dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program-program sosial yang telah dijalankan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. Dengan membandingkan hasil pengukuran dari tahun ke tahun, dapat diketahui apakah program yang telah diterapkan berhasil meningkatkan harmoni sosial atau perlu dilakukan perbaikan.

Kontribusi Laporan IHaI 2025

Laporan ini diharapkan dapat memberikan **wawasan bagi pemangku kebijakan** dalam merancang strategi yang mendukung stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Beberapa kontribusi utama dari laporan IHaI 2025 antara lain:**

1. **Bagi Pemerintah:**
    a) Sebagai referensi dalam menyusun kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang berbasis data.
    b) Membantu dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    c) Menjadi alat pemantauan bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
2. **Bagi Akademisi dan Peneliti:**
    a) Memberikan data empiris yang dapat digunakan dalam kajian sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik.
    b) Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai harmoni sosial di Indonesia.
3. **Bagi Masyarakat dan Organisasi Sosial:**
    a) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerja sama sosial dalam kehidupan sehari-hari.
    b) Memberikan gambaran mengenai kondisi harmoni sosial di berbagai daerah sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga keharmonisan di lingkungan masing-masing.

Hasil pengukuran IHaI 2025 menjadi **referensi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi harmoni sosial** dan potensi kesenjangan antarwilayah. Dengan adanya indeks ini, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan berbagai pihak dapat lebih terarah, sehingga harmoni sosial di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan dijaga secara berkelanjutan.

1.1 Latar Belakang

Indeks Harmoni Indonesia (**IHaI**) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai tingkat harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia. Sejak diinisiasi oleh **Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) pada tahun 2022**, IHaI telah menjadi alat strategis dalam

memahami kondisi sosial masyarakat dan membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih berbasis data.

Pelaksanaan IHaI dilakukan secara reguler setiap tahun, guna memantau dinamika sosial yang terus berkembang akibat berbagai faktor, seperti perubahan ekonomi, urbanisasi, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam perjalanannya, indeks ini telah mengalami penyempurnaan, baik dari segi metodologi maupun cakupan wilayah pengukuran. **Pada tahun 2025, IHaI mengadopsi visi-misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo**, yang menekankan pada pembangunan nasional yang inklusif, stabilitas sosial, serta penguatan kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan dan kebersamaan.

Tahun ini, **IHaI akan menyertakan sekitar 353 titik pengukuran yang mencakup berbagai daerah di Indonesia**, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi harmoni sosial di tingkat lokal maupun nasional.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sosial dan tantangan global, pengukuran harmoni sosial menjadi semakin penting untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa urgensi utama dari pelaksanaan IHaI 2025 adalah:

1. **Menilai dan Memantau Tingkat Harmoni Sosial Secara Berkala.** Dengan pengukuran tahunan, IHaI berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana dinamika sosial berkembang dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi harmoni di masyarakat.
2. **Mendukung Implementasi Visi-Misi Pemerintah.** Pengukuran tahun 2025 tidak hanya melanjutkan evaluasi sebelumnya, tetapi juga **menyesuaikan dengan visi-misi Astacita Presiden Prabowo**, yang menekankan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan masyarakat.
3. **Mengidentifikasi Wilayah Rentan dan Potensi Ketimpangan.** Dengan cakupan 351 titik pengukuran, IHaI 2025 dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami potensi ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran.
4. **Menjadi Rujukan dalam Perencanaan Kebijakan Pemerintah.** Data yang dihasilkan dari IHaI menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung stabilitas sosial, mencegah potensi konflik, serta memperkuat harmoni sosial di masyarakat.

Dengan cakupan 351 titik pengukuran yang lebih luas dan pendekatan yang lebih terstruktur, **IHaI 2025 menjadi alat strategis dalam menjaga harmoni sosial serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data**. Pengukuran ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan pembangunan nasional yang inklusif, stabil, dan berkeadilan sesuai dengan visi-misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo.

1.1.1 Integrasi Asta Cita Dalam IHaI 2025

Dalam rangka menyesuaikan **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** dengan **visi-misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo**, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri telah melaksanakan serangkaian **preliminary study (PS) internal** untuk memastikan bahwa indikator pengukuran harmoni sosial tetap relevan dengan arah kebijakan nasional. Proses ini dilakukan melalui kajian mendalam dan diskusi bersama para pemangku kepentingan guna mengintegrasikan prinsip-prinsip Astacita ke dalam struktur dan metodologi IHaI 2025.

Adapun rangkaian kegiatan utama dalam preliminary study ini meliputi:

1. Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Astacita dalam IHaI 2025

FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip Astacita dapat diterjemahkan dalam dimensi dan variabel yang digunakan dalam pengukuran IHaI. Diskusi ini melibatkan tim internal Ditjen Polpum serta pakar yang memiliki pemahaman mendalam tentang harmoni sosial, kebijakan publik, dan pembangunan nasional.

2. Expert Group Discussion (EGD) dengan Pemangku Kepentingan, Terutama Badan Kesbangpol Seluruh Indonesia

Diskusi kelompok ahli ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia**. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif daerah mengenai bagaimana visi-misi Astacita dapat diterapkan dalam pengukuran harmoni sosial. Dengan melibatkan Kesbangpol, diharapkan kebijakan dan strategi yang dirancang dapat lebih kontekstual serta sesuai dengan kondisi sosial di berbagai daerah.

3. Penetapan Dimensi (Di), Variabel (Xi), dan Indikator (X(i,j))

Setelah diskusi awal, tim penyusun IHaI menetapkan struktur pengukuran baru yang mengacu pada prinsip-prinsip Astacita. Langkah ini mencakup:

a) **Dimensi (Di):** Kerangka utama yang mencerminkan aspek-aspek kunci dalam harmoni sosial.

b) **Variabel (Xi):** Indikator turunan yang lebih spesifik untuk mengukur aspek tertentu dari harmoni sosial.

c) **Indikator (X(i,j)):** Parameter detail yang digunakan untuk mendapatkan data empiris dalam pengukuran IHaI 2025.

Penyesuaian ini dilakukan agar indikator yang digunakan dalam pengukuran IHaI tetap relevan dengan tantangan sosial yang ada serta mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Seminar dan Konsinyering Seluruh Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan hasil pengukuran IHaI 2025 dapat diterapkan secara efektif di berbagai daerah, Ditjen Polpum mengadakan **seminar dan konsinyering bersama seluruh pemangku**

kepentingan, termasuk **Kesbangpol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) terkait**. Dalam forum ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai metodologi baru serta bagaimana implementasinya dapat berjalan optimal di lapangan.

5. Uji Publik Bersama Daerah dan 4 Guru Besar Penanggap Ahli

Sebagai tahap akhir sebelum penerapan resmi, dilakukan **uji publik** terhadap metodologi dan indikator baru yang telah disusun. Uji publik ini dilakukan bersama perwakilan daerah serta **empat guru besar penanggap ahli** yang memberikan evaluasi serta masukan berdasarkan perspektif akademik dan praktis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi Astacita dalam IHaI 2025 telah dilakukan secara objektif dan dapat diimplementasikan secara luas.

Melalui serangkaian tahapan **preliminary study** yang komprehensif, IHaI 2025 telah mengalami penyempurnaan agar selaras dengan **visi-misi Astacita** yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan cakupan 351 titik pengukuran serta metodologi yang telah dikaji dan diuji, indeks ini diharapkan dapat menjadi alat strategis dalam **memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan harmoni sosial di Indonesia**.

Selain sebagai alat ukur, IHaI 2025 juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan harmonis.

1.1.2 Struktur dan Komponen IHaI

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 merupakan instrumen yang dirancang untuk **mengukur tingkat harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia**. Pengukuran ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan **Wellbeing Methodology (WM)**, IHaI menjadi alat strategis dalam memantau keberlanjutan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

Berdasarkan hasil *preliminary study* Tim Peneliti dan kemudian *expert group discussion* (EGD), ada 4 aspek dalam IHaI, yaitu: 1). Dimensi Ekonomi; 2). Dimensi Sosial; 3). Dimensi Budaya; 4). Dimensi Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel Xi, operasional meliputi :

1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15%
2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15%
3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5%
4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5%
5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11%
6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya,11%
7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5%
8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%

Gambar 1.1 : Tabel Dimensi Di dan Variabel Xi

Struktur Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025

1. Empat Aspek atau Dimenis Utama dalam IHaI 2025

Berdasarkan kajian akademik dan kebijakan, IHaI 2025 disusun atas empat aspek utama yang mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan:

1. **Dimensi Ekonomi**
    - Mencerminkan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.
2. **Dimensi Sosial**
    - Menggambarkan interaksi sosial yang sehat, partisipasi masyarakat, serta penguatan peran kelompok sosial tertentu.
3. **Dimensi Budaya**
    - Mengukur bagaimana nilai budaya lokal dan keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis.
4. **Dimensi Keberagamaan**
    - Memastikan keseimbangan antara kebebasan beragama, toleransi, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Delapan Variabel Utama dalam IHaI 2025

Setiap aspek dalam IHaI 2025 dikembangkan lebih lanjut menjadi delapan variabel utama. Setiap variabel memiliki bobot tertentu sesuai dengan tingkat urgensinya dalam menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

1. **Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan (15%)**
    - Mengukur ketersediaan pangan, kesejahteraan ekonomi, serta akses terhadap sumber daya ekonomi yang stabil bagi masyarakat.
2. **Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan (15%)**
    - Menilai tingkat kesempatan kerja, inovasi ekonomi, serta pertumbuhan kewirausahaan yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
3. **Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis (11,5%)**
    - Mengkaji interaksi sosial, kohesi komunitas, serta tingkat konflik sosial di masyarakat.
4. **Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal (11,5%)**
    - Menilai sejauh mana kelompok-kelompok ini mendapatkan akses yang setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
5. **Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal (11%)**

- Mengukur bagaimana nilai dan warisan budaya lokal dapat tetap bertahan serta berkontribusi terhadap identitas nasional.

6. **Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya (11%)**
   - Mengkaji keberagaman budaya dan bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa konflik budaya.
7. **Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama (12,5%)**
   - Menilai tingkat toleransi antarumat beragama serta penerapan moderasi dalam kehidupan beragama.
8. **Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari (12,5%)**
   - Mengukur bagaimana nilai-nilai agama dapat membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan keseharian.

Struktur **IHaI 2025** telah disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan **empat aspek utama** yang saling berhubungan dan mempengaruhi tingkat harmoni sosial di Indonesia. Melalui **delapan variabel yang terukur**, indeks ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan keagamaan di berbagai daerah.

Dengan adanya IHaI 2025, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar dalam **merancang kebijakan strategis** untuk meningkatkan keharmonisan sosial serta memastikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dalam Lima Aspek Utama

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dirancang sebagai alat ukur yang tidak hanya memberikan gambaran tentang tingkat harmoni sosial di berbagai wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti. Dalam implementasinya, IHaI memiliki **lima tujuan utama**, yang masing-masing berperan dalam memperkuat kohesi sosial, mengurangi potensi konflik, dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran tentang harmoni sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Harmoni sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, IHaI bertujuan untuk:

✅ **Mengedukasi masyarakat** tentang pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

✅ **Mengenalkan faktor-faktor utama** yang memengaruhi harmoni, seperti toleransi, kerja sama, dan keterlibatan sosial.

✅ **Membangun pemahaman bersama** mengenai dampak positif dari stabilitas sosial terhadap kesejahteraan ekonomi, budaya, dan keamanan.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengukuran, tetapi juga agen aktif dalam menjaga dan meningkatkan harmoni di lingkungannya.

2. Potret dan Pemetaan Skor PPA Masyarakat

Mengukur tingkat Persepsi, Partisipasi, dan Acceptability (PPA) terkait kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.

IHaI tidak hanya mengukur kondisi objektif harmoni sosial, tetapi juga bagaimana masyarakat **merasakan, berpartisipasi, dan menerima** situasi sosial di sekitarnya.

a) **Persepsi** → Bagaimana masyarakat menilai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di daerahnya.
b) **Partisipasi** → Sejauh mana masyarakat terlibat dalam aktivitas sosial yang mendukung keharmonisan.
c) **Acceptability** → Tingkat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan budaya, sosial, dan agama.

Mengapa ini penting?

✅ Memahami bagaimana masyarakat memandang harmoni sosial akan membantu dalam menyusun strategi intervensi yang tepat.
✅ Data PPA dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan partisipasi sosial dan toleransi.
✅ Dengan mengukur acceptability, pemerintah dapat melihat bagaimana kebijakan diterima dan menyesuaikannya agar lebih efektif.

3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat

Menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

Keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya bergantung pada data statistik, tetapi juga pada masukan langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, IHaI menyediakan ruang bagi masyarakat untuk **menyampaikan usulan, saran, dan kritik terkait kondisi sosial di wilayahnya**.

Bagaimana DUSK berkontribusi dalam IHaI?

✅ **Meningkatkan partisipasi masyarakat** dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif.
✅ **Menyediakan data kualitatif** yang melengkapi data kuantitatif dalam IHaI.
✅ **Membantu pemerintah memahami realitas sosial** yang tidak selalu tergambar dalam data statistik.
✅ **Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat**, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata.

Dengan adanya mekanisme DUSK, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam perumusan kebijakan.

4. Mendapatkan Evidence-Based Data (EBD)

Menggunakan data berbasis bukti untuk perumusan kebijakan yang lebih akurat.

Mengapa Evidence-Based Data (EBD) diperlukan?

- ✅ **Menghindari pengambilan keputusan yang bersifat subjektif dan spekulatif.**
- ✅ **Memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.**
- ✅ **Meningkatkan efektivitas program sosial dengan intervensi yang lebih tepat sasaran.**

Data dalam IHaI dikumpulkan melalui berbagai metode ilmiah, seperti:

a) Survei berbasis persepsi masyarakat
b) Analisis sosial dan ekonomi berbasis data statistik
c) Studi kasus di daerah dengan tingkat harmoni tinggi maupun rendah

EBD dalam IHaI menjadi **fondasi utama bagi perumusan kebijakan publik yang lebih presisi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat**.

5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memperkuat harmoni sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai aspek IHaI, rekomendasi kebijakan disusun untuk membantu:

Apa yang dihasilkan dari IHaI?

- ✅ **Kebijakan berbasis data yang lebih efektif dan tepat sasaran.**
- ✅ **Strategi peningkatan harmoni sosial** di tingkat lokal dan nasional.
- ✅ **Rekomendasi program pembangunan sosial dan ekonomi** yang lebih inklusif.
- ✅ **Panduan bagi pemerintah daerah** dalam menangani potensi konflik sosial.

Rekomendasi ini akan dikembangkan dalam bentuk:

a) **Laporan tahunan IHaI** untuk pemerintah pusat dan daerah.
b) **Peta harmoni sosial** yang menggambarkan daerah dengan tingkat harmoni tinggi dan rendah.
c) **Program intervensi sosial dan budaya** berdasarkan hasil pengukuran IHaI.

Melalui rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari IHaI, pemerintah dapat lebih **proaktif dan responsif** dalam menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai strategi nasional dalam menjaga harmoni sosial yang berkelanjutan.

Ringkasan 5 Tujuan Utama IHaI:

✅ **Edukasi & Kesadaran** → Masyarakat memahami pentingnya harmoni sosial.
✅ **Pemetaan PPA** → Mengukur persepsi, partisipasi, dan acceptability masyarakat.
✅ **DUSK Masyarakat** → Masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan pendapat.
✅ **Evidence-Based Data** → Pengambilan kebijakan berdasarkan data, bukan asumsi.
✅ **Rekomendasi Kebijakan** → Menyusun strategi berbasis data untuk peningkatan harmoni sosial.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti, **IHaI diharapkan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia**.

1.3 Ruang Lingkup

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 memiliki lingkup yang luas dalam mengukur harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia. Secara geografis, ruang lingkup IHaI mencakup tingkat Kabupaten/Kota sebagai unit dasar pengukuran, yang selanjutnya diintegrasikan sebagai agregat pada tingkat Provinsi dan Nasional. Dengan pendekatan ini, IHaI memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi harmoni sosial di setiap daerah serta memungkinkan analisis perbandingan antarwilayah.

Pelaksanaan survei IHaI dilakukan secara **online** dengan durasi teknis selama **3 minggu**. Metode ini dirancang untuk memastikan efisiensi dalam pengumpulan data serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Pemanfaatan survei daring juga memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga hasil analisis dapat segera digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Struktur IHaI dirancang secara **terstruktur dan sistematis**, mencakup **4 dimensi utama (Di)** sebagai kerangka konseptual dalam mengukur harmoni sosial. Setiap dimensi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam **8 variabel utama (Xi)** yang merepresentasikan aspek-aspek spesifik dari harmoni sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, IHaI memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat yang berkontribusi terhadap harmoni sosial dapat diukur secara akurat dan menyeluruh.

Lebih lanjut, setiap variabel dalam IHaI diuraikan menjadi **40 indikator spesifik (X(i,j))**, yang berfungsi sebagai alat ukur dalam mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari responden. Indikator-indikator ini dirancang agar mampu menangkap berbagai dimensi harmoni sosial, baik dalam hal persepsi masyarakat, tingkat partisipasi sosial, maupun tingkat penerimaan terhadap keberagaman.

Dengan ruang lingkup yang jelas dan struktur pengukuran yang sistematis, IHaI 2025 menjadi instrumen penting dalam memahami dinamika sosial di Indonesia. Hasil survei ini diharapkan

dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi para pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada data yang valid.

1.4 Kontribusi Laporan

Laporan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengukur kondisi harmoni sosial di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data, laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keseimbangan sosial, budaya, dan ekonomi di berbagai wilayah. Informasi yang diperoleh dari hasil survei memungkinkan pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Selain sebagai alat pemantauan, laporan IHaI 2025 juga berperan dalam memberikan landasan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy). Dengan menganalisis data dari berbagai dimensi, variabel, dan indikator, laporan ini dapat membantu dalam merancang strategi pembangunan sosial yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk mengurangi potensi konflik, meningkatkan toleransi, serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

Lebih dari sekadar laporan statistik, IHaI 2025 berfungsi sebagai instrumen advokasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya harmoni sosial. Dengan hasil yang dapat diakses oleh berbagai pihak, laporan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai, toleran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, IHaI 2025 menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 mengacu pada Wellbeing Methodology (WM), yaitu sebuah pendekatan berbasis kemaslahatan atau kesejahteraan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Pendekatan ini dirancang untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek harmoni sosial dengan mengukur data numerik yang objektif serta menginterpretasikan perspektif subjektif dari masyarakat. Dengan demikian, hasil yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi sosial dalam bentuk angka, tetapi juga memperhitungkan narasi, pengalaman, dan aspirasi masyarakat dalam menciptakan harmoni di lingkungan mereka.

Secara kuantitatif, IHaI 2025 mengandalkan survei daring yang dikembangkan secara sistematis dengan struktur 4 dimensi utama, 8 variabel pendukung, dan 40 indikator spesifik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik untuk menghasilkan skor yang mencerminkan tingkat harmoni di setiap wilayah. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengumpulan Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) masyarakat, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Kombinasi kedua metode ini memastikan bahwa analisis IHaI memiliki validitas tinggi dan dapat mencerminkan kondisi sosial secara lebih akurat.

Keunggulan Wellbeing Methodology (WM) dalam IHaI 2025 terletak pada pendekatannya yang holistik dan adaptif terhadap dinamika sosial di berbagai daerah. Dengan menggunakan metode campuran ini, IHaI tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan kondisi sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang intervensi yang lebih efektif. Hasil analisis berbasis data ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas harmoni sosial di Indonesia.

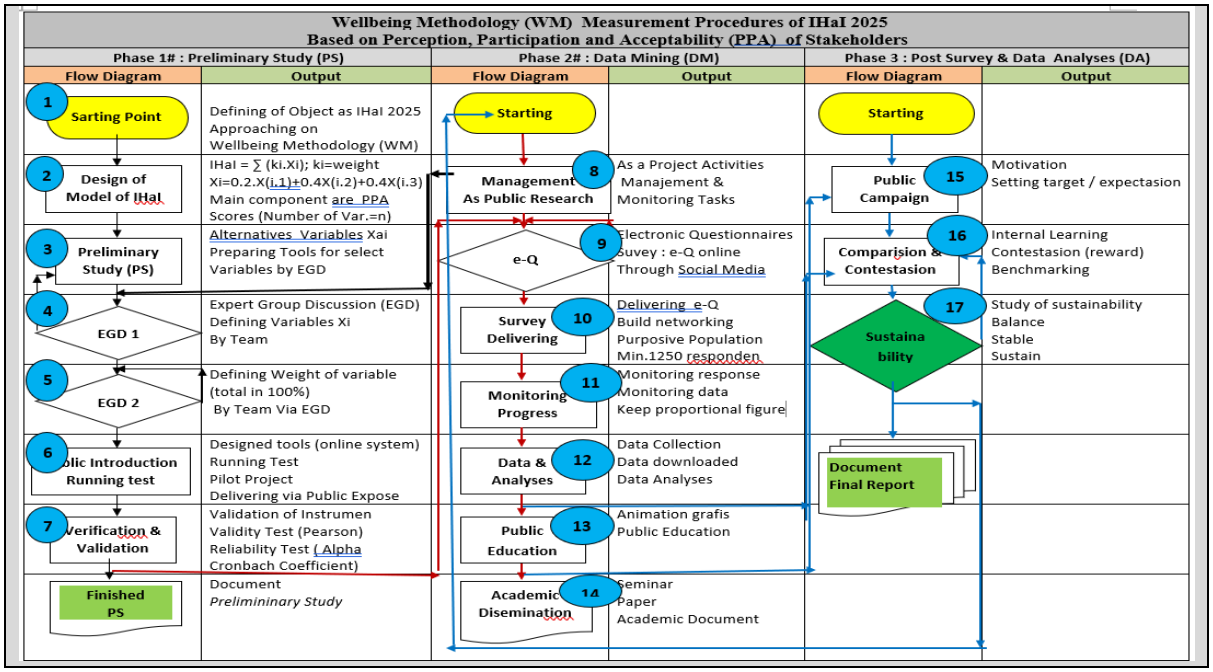
Secara filosofi, Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 mengikuti tiga premis utama yang menjadi dasar dalam memahami dan mengukur harmoni sosial di berbagai wilayah. Premis pertama adalah **complexity and endogeneity**, yang menegaskan bahwa harmoni sosial merupakan fenomena kompleks dengan banyak faktor saling terkait dan saling memengaruhi. Dalam pendekatan ini, tidak ada satu variabel tunggal yang dapat menentukan tingkat harmoni secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan hubungan dinamis antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, pendekatan **endogeneity** dalam IHaI berarti bahwa harmoni sosial bukan hanya hasil dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika internal masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Premis kedua adalah **participatory among agents**, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengukuran dan peningkatan harmoni sosial. Dalam filosofi ini, masyarakat bukan sekadar objek penelitian, tetapi juga subjek yang berperan dalam memberikan data, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam upaya menciptakan harmoni. Oleh karena itu, IHaI tidak hanya mengandalkan data kuantitatif tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti survei online, forum diskusi, dan pengumpulan Data Usul Saran dan Kritik (DUSK). Dengan melibatkan berbagai

agen, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, maupun sektor swasta, hasil yang diperoleh menjadi lebih representatif dan relevan untuk kebijakan yang inklusif.

Premis ketiga adalah **wellbeing function**, yang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama dari pengukuran harmoni sosial. Dalam pendekatan ini, harmoni tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai suatu kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, IHaI mengukur berbagai dimensi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan individu dan komunitas berkembang secara optimal. Dengan menggunakan pendekatan ini, IHaI tidak hanya menjadi alat pemetaan kondisi sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih komprehensif.

Implementasi praktis Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling berkesinambungan: **Preliminary Study (PS), Data Mining (DM), dan Post-Survey & Data Analyses (DA).**



Gambar 2.1 : 17 Langkah Diagram Alir WM

Tahap pertama, **Preliminary Study (PS),** merupakan fase awal yang berfokus pada kajian pendahuluan untuk menentukan struktur konseptual dan metodologi yang akan digunakan dalam pengukuran IHaI. Pada tahap ini, dilakukan kajian literatur, diskusi dengan para ahli dan pemangku kepentingan, serta penyusunan kerangka kerja yang mencakup dimensi, variabel, dan indikator yang akan diukur. Selain itu, tahap ini juga mencakup perancangan instrumen survei serta simulasi awal guna memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran.

Tahap kedua, **Data Mining (DM),** berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai sumber, baik melalui survei online, analisis media sosial, maupun data sekunder dari instansi terkait. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang objektif. Setelah data

terkumpul, tahap terakhir yaitu **Post-Survey & Data Analyses (DA)** dilakukan untuk menganalisis hasil survei menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif, termasuk pemetaan skor harmoni sosial, tren perubahan dari waktu ke waktu, serta rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan harmoni sosial di tingkat lokal maupun nasional.

2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian IHaI 2025 dirancang secara sistematis untuk mengukur harmoni sosial di tingkat kabupaten/kota dengan pendekatan **Wellbeing Methodology (WM)**. Objek kajian (**S**) dalam penelitian ini adalah kondisi harmoni sosial yang dijabarkan ke dalam **4 Dimensi (Di), 8 Variabel (Xi), dan 40 Indikator (X(i,j))**. Struktur ini memastikan bahwa pengukuran dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi harmoni di masyarakat.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui proses **kuantifikasi atas variabel Xi**, yang dianalisis berdasarkan **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)** dari responden. Data dikumpulkan melalui survei daring yang dirancang untuk mengukur bagaimana masyarakat menilai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan harmoni sosial. Dengan metode ini, hasil penelitian dapat menghasilkan indeks yang mencerminkan kondisi nyata berdasarkan pengalaman dan pandangan masyarakat secara luas.

Sementara itu, pendekatan kualitatif diperoleh dari **Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)** yang diberikan oleh responden. Data ini bertujuan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat harmoni sosial. Dengan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, IHaI 2025 tidak hanya memberikan gambaran numerik, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual terkait kondisi sosial masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

2.2 Instrumen Pengumpulan Data

Rancangan instrumen survei online untuk **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** dirancang agar **interaktif, real-time, dan berbasis dashboard** guna memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengumpulan serta pemantauan data. Instrumen ini mencakup:

1. **Formulir Digital Interaktif**
    a) Survei online berbasis **web atau aplikasi** yang memungkinkan responden mengisi data dengan mudah.
    b) Menggunakan kombinasi **pertanyaan kuantitatif (skala Likert)** untuk mengukur **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)** serta **pertanyaan terbuka** untuk Usul, Saran, dan Kritik (DUSK).
    c) **Validasi otomatis** untuk memastikan kualitas data sebelum dikirimkan.

2. **Sistem Pemantauan Berbasis Dashboard**

    a) **Tampilan grafis dinamis** dalam bentuk **diagram, peta interaktif, dan tren data** yang terus diperbarui selama fase survei.

    b) **Pemantauan progres survei** secara **real-time**, menampilkan jumlah responden, distribusi geografis, dan tren jawaban.

    c) **Filter data berdasarkan wilayah (Kabupaten/Kota), variabel, dan indikator** untuk analisis yang lebih spesifik.

3. **Fitur Analisis Awal & Laporan Otomatis**

    a) Algoritma otomatis melakukan **analisis awal** terhadap data yang masuk.

    b) **Identifikasi pola dan outlier**, termasuk perubahan signifikan dalam Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA).

    c) **Ekspor laporan sementara** dalam format grafik, tabel, dan narasi ringkas sebagai bahan pemantauan dan evaluasi selama survei berlangsung.

Dengan rancangan ini, **tim survei dan pemangku kepentingan** dapat secara langsung mengakses dan menganalisis data tanpa harus menunggu survei selesai, memungkinkan tindakan cepat terhadap temuan-temuan penting.

2.3 Responden dan Sampel

Responden dan Sampel IHaI 2025

Dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, pemilihan responden mengikuti **kaidah Wellbeing Methodology (WM)** yang menekankan inklusivitas dan representativitas populasi. Responden dipilih secara **purposive population**, memastikan bahwa mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah survei. **Batas minimum responden ditetapkan sebanyak 400 orang**, guna memperoleh data yang valid dan mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas.

Selain itu, untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah yang berbeda-beda, sampel juga diterapkan dengan metode **Morgan & Krejcie**, yang merupakan pendekatan statistik untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi. Dengan metode ini, jumlah **responden dalam suatu daerah ditetapkan sekitar 400 orang**, yang dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang representatif terkait tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keberagamaan di wilayah tersebut.

Kombinasi antara pendekatan **purposive population** dan **metode Morgan & Krejcie** memastikan bahwa hasil IHaI 2025 memiliki **akurasi tinggi**, dapat dibandingkan antarwilayah, serta memungkinkan analisis yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi harmoni sosial di Indonesia.

2.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk memastikan kualitas data yang diperoleh dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, dilakukan **uji validitas dan reliabilitas** terhadap instrumen survei yang digunakan. Validitas mengukur sejauh mana instrumen mampu mengukur konsep yang dimaksud, sedangkan reliabilitas memastikan konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan dalam kondisi serupa.

2.4.1 Validitas Konstruk

Validitas Konstruk dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) bertujuan untuk memastikan bahwa **objek dan komponennya benar-benar mencerminkan konsep yang ingin diukur**. Dalam hal ini, IHaI terdiri dari **4 dimensi utama**, **8 variabel (Xi)**, dan **40 indikator (X(i,j))**, yang masing-masing dirancang untuk menangkap aspek harmoni sosial, ekonomi, budaya, dan keberagamaan. Validitas konstruk memastikan bahwa setiap dimensi dan variabel dalam indeks ini memiliki **kesesuaian teoritis dan empiris** dengan realitas sosial yang diukur, sehingga hasilnya dapat dipercaya dalam analisis dan pengambilan kebijakan.

Sebagai bagian dari proses validasi, rancangan **kuesioner dalam instrumen survei** telah melalui **serangkaian uji kelayakan** dalam berbagai tahapan. Salah satu tahapan kunci adalah **Preliminary Study (PS)**, yang dilakukan untuk mengevaluasi **relevansi dan kejelasan indikator** yang digunakan dalam survei. Dalam tahap ini, dilakukan **uji reliabilitas dan validitas**, termasuk melalui **diskusi kelompok terfokus (FGD)** dengan para ahli, wawancara mendalam, serta analisis statistik awal. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah setiap indikator mampu mengukur aspek yang diinginkan secara konsisten dan tanpa bias.

Proses validasi ini juga mencakup **uji coba survei** pada responden dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara luas. Dari hasil uji coba, dilakukan analisis faktor untuk melihat apakah **indikator yang digunakan saling berkorelasi dengan baik dalam membentuk variabel yang diukur**. Jika ditemukan **indikator yang tidak signifikan atau redundan**, maka dilakukan perbaikan melalui revisi pertanyaan atau penyempurnaan konsep pengukuran. Dengan demikian, validitas konstruk dalam IHaI bukan hanya sekadar teori, tetapi telah diuji melalui pendekatan berbasis data untuk memastikan **akurasi, keandalan, dan kesesuaian instrumen survei** dalam menangkap realitas sosial masyarakat.

2.4.2 Validitas Konten

Validitas konten dalam Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) telah diuji secara sistematis dalam **fase Preliminary Study (PS)** untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan konsep harmoni sosial, ekonomi, budaya, dan keberagamaan. Validitas konten bertujuan untuk menilai apakah **instrumen survei mencakup seluruh aspek yang relevan tanpa ada elemen penting yang terlewat atau tidak sesuai dengan konteks sosial yang diukur**. Dalam proses ini, tim peneliti melakukan **review mendalam terhadap definisi operasional variabel**, melakukan uji kelayakan indikator, serta mengkaji keselarasan antara indikator dengan realitas di lapangan.

Namun, dalam pengukuran terhadap **objek yang kompleks dan dinamis**, selalu ada potensi **tantangan metodologis** yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah **overlapping**, yaitu ketika beberapa indikator memiliki kesamaan konsep atau mengukur aspek yang terlalu

berdekatan, sehingga menyebabkan **redundansi dalam pengukuran**. Overlapping ini dapat mengurangi kejelasan analisis dan menyebabkan interpretasi data menjadi bias. Oleh karena itu, dalam validasi konten, setiap indikator diperiksa untuk memastikan **tidak ada duplikasi konsep**, serta dilakukan analisis faktor untuk menguji apakah indikator tersebut benar-benar memiliki kontribusi unik dalam pengukuran variabelnya.

Tantangan lainnya adalah **too much lacking**, yaitu kondisi di mana indikator yang digunakan masih **kurang mencerminkan keseluruhan aspek yang ingin diukur**, sehingga menyebabkan adanya **missing dimension** dalam analisis. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah aspek harmoni sosial mengalami perubahan signifikan di masyarakat, namun belum tercermin dalam instrumen survei. Oleh sebab itu, validitas konten dalam IHaI **tidak hanya diuji sekali, tetapi harus terus dikaji dan diperbarui** secara berkala untuk memastikan tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi tantangan tersebut, **review reguler terhadap instrumen survei** dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi kebijakan, serta masyarakat sebagai responden utama. Proses ini memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif dalam menyempurnakan **pemilihan indikator yang lebih representatif**, sekaligus menyesuaikan instrumen pengukuran dengan konteks yang terus berkembang. Selain itu, pendekatan berbasis data digunakan untuk **mengidentifikasi indikator yang memiliki bobot signifikan** dalam membentuk variabel harmoni sosial, sehingga dapat mengeliminasi elemen yang tidak terlalu berkontribusi terhadap hasil akhir.

Dengan demikian, validitas konten dalam IHaI bukan hanya sekadar prosedur awal dalam fase PS, tetapi merupakan **proses yang berkelanjutan** untuk menjamin bahwa **instrumen pengukuran tetap akurat, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial**. Melalui review reguler dan evaluasi empiris, tantangan seperti **overlapping dan too much lacking dapat diminimalkan**, sehingga pengukuran harmoni sosial dapat dilakukan dengan **lebih presisi dan dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan yang berbasis data**.

1.4.3 Uji Validitas : Perason's Correlation

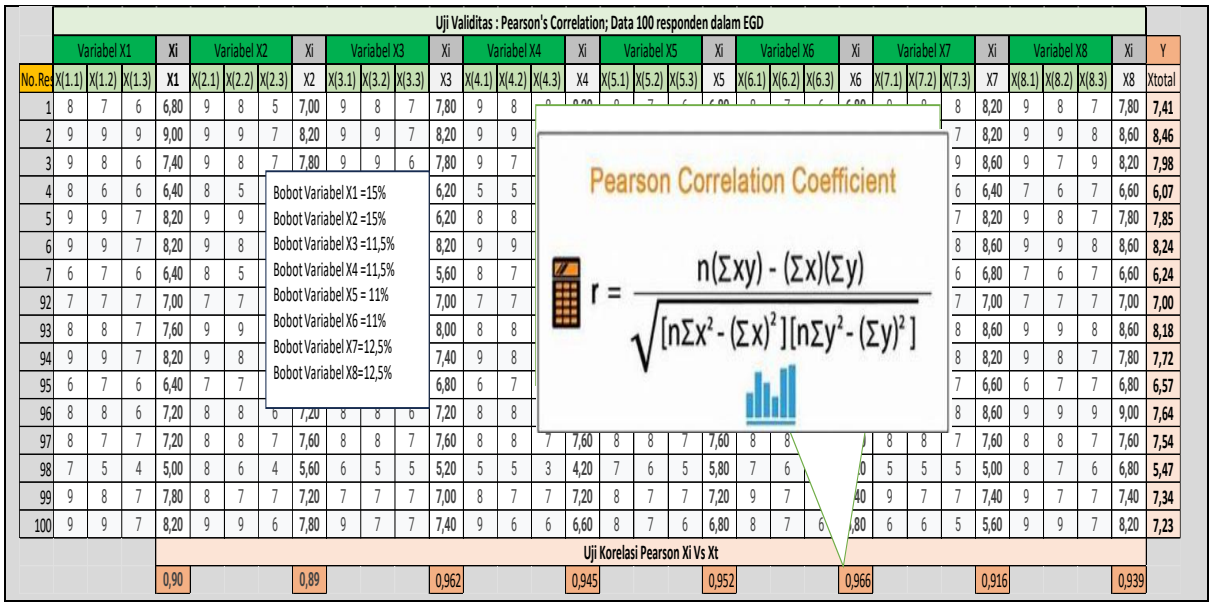
Uji Validitas dilakukan dengan metode **Pearson's Correlation**, yang mengukur korelasi antara setiap indikator dengan total skor variabelnya. Jika koefisien korelasi (**r**) menunjukkan nilai signifikan (biasanya $r \geq 0{,}3$ dengan p-value $< 0{,}05$), maka indikator tersebut dianggap valid dan memiliki hubungan kuat dengan variabel yang diukur. Indikator yang tidak memenuhi kriteria validitas akan dievaluasi dan disesuaikan sebelum diterapkan dalam survei utama.

2.4.4 Uji Reliabilitas : Alpha Cronbach Coefficient

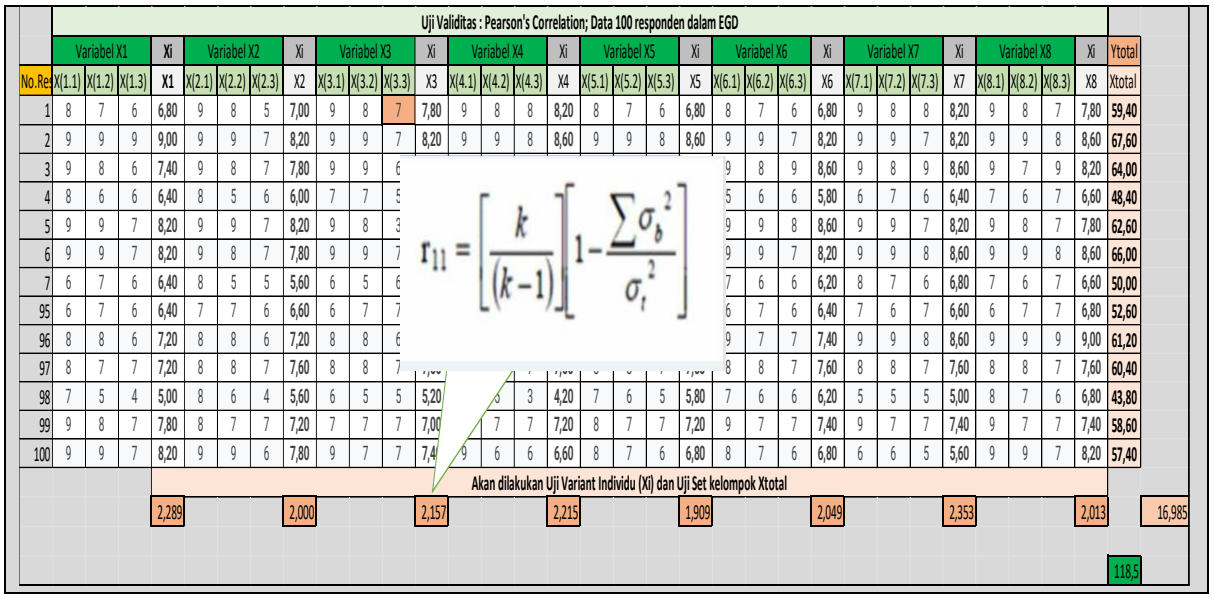
Uji Reliabilitas menggunakan **Koefisien Alpha Cronbach**, yang menilai sejauh mana instrumen survei memberikan hasil yang konsisten. **Nilai Alpha Cronbach ≥ 0,7** menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Jika nilai koefisien terlalu rendah, maka dilakukan revisi terhadap beberapa indikator agar hasil pengukuran lebih stabil dan dapat dipercaya.

Dengan menerapkan uji validitas dan reliabilitas ini, IHaI 2025 memastikan bahwa setiap instrumen yang digunakan **akurasi tinggi, dapat diandalkan, dan mampu menggambarkan tingkat harmoni sosial di berbagai daerah secara objektif dan terukur**.

Berdasarkan Data Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas dinyatakan baik (valid):



Gambar 2.2: Tabel Pengukuran Uji Validitas



Gambar 2.3: Tabel Pengukuran Uji Reliabilitas

BAB III DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam pelaksanaan kajian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga kluster data utama, yaitu: **(1) data identifikasi responden, (2) data skor penilaian PPA (Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas), dan (3) data usul, saran, dan kritik (DUSK).** Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam kerangka riset publik yang menjadikan masyarakat Kabupaten Tangerang sebagai responden utama, yakni warga yang berada dalam lingkup wilayah kajian dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki persepsi, pengalaman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial yang membentuk kondisi harmoni di daerah tersebut.

Kluster pertama, yaitu **data identifikasi responden**, dikumpulkan dengan prinsip menjaga anonimitas. Meskipun identitas pribadi responden tidak dikumpulkan, data demografis dasar seperti wilayah domisili (tingkat kecamatan/kelurahan), rentang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan tetap dicatat guna membangun profil umum responden. Informasi ini berperan penting untuk memastikan keterwakilan yang proporsional dari berbagai lapisan masyarakat, serta sebagai dasar analisis terhadap perbedaan persepsi atau pengalaman harmoni berdasarkan latar belakang sosial. Dengan demikian, walaupun bersifat anonim, data ini tetap mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai siapa yang memberikan respons, tanpa melanggar prinsip privasi dan etika riset.

Kluster kedua berisi **data kuantitatif** berupa skor penilaian responden terhadap tiga indikator utama dalam kajian IHaI, yaitu **Persepsi (X(i.1))** terhadap kondisi harmoni sosial, **Partisipasi (X(i.2))** dalam aktivitas atau inisiatif yang mendukung harmoni, serta **Akseptabilitas (X(i.3))** terhadap kebijakan atau situasi sosial yang berlangsung di lingkungan mereka. Ketiga indikator ini diukur menggunakan instrumen survei daring berbasis skala likert, sehingga memungkinkan pengolahan data secara statistik. Hasil analisis menunjukkan pola korelasi yang kuat, terutama antara persepsi dan partisipasi, yang menandakan bahwa masyarakat yang memandang kondisi harmoni secara positif cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan yang memperkuat kohesi sosial. Data ini memberikan landasan empiris bagi penilaian objektif terhadap kondisi harmoni di Kabupaten Tangerang, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, **kluster ketiga** merupakan dimensi kualitatif dari kajian IHaI yang mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui **Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)**. Dalam bagian ini, responden diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta harapan mereka terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan beragama di kota mereka. Analisis DUSK dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana tanggapan responden dikelompokkan dalam tema-tema utama yang muncul berulang, seperti perlunya penguatan komunikasi antarwarga, peningkatan pelayanan publik yang adil, dan pentingnya menjaga toleransi lintas kelompok sosial. Data DUSK ini memberikan kedalaman analisis yang tidak dapat dijangkau oleh data kuantitatif semata, dan menjadi masukan strategis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, keseluruhan proses pengumpulan dan analisis data IHaI 2025

ini bukan hanya memotret kondisi harmoni secara komprehensif, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang aktif dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Analisis data IHaI 2025 Kabupaten Tangerang:

1. Analisis untuk Menjawab Tujuan Penelitian:

a) Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama dalam kajian IHaI, yaitu sejauh mana masyarakat Kabupaten Tangerang merasakan dan menjalani kehidupan yang harmonis secara sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.

b) Maksud dan Tujuan spesifik IHaI : 1. Sebagai kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat; 2. Memotret dan memetakan skor Penilaian PPA Masyarakat; 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik (DUSK); 4. Mendapatkan Evidence Based Data (EBD); 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi Kebijakan

c) Responden adalah masyarakat umum di wilayah kajian, dipilih secara inklusif dan tetap menjaga anonimitas.

d) Data dari skor PPA (Persepsi, Partisipasi, Akseptabilitas) menjadi dasar evaluasi atas dimensi harmoni, sesuai dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM) sebagai fondasi riset publik.

2. Menggali Informasi Penting dari Setiap Kluster:

a) Kluster **Identifikasi Responden** membantu mengenali karakter sosial masyarakat berdasarkan distribusi wilayah, usia, pendidikan, dll.

b) Kluster **Skor PPA** dianalisis untuk mengukur tren umum dan korelasi antar indikator; misalnya, tingginya partisipasi sering beriringan dengan persepsi harmoni yang positif.

c) Kluster **DUSK** (Usul, Saran, dan Kritik) dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk menangkap isu-isu prioritas masyarakat seperti keadilan layanan, ruang komunikasi sosial, atau penguatan nilai-nilai lokal.

3. Membangun Interpretasi Sosial dari Data:

a) Angka-angka dari data kuantitatif tidak hanya dibaca sebagai skor, tapi ditafsirkan dalam konteks sosial, nilai lokal, dan dinamika budaya Kabupaten Tangerang.

b) Misalnya, skor akseptabilitas rendah dapat diinterpretasi sebagai ketidaksesuaian antara kebijakan dengan ekspektasi masyarakat.

c) Hasil analisis ini menggabungkan data statistik dengan narasi sosial untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

3.1 Data Identifikasi Responden

Dalam pelaksanaan survei **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, **data identifikasi responden** dikumpulkan dalam bentuk kategori umum yang tidak mengungkap informasi

pribadi. Pendekatan ini memastikan bahwa survei tetap mempertahankan prinsip **anonimitas**, di mana responden tidak perlu mencantumkan identitas individu seperti nama atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung. Data yang dikumpulkan umumnya mencakup kategori seperti **usia, jenis kelamin, wilayah domisili, tingkat pendidikan, dan sektor pekerjaan**, yang digunakan untuk analisis demografi tanpa mengorbankan privasi responden.

Meskipun mengumpulkan data kategori umum, sistem IHaI dirancang untuk **menghindari pengumpulan informasi sensitif** yang dapat melanggar hak privasi responden. Setiap data yang masuk ke dalam sistem survei dienkripsi dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis agregat, tanpa adanya pemetaan atau pelacakan individu tertentu. Dengan pendekatan ini, responden merasa lebih aman dan bebas dalam memberikan jawaban, sehingga meningkatkan **validitas dan kejujuran data** yang diperoleh.

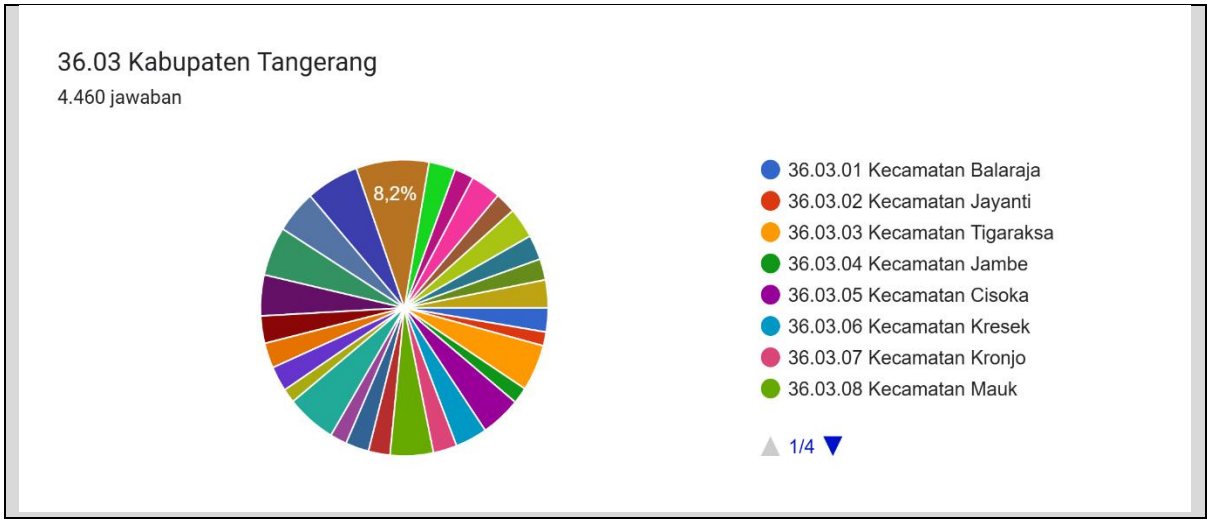
Konsep anonimitas yang diterapkan dalam IHaI juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap metode pengukuran ini. Dengan memastikan bahwa **partisipasi dalam survei tidak memiliki konsekuensi pribadi**, diharapkan tingkat respons dan keterbukaan dalam menjawab pertanyaan semakin tinggi. Selain itu, data yang dikumpulkan tetap memberikan manfaat maksimal dalam **analisis statistik dan perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy),** tanpa menimbulkan risiko terhadap keamanan atau privasi individu.

3.1.1 Data Domisili Responden

Data domisili responden dalam kajian IHaI 2025 Kabupaten Tangerang memberikan gambaran tentang sebaran jumlah responden di setiap kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Meskipun identitas individu tetap anonim, informasi mengenai domisili responden dikumpulkan sebagai bagian dari kluster data identifikasi untuk memastikan keterwakilan yang merata. Data ini menunjukkan bahwa responden berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Distribusi responden berdasarkan kecamatan menjadi penting untuk memahami konteks sosial secara geografis. Jumlah partisipasi yang berbeda di tiap wilayah mencerminkan dinamika lokal, baik dari sisi kepadatan penduduk maupun tingkat keterlibatan masyarakat dalam riset publik. Dengan analisis ini, dapat diketahui apakah ada kecamatan dengan kecenderungan persepsi, partisipasi, atau akseptabilitas yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya, sehingga memungkinkan pemetaan awal terhadap potensi harmoni atau ketegangan sosial di tingkat lokal.

Melalui data domisili, kajian IHaI dapat melakukan pendekatan yang lebih presisi dalam menafsirkan hasil skor PPA maupun masukan kualitatif dari responden. Perbandingan antar kecamatan tidak hanya menguatkan validitas data, tetapi juga membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masing-masing wilayah di Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.1 : Data Persebaran Domisili Responden

3.1.2 Data Responden Berdasarkan Profesi Pekerjaan

Data responden berdasarkan **profesi pekerjaan** merupakan salah satu aspek penting dalam analisis **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**. Profesi pekerjaan mencerminkan latar belakang sosial-ekonomi responden, yang dapat memengaruhi cara pandang mereka terhadap harmoni sosial, ekonomi, dan budaya di suatu wilayah. Dengan mengelompokkan responden berdasarkan profesinya, analisis dapat mengungkap **variasi persepsi dan tingkat partisipasi** dalam kehidupan sosial yang mungkin berbeda antara sektor formal, informal, pekerja mandiri, atau pegawai negeri.

Profesi pekerjaan juga berperan dalam **mengidentifikasi kesenjangan sosial dan ekonomi** dalam suatu daerah. Misalnya, jika terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat persepsi harmoni antara kelompok pekerja sektor industri dengan pekerja sektor jasa, hal ini dapat menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap kesejahteraan sosial. Analisis ini dapat memberikan gambaran lebih dalam mengenai **kondisi sosial ekonomi suatu daerah**, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Dari perspektif **partisipasi masyarakat**, profesi pekerjaan juga dapat memengaruhi tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan sosial dan kebijakan publik. Pekerja di sektor pemerintahan atau akademisi, misalnya, cenderung memiliki keterlibatan lebih tinggi dalam diskusi sosial dibandingkan dengan pekerja di sektor informal. Dengan mengolah data responden berdasarkan profesi, IHaI dapat **mengidentifikasi kelompok yang lebih aktif dalam menyuarakan pendapatnya** serta kelompok yang perlu lebih diberdayakan dalam pembangunan sosial.

3.1.3 Data Usia Responden

Data usia responden dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** memiliki peran strategis dalam memahami dinamika sosial dan bagaimana berbagai kelompok usia menanggapi isu-isu harmoni sosial, ekonomi, dan budaya. Usia merupakan faktor demografis utama yang memengaruhi cara individu **berpikir, berpartisipasi, dan menerima perubahan sosial**.

Dengan menganalisis data berdasarkan kelompok usia, kita dapat mengidentifikasi pola-pola persepsi yang berbeda antara generasi muda, dewasa, dan lanjut usia, serta memahami bagaimana pengalaman hidup memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam membangun harmoni sosial.

Kelompok usia yang berbeda sering kali memiliki **prioritas dan kepentingan yang beragam**. Misalnya, generasi muda (18–30 tahun) mungkin lebih peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan, peluang kerja, dan kebebasan berekspresi, sementara kelompok usia dewasa (31–50 tahun) cenderung lebih fokus pada stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, kelompok lanjut usia (di atas 50 tahun) mungkin lebih memperhatikan keberlanjutan budaya dan layanan sosial bagi masyarakat. Dengan mengetahui pola-pola ini, kebijakan publik dapat lebih **disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok usia**.

3.1.4 Data Pendidikan

Data pendidikan responden dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi terhadap harmoni sosial. Pendidikan sering kali menjadi faktor penentu dalam **cara individu memahami, menilai, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya**. Dengan mengelompokkan data berdasarkan tingkat pendidikan, analisis dapat lebih mendalam dalam melihat apakah ada perbedaan pola pikir dan sikap antara kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah, menengah, dan tinggi terhadap harmoni sosial.

Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan **kapasitas individu dalam menerima perbedaan, menyelesaikan konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial**. Responden dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap keberagaman dan cenderung lebih toleran terhadap perbedaan sosial maupun budaya. Sementara itu, kelompok dengan pendidikan lebih rendah mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif atau berbasis pengalaman lokal. Dengan memahami perbedaan ini, kebijakan yang lebih tepat dapat dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi di berbagai kelompok masyarakat.

3.2 Data Kuantitatif Skor Penilaian PPA Variabel Xi

Dalam kajian **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, **data kuantitatif skor penilaian PPA (Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas) terhadap Variabel Xi** merupakan data utama yang harus dikelola secara sistematis. Data ini menjadi fondasi dalam mengukur tingkat harmoni sosial di suatu daerah, karena mencerminkan bagaimana masyarakat menilai dan berinteraksi dengan berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Setiap **Variabel Xi** yang dianalisis dalam IHaI memiliki skor kuantitatif yang dihitung berdasarkan respons masyarakat melalui survei online. Skor ini dihasilkan dari agregasi jawaban responden terkait dengan **tiga komponen utama**: **Persepsi (X(i.1))**, yang mencerminkan pandangan subjektif masyarakat terhadap situasi yang ada; **Partisipasi (X(i.2))**, yang mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial; dan

Akseptabilitas (X(i.3)), yang merefleksikan sejauh mana masyarakat menerima suatu kondisi sosial tertentu.

Pengelolaan data kuantitatif ini sangat penting karena menjadi dasar dalam **analisis statistik deskriptif dan inferensial** untuk mengidentifikasi tren, pola, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap harmoni sosial di suatu wilayah. Dengan menggunakan metode pengolahan data yang tepat, seperti distribusi frekuensi, perhitungan rerata skor, dan analisis korelasi antarvariabel, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai **kondisi sosial serta faktor-faktor yang perlu ditingkatkan untuk mencapai harmoni yang lebih baik**.

Dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk tabel, **peneliti dapat melakukan berbagai perhitungan statistik**, seperti **mean (rata-rata), median, standar deviasi, serta analisis distribusi dan korelasi antarvariabel**. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat hanya dari representasi visual dalam grafik. Sebagai contoh, data dalam bentuk tabulasi memungkinkan pemisahan lebih lanjut berdasarkan kategori responden, seperti usia, pendidikan, atau profesi, sehingga analisis dapat lebih spesifik dan relevan terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Dalam penelitian berbasis **Wellbeing Methodology (WM)** yang digunakan dalam IHaI 2025, **pengolahan data tabulasi juga mempermudah proses transformasi lanjutan**, seperti **normalisasi data, pembobotan variabel, dan perhitungan indeks komposit**. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mendapatkan **indikator yang lebih akurat dan representatif**, yang selanjutnya akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy).

Transformasi ke dalam bentuk tabulasi juga **memfasilitasi perbandingan antar periode survei** atau antar wilayah. Dengan format tabular, data dari berbagai kecamatan atau kabupaten dapat diurutkan dan dibandingkan dengan lebih mudah, sehingga memungkinkan analisis perbedaan dan perubahan dari waktu ke waktu. Data ini juga lebih siap untuk diproses dengan software statistik seperti **SPSS, R, atau Python**, yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi analisis lebih lanjut.

	Skor IHaI 2025 : Direct Measurement																						
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																						
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
7	8	9	8	8	9	8	9	8	9	9	9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4449	1	4	5	2	3	3	4	1	5	5	4	2	2	4	3	1	5	4	1	5	3	1	5	4
4450	9	9	2	9	9	3	9	9	5	9	9	8	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5
4451	8	8	6	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	7	9	8	7	8	8	8	7	8	8	8
4452	7	6	7	7	7	6	8	8	7	6	6	6	6	7	6	6	6	5	7	6	6	7	9	8
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Gambar 3.2 : Data Tabulasi Excel atas Skor PPA

3.3 Data Usul Saran dan Kritik (DUSK)

Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK) dalam IHaI 2025

Dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, **Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)** merupakan bagian penting dari kajian kualitatif yang diperoleh dari responden melalui **tiga kuesioner pertanyaan terbuka**. Berbeda dengan data kuantitatif yang bersifat terstruktur, DUSK memberikan **ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta evaluasi mereka secara lebih bebas dan mendalam**. Dengan demikian, DUSK berfungsi sebagai pelengkap terhadap data numerik dengan menangkap **nuansa opini publik yang tidak dapat diukur secara langsung melalui angka**.

Tiga pertanyaan terbuka dalam survei IHaI 2025 dirancang untuk mengakomodasi tiga aspek utama dalam partisipasi responden:

1. **Usul** – Responden dapat mengusulkan **gagasan atau solusi konkret** terkait peningkatan harmoni sosial dan variabel yang diukur dalam IHaI.
2. **Saran** – Bagian ini memungkinkan responden memberikan **masukan perbaikan atau langkah-langkah yang perlu diambil** untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni di masyarakat.
3. **Kritik** – Responden diberikan kesempatan untuk mengungkapkan **ketidakpuasan atau masalah yang mereka rasakan**, termasuk kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan harmoni sosial.

Data DUSK kemudian dianalisis dengan metode **analisis tematik atau content analysis** guna mengidentifikasi **pola, tren, serta insight yang dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy).** Pendekatan ini membantu dalam memahami **persepsi publik secara lebih komprehensif**, khususnya dalam hal **tantangan, kebutuhan, serta ekspektasi masyarakat terkait harmoni sosial**.

Dengan adanya DUSK dalam IHaI 2025, hasil survei menjadi lebih **holistik dan reflektif terhadap realitas sosial yang berkembang**. Integrasi data kualitatif ini juga memperkaya pemahaman mengenai efektivitas program dan kebijakan, sekaligus memberikan arah bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan berdasarkan perspektif masyarakat.

3.3.1 Resume Saran dan Rekomendasi Dimensi Ekonomi

✅ 5 Resume Saran & Rekomendasi Dimensi Ekonomi:

1. **Peningkatan Ketersediaan Lapangan Kerja Lokal**
    1. Banyak aspirasi publik menunjukkan kebutuhan penciptaan pekerjaan yang merata.
    2. **Rekomendasi:** Pemerintah daerah perlu mendorong investasi sektor padat karya dan industri kreatif berbasis lokal.
2. **Penguatan UMKM dan Akses Permodalan**
    1. Muncul dorongan agar usaha kecil lebih diberdayakan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
    2. **Rekomendasi:** Perluas skema bantuan modal mikro, pendampingan, dan akses pasar digital untuk UMKM.
3. **Perbaikan Infrastruktur Ekonomi Dasar**
    1. Masyarakat menilai fasilitas umum seperti jalan, pasar, dan jaringan digital masih belum mendukung ekonomi secara optimal.
    2. **Rekomendasi:** Alokasikan dana pembangunan secara adil untuk mempercepat konektivitas wilayah ekonomi.
4. **Peningkatan Literasi dan Keterampilan Ekonomi**
    1. Kurangnya pelatihan kerja dan minimnya edukasi finansial turut memperlemah posisi ekonomi masyarakat.
    2. **Rekomendasi:** Gelar pelatihan keterampilan teknis, keuangan, dan kewirausahaan secara berkala dan terukur.
5. **Transparansi dan Keadilan dalam Program Ekonomi Publik**
    1. Ada kritik soal distribusi bantuan dan program ekonomi yang tidak merata atau tidak transparan.
    2. **Rekomendasi:** Tingkatkan pengawasan partisipatif, integrasi sistem data terpadu, dan audit sosial dalam setiap program bantuan ekonomi.

Gambar 3.3 : Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat Dimensi Ekonomi

3.3.2 Resume Saran dan Rekomendasi Dimensi Sosial

5 Resume Saran & Rekomendasi Dimensi Sosial

1. **Penguatan Solidaritas dan Kepedulian Sosial di Komunitas**
    1. Masyarakat menginginkan adanya peningkatan rasa empati, gotong-royong, dan kepedulian terhadap kelompok rentan.
    2. **Rekomendasi:** Bentuk dan aktifkan kembali kelompok sosial berbasis RT/RW seperti Karang Taruna, Posyandu, dan kelompok relawan sosial.
2. **Perbaikan Akses Layanan Publik yang Adil dan Inklusif**
    1. Keluhan muncul soal diskriminasi atau kesenjangan dalam pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, bantuan sosial).
    2. **Rekomendasi:** Terapkan prinsip kesetaraan akses dan sistem pemantauan kinerja layanan publik berbasis masyarakat.

3. **Peningkatan Interaksi Sosial Lintas Kelompok dan Generasi**
    1. Ketegangan antar kelompok usia, etnis, atau latar belakang sosial menjadi perhatian publik.
    2. **Rekomendasi:** Adakan kegiatan sosial dan budaya bersama yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat.
4. **Penanganan Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Secara Terpadu**
    1. Banyak usulan mengarah pada solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat.
    2. **Rekomendasi:** Integrasikan program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan, pelatihan kerja, dan pendampingan keluarga.
5. **Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Berbasis Data Akurat**
    1. Masalah klasik: penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.
    2. **Rekomendasi:** Perbarui data sosial secara partisipatif dan transparan, melibatkan masyarakat dalam validasi data penerima manfaat.

Gambar 3.4 : Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat Dimensi Sosial

3.3.3 Resume Saran dan Rekomendasi Dimensi Budaya

✅ **5 Resume Saran & Rekomendasi Dimensi Budaya**

1. **Pelestarian Kearifan Lokal dan Tradisi Daerah**
    a) Banyak masyarakat menyuarakan kekhawatiran terhadap hilangnya tradisi akibat modernisasi dan minimnya dokumentasi budaya lokal.
    b) **Rekomendasi:** Pemerintah daerah perlu mendukung revitalisasi budaya melalui festival budaya, sekolah adat, dan pendokumentasian digital.
2. **Pemberdayaan Komunitas Adat dan Pelaku Budaya**
    a) Pelaku budaya sering merasa tidak difasilitasi secara adil dalam kebijakan pembangunan.
    b) **Rekomendasi:** Libatkan tokoh adat, seniman lokal, dan komunitas budaya dalam forum perencanaan daerah (Musrenbang, FGD).
3. **Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan dan Media**
    a) Nilai budaya belum menjadi arus utama dalam kurikulum atau konsumsi media anak muda.
    b) **Rekomendasi:** Perlu kurikulum muatan lokal berbasis nilai budaya serta dukungan untuk konten digital kreatif bertema budaya.
4. **Pemanfaatan Ruang Publik untuk Aktivitas Budaya**
    a) Kurangnya ruang ekspresi budaya seperti panggung terbuka, balai seni, dan taman budaya menghambat interaksi antarkelompok.
    b) **Rekomendasi:** Sediakan infrastruktur budaya terbuka yang dapat digunakan secara inklusif oleh masyarakat lintas usia dan latar belakang.
5. **Pencegahan Komersialisasi Berlebihan terhadap Warisan Budaya**
    a) Kekhawatiran publik muncul terhadap eksploitasi budaya lokal hanya sebagai “objek wisata”.
    b) **Rekomendasi:** Tetapkan standar etika dalam pengelolaan budaya berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip kemanfaatan bersama.

Gambar 3.5 : Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat Dimensi Budaya

3.3.4 Resume Saran dan Rekomendasi Dimensi Keberagamaan

5 Resume Saran & Rekomendasi Dimensi Keberagamaan

1. **Penguatan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Publik**
    1. Aspirasi publik menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama di ruang publik.
    2. **Rekomendasi:** Luncurkan program pendidikan nilai-nilai moderat lintas agama di sekolah, komunitas, dan media sosial.
2. **Pencegahan Politisasi dan Provokasi Isu Agama**
    1. Masyarakat resah terhadap penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik atau polarisasi.
    2. **Rekomendasi:** Perkuat regulasi dan pemantauan terhadap ujaran kebencian berbasis agama serta dorong netralitas ruang ibadah dari aktivitas politik.
3. **Penyediaan Sarana Ibadah yang Adil dan Proporsional**
    1. Masih ditemukan keluhan tentang akses dan pembangunan rumah ibadah yang tidak setara.
    2. **Rekomendasi:** Pemda perlu memfasilitasi dialog antarumat dan menegakkan aturan pendirian rumah ibadah yang adil dan transparan.
4. **Penguatan Forum dan Dialog Antarumat Beragama**
    1. Forum komunikasi antaragama belum optimal sebagai ruang membangun pengertian bersama.
    2. **Rekomendasi:** Aktifkan kembali FKUB dan forum lintas iman dengan agenda yang nyata, berkelanjutan, dan menyentuh akar persoalan masyarakat.
5. **Pemberdayaan Tokoh Agama sebagai Agen Perdamaian**
    1. Tokoh agama masih berperan besar dalam memengaruhi opini publik dan sosial.
    2. **Rekomendasi:** Berikan pelatihan kepemimpinan damai, literasi digital, dan peran strategis tokoh agama dalam membendung radikalisme serta menjaga kohesi sosial.

Gambar 3.6: Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat Dimensi Keberagamaan

Dalam dimensi ekonomi, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara inklusif dengan mendorong akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung keberlanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Pada aspek sosial dan budaya, penguatan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman menjadi kunci dalam membangun harmoni sosial. Pendidikan multikultural serta promosi seni dan budaya lokal dapat meningkatkan rasa saling menghormati di antara kelompok masyarakat. Selain itu, ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif, seperti pusat komunitas dan kegiatan gotong royong, perlu terus dikembangkan guna mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat kohesi sosial.

Dalam dimensi keberagamaan, moderasi beragama dan toleransi harus terus diperkuat melalui dialog antarumat beragama serta peran aktif tokoh agama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Pendidikan agama yang inklusif dan kebijakan yang menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang damai. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas ibadah yang layak serta menciptakan regulasi yang adil untuk semua kelompok agama guna mencegah konflik berbasis keagamaan.

(Data DUSK secara detail akan disajikan dalam lampiran.)

3.4 Resume Data Dimensi Di dan Variabel Xi

Hasil pengukuran **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)** memberikan skor nilai baik pada tingkat **variabel** maupun **dimensi**, yang menjadi aspek krusial dalam analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Skor variabel mencerminkan aspek spesifik yang mempengaruhi suatu dimensi, sedangkan skor dimensi menggambarkan kondisi umum yang lebih luas berdasarkan agregasi dari berbagai variabel terkait. Dengan demikian, analisis yang cermat terhadap skor ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu fenomena sosial atau kebijakan publik.

Selain itu, perbandingan skor antar variabel dalam satu dimensi membantu mengidentifikasi titik lemah dan titik kuat dalam suatu bidang, sehingga intervensi dapat lebih terarah. Misalnya, dalam dimensi ekonomi, skor variabel mengenai akses lapangan kerja dan kesejahteraan dapat dianalisis untuk mengetahui apakah ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan publik. Demikian pula, dalam dimensi sosial atau budaya, skor variabel tentang interaksi sosial dan keterlibatan komunitas dapat menjadi indikator awal dalam menilai harmoni sosial di suatu wilayah.

Lebih lanjut, analisis skor pada tingkat dimensi memberikan gambaran besar tentang kecenderungan umum dalam suatu sektor atau kebijakan, yang penting dalam penyusunan rekomendasi strategis. Dengan memahami bagaimana masing-masing dimensi berkembang dan saling berkaitan, pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta merespons permasalahan publik dengan pendekatan berbasis data. Oleh karena itu, pengukuran PPA tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga landasan dalam membangun strategi kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

	Skor IHaI 2025 : Direct Measurement																							
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																							
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skor PPA Var.	6,32	6,66	6,28	6,30	6,57	6,28	6,58	6,79	6,58	6,42	6,64	6,46	6,48	6,68	6,48	6,46	6,62	6,48	6,69	6,84	6,74	6,71	6,84	6,74
StanDev	2,09	2,01	2,00	2,04	2,04	1,97	2,06	1,98	1,93	1,98	1,91	1,90	2,02	1,96	1,94	2,01	1,96	1,93	2,17	2,07	2,01	2,14	2,05	1,99
Skor Var Xi	6,44			6,40			6,66			6,52			6,56			6,53			6,77			6,77		
Skor Dimensi Di	6,42						6,59						6,55						6,77					
Skor IHaI 2025	6,58																							

Gambar 3.7 : Data Tabulasi Skor dan Perhitungan Sederhana

Hasil pengukuran data per variabel menunjukkan bahwa variabel **X7** memperoleh skor tertinggi sebesar **6,77 (kategori baik)**, sementara variabel **X2** memiliki skor terendah, yaitu **6,40 (kategori moderat)**. Perbedaan skor ini mencerminkan adanya variasi dalam tingkat persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap aspek yang diukur dalam masing-masing variabel. Skor tinggi pada **X7** menunjukkan bahwa aspek yang diwakili oleh variabel ini relatif lebih baik diterima atau lebih positif dibandingkan variabel lainnya. Sebaliknya, skor rendah pada **X2** mengindikasikan bahwa terdapat tantangan atau ketidakpuasan yang lebih tinggi dalam aspek yang diwakili oleh variabel tersebut.

Analisis terhadap perbedaan skor ini menjadi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi publik. Jika **X2** memiliki skor terendah, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui penyebabnya, seperti adanya hambatan akses, rendahnya keterlibatan masyarakat, atau kurangnya efektivitas kebijakan terkait. Sementara itu, skor tinggi pada **X7** dapat dijadikan sebagai referensi untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program yang telah diterapkan. Dengan membandingkan kedua variabel ini, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi pola-pola yang berkontribusi pada peningkatan atau penurunan skor suatu variabel.

Lebih lanjut, data ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kualitas pada variabel dengan skor rendah serta mempertahankan atau memperkuat aspek positif dari variabel dengan skor tinggi. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perumusan rekomendasi yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk intervensi kebijakan maupun program-program penguatan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan skor antar variabel harus dianalisis secara komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan akseptabilitas publik terhadap suatu kebijakan atau program.

3.4.1 Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan** untuk keluarga terpenuhi dengan harga yang terjangkau dan aman.
2. **Optimalisasi Lahan dan Praktik Pertanian** Berkelanjutan secara optimal untuk kemandirian pangan dan alternatif bahan pangan.
3. **Penggunaan Energi Terbarukan** dan Kelestarian Lingkungan di laut, perairan dan didarat secara bijaksana.
4. Peran-serta Masyarakat dalam **Kegiatan Berbasis Lingkungan,** melalui usaha tanaman organik dan optimalisasi lahan untuk alternatif pangan Masyarakat.
5. **Program Pemerintah** dalam kemandirian pangan yang positif, efektif dan transparan, terutama **makan bergizi gratis (MBG)**

Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan (Bobot 15%)

Variabel **Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan (X1)** menjadi aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan bobot **15%** dalam pengukuran. Variabel ini menyoroti keterkaitan antara ketersediaan pangan, aksesibilitas, serta praktik ekonomi berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Dalam pengukuran ini, terdapat beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi aktual di lapangan, yang kemudian dianalisis untuk memahami efektivitas kebijakan serta partisipasi masyarakat dalam upaya kemandirian pangan.

Indikator pertama menekankan **ketersediaan dan aksesibilitas pangan** bagi keluarga, dengan harga yang terjangkau dan aman untuk dikonsumsi. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya tanpa mengalami kendala ekonomi yang signifikan. Stabilitas harga bahan pangan serta kebijakan subsidi atau insentif bagi produsen lokal menjadi faktor utama dalam menjaga aksesibilitas yang merata di berbagai wilayah. Jika harga pangan tidak stabil atau sulit dijangkau, maka ketahanan pangan menjadi terganggu dan dapat berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, **optimalisasi lahan dan praktik pertanian berkelanjutan** menjadi aspek krusial dalam mencapai kemandirian pangan. Praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi pertanian modern dan diversifikasi tanaman, dapat meningkatkan hasil produksi tanpa merusak ekosistem. Di sisi lain, pemanfaatan lahan secara optimal, termasuk urban farming atau pertanian perkotaan, juga menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan alternatif sumber pangan bagi masyarakat.

Indikator lain yang turut diperhitungkan adalah **penggunaan energi terbarukan dan kelestarian lingkungan**, terutama dalam sektor kelautan, perairan, dan daratan. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi bagi sektor-sektor yang bergantung pada hasil laut dan pertanian. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam **kegiatan berbasis lingkungan**, seperti budidaya tanaman organik dan optimalisasi lahan untuk pangan alternatif, menunjukkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Terakhir, variabel ini juga mengukur efektivitas **program pemerintah dalam mendukung kemandirian pangan**, termasuk kebijakan strategis seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)** yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Program ini menjadi cerminan dari peran pemerintah dalam menciptakan sistem pangan yang inklusif,

efektif, dan transparan. Oleh karena itu, analisis terhadap variabel **X1** tidak hanya menyoroti kondisi ketahanan pangan saat ini, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kebijakan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi berbasis pangan di masa depan.

Analisis Hasil Data Responden: Signifikansi, Variabilitas, dan Proporsi Penilaian Rendah

Hasil data yang diperoleh dari responden diuji menggunakan beberapa parameter penting untuk menentukan validitas dan makna dari skor yang diberikan. Salah satu pengujian utama adalah **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)**, yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil rata-rata **Pengukuran Persepsi dan Akseptabilitas (PPA)** masuk dalam kategori signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata PPA dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)** yang telah ditetapkan. Untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, SAS ditentukan sebesar **6,5**, yang dihitung dengan **mark-up 20% dari nilai tengah skala**. Jika hasil rata-rata PPA lebih tinggi dari SAS, maka dapat disimpulkan bahwa skor yang diperoleh cukup signifikan dan mencerminkan persepsi masyarakat yang positif terhadap isu yang diukur.

Selain SSP, analisis juga memperhitungkan **Standar Deviasi (SD)** untuk memahami tingkat variasi skor yang diberikan oleh responden. Dalam skala 9, definisi **signifikansi SD (SAS SD)** adalah apabila SD berada dalam rentang **1,0 hingga 2,0**. Jika SD berada dalam rentang ini, maka dapat dikatakan bahwa skor responden memiliki variasi yang wajar, mencerminkan persepsi yang relatif stabil di antara kelompok responden. SD yang terlalu rendah (<1,0) menunjukkan tingkat keseragaman yang tinggi dalam penilaian, sementara SD yang tinggi (>2,0) mengindikasikan adanya perbedaan tajam dalam persepsi masyarakat terhadap isu yang diuji.

Parameter ketiga yang diuji adalah **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)**, yang menunjukkan jumlah responden yang memberikan skor **1, 2, atau 3** dalam skala 9 pada kuesioner **X(i.3) atau Akseptabilitas**. PRMR digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar tingkat ketidakpuasan atau ketidakterimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau kondisi sosial tertentu. Batas toleransi PRMR ditetapkan **maksimal 10%**. Jika PRMR berada di bawah batas ini, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi dan akseptabilitas yang cukup baik. Namun, jika PRMR melebihi batas 10%, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab tingginya ketidakpuasan masyarakat.

Dengan menggunakan ketiga parameter ini, analisis hasil survei menjadi lebih komprehensif dan berbasis data. Jika hasil menunjukkan bahwa **SSP berada di atas SAS, SD dalam rentang 1,0–2,0, dan PRMR di bawah 10%**, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran menunjukkan tingkat persepsi dan akseptabilitas yang stabil serta representatif terhadap kondisi yang diukur. Namun, jika salah satu atau lebih indikator menunjukkan hasil yang tidak ideal, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi di dalam masyarakat.

Pendekatan berbasis **SAS, SD, dan PRMR** ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil survei tidak hanya menampilkan angka-angka statistik, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola pikir dan respons masyarakat. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas layanan, program, atau kebijakan publik yang sedang diimplementasikan.

	Variabel X1(15,0%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3
1	8	9	8
2	8	8	8
3	7	8	7
4	8	8	8
5	7	9	7
6	2	4	4
4453	5	5	5
4454	8	7	6
4455	7	7	7
4456	3	4	4
4457	7	9	5
4458	6	6	6
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,32	6,66	6,28
StanDev	2,09	2,01	2,00
Skor Var Xi	6,44		

Data Responden Untuk Variabel X1

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,32; 6,66; 5,28 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,09; 2,01; 2,00 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 498/4460 = 11,7% (maks 10%)
5. Skor Variabel X1=6,44 (kategori moderat)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X1 masih menunjukan nilai yang moderat. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.10 : Data Resume Skor PPA Variabel X1

Variabel X1 dalam kajian ini dianalisis berdasarkan jumlah **4.460 responden**, yang jauh melebihi standar minimum Wellbeing Methodology (WM) yaitu 1.250 responden. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat representasi yang sangat baik. Skor Skala Persepsi Publik (SSP PPA) tercatat sebesar **6,32; 6,66; dan 5,28**, dengan nilai rerata yang mendekati **SAS (Standar Acuan Signifikansi) sebesar 6,5**. Ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap variabel ini berada dalam kategori yang masih bisa ditoleransi, namun terdapat variasi yang cukup mencolok antar subdimensi atau wilayah.

Dari segi sebaran data, **standar deviasi** PPA menunjukkan angka **2,09; 2,01; dan 2,00**, masih dalam kisaran **SAS 1,0–2,0** yang dianggap wajar menurut kerangka WM. Namun, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** tercatat **11,7%**, yang melebihi batas maksimal SAS sebesar 10%. Hal ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang cukup signifikan menilai variabel X1 secara negatif, yang bisa menjadi indikasi adanya ketimpangan pengalaman atau ketidakpuasan yang perlu ditelusuri lebih lanjut secara kontekstual.

Secara umum, **skor akhir variabel X1 adalah 6,44**, yang termasuk dalam **kategori moderat**. Ini mencerminkan bahwa persepsi masyarakat terhadap isu yang diukur oleh variabel X1 belum sepenuhnya positif dan masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, hasil ini perlu dikaji lebih lanjut melalui **observasi lapangan sepanjang tahun 2025** untuk memverifikasi data persepsi dengan bukti-bukti faktual, sekaligus menyiapkan intervensi kebijakan atau program yang berbasis pada data tersebut.

3.4.2 Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Ketersediaan Pekerjaan** yang mudah didapat sesuai dengan Keahlian.
2. **Dukungan terhadap Wirausaha dan UMKM** dengan kemudahan usaha termasuk akses permodalan

3. **Pelatihan dan Pengembangan** Keterampilan ekonomi kreatif, inovatif menuju ekonomi digital
4. **Mendorong Ekonomi** padat karya dan Pengembangan Produk Lokal yang diterima masyarakat
5. **Dampak Positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Analisis Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Variabel **Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan (X2)** merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, dengan bobot **15%** dalam indeks yang diukur. Variabel ini mencerminkan sejauh mana peluang kerja tersedia, dukungan terhadap pelaku usaha, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi, terutama di era digital. Indikator-indikator dalam variabel ini mencakup aspek **akses terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan**.

Salah satu indikator utama dalam variabel ini adalah **ketersediaan pekerjaan yang mudah didapat sesuai dengan keahlian**. Artinya, masyarakat yang mencari pekerjaan harus memiliki akses yang memadai terhadap peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan mereka. Jika akses terhadap pekerjaan yang relevan sulit ditemukan, maka tingkat pengangguran akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pasar tenaga kerja tetap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang.

Selain itu, indikator **dukungan terhadap wirausaha dan UMKM dengan kemudahan usaha termasuk akses permodalan** juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Ketersediaan modal, regulasi yang mendukung, serta akses terhadap pasar adalah elemen utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Jika pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam mendapatkan modal atau kesulitan dalam mengembangkan usahanya, maka pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Oleh karena itu, program pemerintah seperti bantuan modal usaha, pelatihan bisnis, serta kebijakan yang ramah terhadap UMKM sangat diperlukan untuk memastikan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Indikator lainnya dalam variabel ini adalah **pelatihan dan pengembangan keterampilan ekonomi kreatif dan inovatif menuju ekonomi digital**. Di era globalisasi dan transformasi digital, penting bagi tenaga kerja dan pelaku usaha untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Pelatihan keterampilan digital, e-commerce, serta inovasi berbasis teknologi menjadi kebutuhan utama agar masyarakat dapat bersaing di pasar kerja dan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Tanpa penguatan keterampilan ini, banyak masyarakat yang akan tertinggal dalam persaingan ekonomi modern.

Selain itu, **mendorong ekonomi padat karya dan pengembangan produk lokal yang diterima masyarakat** juga menjadi indikator yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Sektor padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif perlu terus dikembangkan dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang mendukung. Pengembangan produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi di

pasar domestik maupun internasional akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Terakhir, **dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat** menjadi ukuran akhir dari efektivitas berbagai indikator dalam variabel ini. Jika ketersediaan pekerjaan meningkat, wirausaha berkembang, dan keterampilan tenaga kerja terus diperbarui, maka dampak akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ketenagakerjaan dan kewirausahaan harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

	Variabel X2 (15,0%)		
No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3
1	8	9	9
2	8	8	8
3	7	7	7
4	8	8	8
5	8	8	8
6	2	4	4
4453	7	8	7
4454	8	7	5
4455	8	8	7
4456	5	5	5
4457	6	8	7
4458	5	5	6
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,30	6,57	6,28
StanDev	2,04	2,04	1,97
Skor Var Xi	6,40		

Data Responden Untuk Variabel X2

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,30; 6,57; 6,28 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,04; 2,04; 1,97 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 498/4460 = 11,7% (maks 10%)
5. Skor Variabel X2=6,40 (kategori moderat)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X2 masih menunjukan nilai moderat. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.11 : Data Resume Skor PPA Variabel X2

Variabel X2 dianalisis berdasarkan jumlah responden sebanyak **4.460 orang**, jauh melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan oleh Wellbeing Methodology (WM), yaitu 1.250 responden. Partisipasi tinggi ini memberikan kekuatan statistik dan representasi yang memadai untuk menyimpulkan kondisi persepsi publik. Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** tercatat sebesar **6,30; 6,57; dan 6,28**, yang secara umum mendekati **Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 6,5**. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap dimensi yang diukur oleh variabel X2 relatif cukup baik, namun belum mencapai tingkat optimal dan konsisten di seluruh subdimensi.

Dari segi keragaman persepsi, **standar deviasi PPA** tercatat sebesar **2,04; 2,04; dan 1,97**, masih dalam rentang toleransi yang dianggap signifikan menurut **SAS 1,0–2,0**. Namun demikian, terdapat **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** sebesar **11,7%**, yang melampaui ambang batas maksimum 10% yang ditetapkan sebagai batas kewaspadaan. Ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak terlibat secara memadai dalam aspek yang diukur oleh variabel X2, yang perlu ditindaklanjuti dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, **skor akhir variabel X2 adalah 6,40**, yang diklasifikasikan dalam kategori **moderat**. Hal ini menandakan bahwa meskipun persepsi publik relatif positif, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan kualitas partisipasi dan penerimaan

masyarakat secara merata. Oleh karena itu, hasil ini perlu dibandingkan dan divalidasi lebih lanjut melalui **observasi lapangan sepanjang tahun 2025** untuk memastikan bahwa persepsi publik benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan, serta menjadi acuan untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.

3.4.3 Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Penghormatan terhadap Perbedaan Agama**, Agama, Tradisi dan Hak Asasi Manusia termasuk kepada kaum minoritas.
2. **Interaksi Sosial yang Damai dan Gotong Royong**
3. **Penyelesaian Konflik melalui Dialog dan Musyawarah** melibatkan tokoh dan pimpinan Masyarakat.
4. Dukungan terhadap **Kegiatan Sosial dan Budaya** Bersama di masyarakat
5. **Kebijakan Pemerintah** yang Mendukung **Harmoni Sosial** secara efektif dan transparan.

Harmoni sosial dalam masyarakat merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kesejahteraan bersama. Variabel ini mengukur sejauh mana nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan resolusi konflik diterapkan dalam kehidupan sosial. Penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama dalam menciptakan keharmonisan. Masyarakat yang dapat menerima dan menghormati perbedaan tanpa diskriminasi cenderung lebih inklusif dan mampu membangun lingkungan sosial yang lebih damai. Penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas juga mencerminkan tingkat kematangan sosial serta keberhasilan dalam membangun toleransi yang kuat.

Selain itu, interaksi sosial yang damai dan semangat gotong royong merupakan pilar utama dalam memperkuat solidaritas antarwarga. Masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial akan lebih mudah mengatasi berbagai tantangan, baik dalam aspek ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Nilai gotong royong ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga menjadi mekanisme efektif dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah dinamika kehidupan modern. Ketika masyarakat aktif dalam interaksi yang konstruktif dan saling mendukung, maka potensi konflik dapat diminimalisir secara alami.

Namun, dalam realitas sosial, konflik tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin lokal. Proses ini memungkinkan munculnya solusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Ketika masyarakat terbiasa dengan pola penyelesaian yang mengutamakan komunikasi dan mufakat, maka risiko perpecahan dan polarisasi sosial dapat ditekan.

Selain resolusi konflik, dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya bersama juga menjadi faktor penting dalam menjaga harmoni sosial. Partisipasi masyarakat dalam acara budaya, bakti sosial, dan perayaan lintas agama berperan sebagai media interaksi yang efektif dalam membangun kedekatan emosional. Kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya menciptakan ruang perjumpaan yang positif tetapi juga memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif yang inklusif, semakin kuat pula ikatan sosial yang terjalin di antara mereka.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam mendukung harmoni sosial juga tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang bersifat inklusif dan transparan menjadi kunci dalam memastikan bahwa masyarakat merasa diakomodasi dalam kebijakan publik. Regulasi yang mendorong toleransi, perlindungan hak-hak kelompok minoritas, serta kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan sosial harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, harmoni sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk penghormatan terhadap perbedaan, interaksi sosial yang sehat, mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta dukungan kebijakan pemerintah yang progresif. Dengan memastikan bahwa semua elemen ini berjalan secara sinergis, masyarakat dapat mencapai kondisi yang lebih stabil dan sejahtera di tengah keberagaman yang ada.

	Variabel X3 (11,5%)		
No. Responden	X3.1	X3.2	X3.3
1	9	8	8
2	8	8	8
3	7	7	7
4	8	8	8
5	8	8	8
6	1	1	3
4453	8	8	8
4454	9	2	5
4455	8	8	8
4456	5	5	4
4457	6	8	7
4458	6	6	6
4459	7	7	7
4460	8	7	8
Skor PPA Var.	6,58	6,79	6,58
StanDev	2,06	1,98	1,93
Skor Var Xi	6,66		

Data Responden Untuk Variabel X3

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,58; 6,79; 6,58 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,06; 1,98; 1,93 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 419/4460 = 9,4 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X3=6,66 (kategori Bbaik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X3 masih menunjukan nilai yang baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.12 : Data Resume Skor PPA Variabel X3

Variabel X3 dinilai berdasarkan **4460 responden**, jauh melebihi standar minimum Wellbeing Methodology (WM) yaitu 1.250 responden, yang menunjukkan validitas dan kekuatan representasi data yang tinggi. Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian – Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** untuk variabel ini adalah **6,58; 6,79; dan 6,58**, yang seluruhnya **melebihi Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 6,5**. Artinya, dimensi yang

diukur dalam variabel X3 secara umum dinilai positif oleh publik, baik dari sisi persepsi, partisipasi, maupun akseptabilitas terhadap isu atau program yang dimaksud.

Dari sisi keragaman persepsi, nilai **standar deviasi PPA** tercatat **2,06; 1,98; dan 1,93**, yang secara umum masih berada dalam batas **SAS 1,0–2,0**, menunjukkan tingkat variasi penilaian yang wajar antarresponden. Sementara itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** tercatat sebesar **9,4%**, masih di bawah batas maksimum 10%. Hal ini menandakan bahwa kelompok masyarakat yang menilai buruk relatif kecil dan tidak dominan, meskipun tetap perlu diperhatikan agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, **skor akhir variabel X3 adalah 6,66**, yang termasuk dalam kategori **baik**. Nilai ini mencerminkan tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat yang relatif tinggi dalam konteks dimensi yang diukur. Meskipun hasilnya cukup memuaskan, **verifikasi melalui observasi lapangan sepanjang tahun 2025 tetap diperlukan** untuk memastikan konsistensi antara persepsi publik dan kondisi faktual, serta mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang masih relevan secara lokal maupun sektoral.

3.4.4 Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Kesetaraan dan Kepemimpinan Perempuan di masyarakat**
2. **Pemberdayaan Pemuda yang aktif** dalam Pembangunan dan Pelestarian Budaya
3. **Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Marginal** yang diterima dan memiliki akses keterampilan.
4. **Dukungan untuk Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan pemuda, Perempuan dan komunitas marjinal termasuk difabel.**
5. **Dukungan Pemerintah dan Partisipasi Positif** Masyarakat bagi pemuda, Perempuan dan komunitas marjinal termasuk difabel.

Variabel ini mencerminkan aspek penting dalam inklusivitas sosial dan pemberdayaan kelompok yang sering kali menghadapi tantangan dalam partisipasi aktif di masyarakat. Kesetaraan dan kepemimpinan perempuan menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun dalam lingkup yang lebih luas. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan bukan hanya menjadi tolok ukur keadilan gender, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, pemberdayaan pemuda menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemuda yang aktif dalam pembangunan dan pelestarian budaya akan menjadi agen perubahan yang mampu menjaga identitas dan keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal. Dengan dukungan yang tepat, pemuda dapat berkontribusi dalam inovasi, kewirausahaan, dan transformasi sosial yang positif. Oleh karena itu, penyediaan akses terhadap pendidikan,

pelatihan, dan ruang partisipasi bagi pemuda menjadi faktor utama dalam mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Indikator lain dalam variabel ini adalah inklusi dan pemberdayaan kelompok marginal. Kelompok-kelompok ini, yang mencakup masyarakat miskin, minoritas, dan difabel, sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Dengan adanya program pemberdayaan yang efektif, kelompok marginal dapat memiliki keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

Dukungan terhadap pengembangan potensi kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas marginal menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program yang mendorong pemberdayaan berbasis komunitas, termasuk pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, serta kebijakan yang mendukung partisipasi mereka dalam sektor ekonomi dan sosial, menjadi kunci dalam memperkuat posisi kelompok-kelompok ini dalam masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan dalam aspek ini juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok ini harus disertai dengan pelaksanaan yang efektif serta partisipasi masyarakat yang mendukung keberlanjutan inisiatif tersebut. Masyarakat yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh sikap sosial yang menerima dan mendukung keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, variabel ini menekankan pentingnya keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan sebagai pilar dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dengan memastikan bahwa perempuan, pemuda, kelompok marginal, dan difabel memiliki akses yang setara terhadap peluang, maka masyarakat akan lebih mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dengan lebih solid dan berkelanjutan.

	Variabel X4 (11,5%)		
No. Responden	X4.1	X4.2	X4.3
1	8	7	8
2	8	8	8
3	7	7	7
4	9	9	9
5	7	8	7
6	4	2	3
4453	7	7	7
4454	1	8	7
4455	8	8	7
4456	4	5	4
4457	7	7	7
4458	6	7	7
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,42	6,64	6,46
StanDev	1,98	1,91	1,90
Skor Var Xi	6,52		

Data Responden Untuk Variabel X4

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,42; 6,64; 6,46 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 1,98; 1,91; 1,90 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 424/4460 = 9,5 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X4=6,52 (kategori baik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X4 masih menunjukan nilai baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.13 : Data Resume Skor PPA Variabel X4

Penilaian terhadap **Variabel X4** diperoleh dari **4.460 responden**, melebihi ambang batas minimum **1.250 responden** sebagaimana ditetapkan dalam Standar Wellbeing Methodology (WM). Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** berada pada angka **6,42; 6,64; dan 6,46**. Ketiga nilai tersebut berada sangat dekat dengan atau sedikit melebihi **Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 6,5**, menunjukkan bahwa publik memiliki persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas yang relatif positif terhadap dimensi yang diukur oleh variabel ini.

Dari sisi konsistensi penilaian, **standar deviasi PPA** untuk ketiga aspek adalah **1,98; 1,91; dan 1,90**, yang masih berada dalam batas toleransi **SAS 1,0–2,0**. Ini menunjukkan bahwa variasi penilaian antarresponden tergolong moderat dan dapat diterima. Selain itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** tercatat sebesar **9,5%**, yang masih di bawah ambang maksimum 10%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan penilaian yang cukup baik, meskipun terdapat segmen kecil yang masih menunjukkan ketidakpuasan.

Dengan **skor akhir variabel X4 sebesar 6,52**, maka variabel ini dikategorikan dalam kelompok **baik**. Artinya, aspek yang diukur oleh variabel ini telah mendapat apresiasi positif dari masyarakat secara umum. Meskipun demikian, **perlu dilakukan validasi melalui observasi lapangan sepanjang tahun 2025** untuk memastikan apakah persepsi yang ditangkap melalui survei ini konsisten dengan kondisi faktual di masyarakat, serta untuk menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

3.4.5 Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Aktivitas Budaya** dalam Kehidupan Sehari-hari termasuk dalam penggunaan Bahasa daerah
2. **Kearifan Lokal** melalui Pelestarian Seni, Kerajinan, Budaya, dan Festival Lokal
3. **Keterlibatan Generasi Muda dan Pendidikan** Budaya melalui Pendidikan dan pelatihan.
4. **Perlindungan Warisan Budaya d**an Penghormatan kepada Tokoh Adat Budaya
5. **Dukungan Pemerintah** untuk Pelestarian Seni & Budaya secara efektif dan transparan.

Variabel ini mencerminkan pentingnya budaya dalam kehidupan masyarakat serta upaya pelestariannya dalam berbagai aspek. Aktivitas budaya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan bahasa daerah, menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga identitas kultural. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan intelektual yang merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah suatu komunitas. Penggunaan bahasa daerah yang terus dilestarikan di tengah arus globalisasi menjadi bentuk ketahanan budaya yang perlu didukung dan dijaga.

Selain itu, kearifan lokal melalui pelestarian seni, kerajinan, budaya, dan festival lokal menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas masyarakat. Seni dan kerajinan tradisional

tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Festival budaya yang rutin diadakan dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dan wisatawan, sekaligus memperkuat kebanggaan akan warisan leluhur. Dengan adanya dukungan yang konsisten, kearifan lokal dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Keterlibatan generasi muda dalam pendidikan dan pelatihan budaya juga menjadi aspek yang krusial. Pendidikan budaya tidak hanya terbatas pada pengajaran di sekolah, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, sanggar seni, dan komunitas budaya. Ketika generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai budaya mereka, maka keberlanjutan tradisi dapat lebih terjamin. Mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya akan menciptakan regenerasi yang kuat, sehingga budaya tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi.

Perlindungan terhadap warisan budaya dan penghormatan kepada tokoh adat juga menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Warisan budaya, baik yang bersifat fisik seperti bangunan bersejarah maupun yang bersifat non-fisik seperti ritual dan tradisi lisan, perlu mendapat perlindungan dari ancaman kepunahan. Penghormatan kepada tokoh adat dan budaya juga memiliki peran strategis, karena mereka adalah penjaga nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan mereka sebagai pemimpin adat menjadi sumber referensi dalam menjaga norma-norma budaya yang masih relevan hingga saat ini.

Dukungan pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya secara efektif dan transparan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program-program kebudayaan. Kebijakan yang mendukung pelestarian budaya harus memiliki landasan yang kuat serta implementasi yang jelas, mulai dari pemberian dana bagi komunitas seni hingga regulasi yang melindungi warisan budaya dari eksploitasi atau kepunahan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program budaya juga penting untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, variabel ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas adat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Dengan adanya kesadaran kolektif akan nilai budaya, maka warisan kultural dapat terus lestari dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan identitas nasional.

	Variabel X5 (11,0%)		
No. Responden	X5.1	X5.2	X5.3
1	8	8	8
2	9	8	8
3	7	7	7
4	8	8	8
5	8	8	8
6	3	4	3
4453	7	7	7
4454	5	5	7
4455	8	8	8
4456	5	5	5
4457	8	8	9
4458	5	6	6
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,48	6,68	6,48
StanDev	2,02	1,96	1,94
Skor Var Xi	6,56		

Data Responden Untuk Variabel X5

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,48; 6,68; 6,48 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,02; 1,96; 1,94 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 375/4460 = 8,4 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X5=6,56 (kategori baik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X5 masih menunjukan nilai baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.14 : Data Resume Skor PPA Variabel X5

Penilaian terhadap **Variabel X5** didasarkan pada hasil survei terhadap **4.460 responden**, jauh melampaui batas minimum **1.250 responden** sesuai standar Wellbeing Methodology (WM). Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** tercatat pada angka **6,48; 6,68; dan 6,48**. Dua dari tiga nilai ini mendekati atau tepat di bawah **Standar Acuan Signifikansi (SAS) 6,5**, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aspek ini secara umum berada dalam zona positif dan dapat dikategorikan sebagai baik.

Standar deviasi PPA untuk ketiga aspek tercatat sebesar **2,02; 1,96; dan 1,94**, seluruhnya masih dalam rentang **SAS 1,0–2,0**, yang menandakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan responden cukup terkendali dan konsisten. Sementara itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** hanya **8,4%**, yang berada di bawah ambang batas maksimum 10%. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang relatif tinggi terhadap aspek yang diukur oleh variabel ini, mencerminkan penerimaan dan partisipasi yang cukup kuat dari publik.

Dengan **skor akhir variabel X5 sebesar 6,56**, maka variabel ini masuk dalam kategori **baik**. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai aspek yang diwakili oleh variabel X5 secara positif. Namun demikian, **diperlukan verifikasi lapangan sepanjang tahun 2025** untuk melihat kesesuaian antara data persepsi dengan kondisi nyata di masyarakat. Hasil observasi ini akan penting untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan akurasi dalam perencanaan pembangunan sosial ke depan.

3.4.6 Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya,11%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aktivitas Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari termasuk dalam penggunaan Bahasa daerah

2. Kearifan Lokal melalui Pelestarian Seni, Kerajinan, Budaya, dan Festival Lokal
3. Keterlibatan Generasi Muda dan Pendidikan Budaya melalui Pendidikan dan pelatihan.
4. Perlindungan Warisan Budaya dan Penghormatan kepada Tokoh Adat Budaya
5. Dukungan Pemerintah untuk Pelestarian Seni & Budaya secara efektif dan transparan.

Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya (11%)

Variabel X6 menyoroti pentingnya menjaga dan memperkuat keberagaman budaya dalam masyarakat melalui berbagai bentuk akulturasi dan pelestarian nilai-nilai budaya. Akulturasi merupakan proses di mana berbagai budaya bertemu, berinteraksi, dan saling memengaruhi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dalam konteks ini, penguatan akulturasi tidak hanya mendorong harmoni sosial, tetapi juga memastikan bahwa tradisi dan budaya tetap relevan di tengah perubahan zaman. Variabel ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mengadopsi praktik budaya yang beragam serta bagaimana budaya lokal dipertahankan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu indikator utama dalam variabel ini adalah **aktivitas budaya dalam kehidupan sehari-hari**, termasuk dalam penggunaan bahasa daerah. Bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya, dan keberlanjutannya menjadi ukuran seberapa kuat nilai-nilai budaya diwariskan ke generasi berikutnya. Masyarakat yang aktif menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga warisan budaya. Selain itu, aktivitas budaya lainnya seperti kesenian tradisional, ritual adat, dan kuliner lokal juga menjadi bagian dari identitas yang perlu dipertahankan.

Indikator kedua dalam variabel ini adalah **kearifan lokal melalui pelestarian seni, kerajinan, budaya, dan festival lokal**. Seni dan kerajinan tradisional merupakan ekspresi budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga mengandung nilai historis dan filosofis yang mendalam. Festival budaya yang diselenggarakan secara rutin menjadi salah satu cara efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan warisan budaya kepada masyarakat luas. Kegiatan semacam ini juga dapat meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang semakin heterogen.

Keterlibatan generasi muda dan pendidikan budaya juga menjadi aspek penting dalam penguatan akulturasi budaya. Generasi muda memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan budaya, sehingga pendidikan dan pelatihan mengenai sejarah, seni, dan adat istiadat menjadi sangat krusial. Upaya untuk melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan budaya akan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tidak tergerus oleh modernisasi. Pendidikan budaya yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah atau melalui kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya.

Selain itu, **perlindungan warisan budaya dan penghormatan kepada tokoh adat budaya** merupakan elemen fundamental dalam menjaga keberagaman budaya. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang memastikan bahwa situs-situs budaya, benda cagar

budaya, serta praktik-praktik adat tetap dilestarikan. Selain itu, peran tokoh adat dan pemimpin budaya juga perlu mendapatkan penghormatan dan pengakuan, mengingat mereka adalah penjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas komunitas.

Dukungan dari pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan pelestarian budaya yang berkelanjutan. **Dukungan pemerintah untuk pelestarian seni dan budaya secara efektif dan transparan** mencakup kebijakan afirmatif, alokasi anggaran untuk program budaya, serta fasilitasi bagi komunitas budaya untuk terus berkembang. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan kebijakan yang inklusif dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya untuk sektor budaya juga penting untuk memastikan bahwa program-program pelestarian budaya berjalan dengan optimal.

Secara keseluruhan, variabel X6 menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan generasi muda dalam memperkuat akulturasi dan keberagaman budaya. Keberhasilan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal tidak hanya akan memperkuat identitas nasional tetapi juga meningkatkan toleransi serta pemahaman antarbudaya. Dengan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan berkembang, maka keberagaman yang dimiliki suatu bangsa dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun keharmonisan masyarakat di masa depan.

	Variabel X6 (11,0%)		
No. Responden	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	8
2	9	9	9
3	7	7	7
4	8	8	8
5	8	8	8
6	1	4	4
4453	7	7	7
4454	5	9	3
4455	8	8	8
4456	4	5	4
4457	7	7	7
4458	5	6	5
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,46	6,62	6,48
StanDev	2,01	1,96	1,93
Skor Var Xi	6,53		

Data Responden Untuk Variabel X6

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,46; 6,62; 6,48 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,01; 1,96; 1,93 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 423/4460 = 9,5 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X6=6,53 (kategori baik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X6 masih menunjukan nilai baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.15 : Data Resume Skor PPA Variabel X6

Berdasarkan data survei terhadap **4.460 responden**, hasil penilaian **Variabel X6** menunjukkan capaian yang masuk dalam kategori **baik**. Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** tercatat pada angka **6,46; 6,62; dan 6,48**, yang secara umum mendekati dan melampaui ambang batas **Standar Acuan Signifikansi (SAS) 6,5**. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi dan tingkat partisipasi yang cukup tinggi terhadap isu yang diukur dalam variabel ini.

Dari sisi **distribusi persepsi**, **standar deviasi PPA** berada pada angka **2,01; 1,96; dan 1,93**, yang masih berada dalam rentang signifikansi yang wajar menurut **SAS 1,0–2,0**. Artinya,

variasi pendapat antar responden tidak terlalu menyimpang dan cenderung merata. Sementara itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** hanya **9,5%**, masih di bawah batas maksimal 10%, yang mengindikasikan tingkat kepuasan atau penerimaan publik relatif tinggi terhadap dimensi yang dinilai.

Dengan **skor total variabel X6 sebesar 6,53**, maka variabel ini dikategorikan dalam tingkat **baik**. Meskipun demikian, penting untuk melakukan **verifikasi lebih lanjut melalui observasi lapangan sepanjang tahun 2025** guna melihat apakah persepsi masyarakat yang positif ini selaras dengan kondisi dan praktik nyata. Observasi tersebut akan menjadi kunci dalam mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan atau dipertahankan secara konsisten ke depan.

3.4.7 Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Aktivitas Budaya** dalam Kehidupan Sehari-hari termasuk dalam penggunaan Bahasa daerah
2. **Kearifan Lokal** melalui Pelestarian Seni, Kerajinan, Budaya, dan Festival Lokal
3. **Keterlibatan Generasi Muda dan Pendidikan** Budaya melalui Pendidikan dan pelatihan.
4. **Perlindungan Warisan Budaya d**an Penghormatan kepada Tokoh Adat Budaya
5. **Dukungan Pemerintah** untuk Pelestarian Seni & Budaya secara efektif dan transparan.

Variabel ini menggambarkan bagaimana budaya terus berkembang dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas suatu komunitas. Aktivitas budaya yang dilakukan sehari-hari, termasuk penggunaan bahasa daerah, mencerminkan sejauh mana budaya tetap hidup dalam interaksi sosial.

Selain itu, pelestarian seni, kerajinan, dan festival lokal menjadi cerminan dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif.

Keterlibatan generasi muda dalam pendidikan dan pelatihan berbasis budaya menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan warisan budaya. Ketika anak muda memiliki kesadaran dan pemahaman yang kuat terhadap akar budaya mereka, pelestarian budaya akan semakin berkelanjutan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap lestari di tengah perubahan zaman. Penghormatan kepada tokoh adat dan pemangku budaya juga mencerminkan penghargaan terhadap mereka yang telah berkontribusi dalam menjaga warisan tersebut.

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, dan transparansi dalam pengelolaan program pelestarian seni dan budaya menjadi elemen penting dalam menjaga keberagaman budaya. Dengan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, penguatan akulturasi dan keberagaman budaya dapat terus terjaga dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat.

	Variabel X7 (12,5%)		
No. Responden	X7.1	X7.2	X7.3
1	9	9	9
2	9	9	9
3	7	7	7
4	8	8	8
5	8	8	8
6	2	3	4
4453	7	8	7
4454	3	1	8
4455	9	9	9
4456	4	5	4
4457	7	7	7
4458	6	5	7
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,69	6,84	6,74
StanDev	2,17	2,07	2,01
Skor Var Xi	6,77		

Data Responden Untuk Variabel X7

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,69; 6.84; 6,74 (signifikan SAS 6,5)
3. Standar Deviasi PPA: 2,17; 2,07; 2,01 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 86/4460 = 9,7 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X7=6,77 (kategori baik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X7 masih menunjukan nilai yang baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.16: Data Resume Skor PPA Variabel X7

Berdasarkan hasil survei terhadap **4.460 responden**, **Variabel X7** memperoleh hasil yang termasuk dalam **kategori baik**. Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** berada pada angka **6,69; 6,84; dan 6,74**, yang secara konsisten **melampaui Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 6,5**. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas publik terhadap isu yang diwakili oleh variabel ini berada pada tingkat yang sangat positif.

Dari segi **penyebaran pendapat**, **standar deviasi PPA** tercatat pada nilai **2,17; 2,07; dan 2,01**, sedikit berada di atas batas atas SAS (maksimum 2,0), namun masih dalam batas toleransi untuk variasi opini masyarakat dalam studi skala besar. Sementara itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** sebesar **9,7%**, masih berada di bawah ambang batas maksimal 10%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan yang cukup baik terhadap aspek ini.

Dengan **skor rata-rata variabel X7 sebesar 6,77**, variabel ini menempati posisi yang kuat dalam kategori **baik**, bahkan mendekati kategori sangat baik. Walaupun demikian, untuk memastikan konsistensi hasil ini, perlu dilakukan **observasi lapangan secara berkala sepanjang tahun 2025**. Langkah ini penting untuk mencocokkan data persepsi dengan kenyataan di lapangan, dan memastikan bahwa kebijakan atau program yang mendasari variabel ini terus berjalan sesuai harapan publik.

3.4.8 Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%

Variabel ini dimaknai dan diinterpretasikan dalam beberapa Indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Aktivitas Budaya** dalam Kehidupan Sehari-hari termasuk dalam penggunaan Bahasa daerah
2. **Kearifan Lokal** melalui Pelestarian Seni, Kerajinan, Budaya, dan Festival Lokal
3. **Keterlibatan Generasi Muda dan Pendidikan** Budaya melalui Pendidikan dan pelatihan.
4. **Perlindungan Warisan Budaya d**an Penghormatan kepada Tokoh Adat Budaya
5. **Dukungan Pemerintah** untuk Pelestarian Seni & Budaya secara efektif dan transparan.

Variabel ini mencerminkan dinamika keberagaman budaya dan proses akulturasi dalam kehidupan masyarakat. Budaya hadir dalam keseharian melalui penggunaan bahasa daerah yang tetap lestari sebagai identitas lokal. Kearifan lokal terwujud dalam pelestarian seni, kerajinan, budaya, dan penyelenggaraan festival yang memperkuat kebersamaan dalam komunitas.

Generasi muda memiliki peran penting dalam keberlanjutan budaya melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan pemahaman serta keterlibatan aktif dalam menjaga warisan leluhur. Selain itu, perlindungan terhadap warisan budaya dan penghormatan kepada tokoh adat menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Dukungan pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya turut berperan dalam memastikan keberlanjutan tradisi secara efektif dan transparan. Melalui kebijakan, program, serta fasilitasi yang tepat, pelestarian budaya dapat semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya terus berkembang dan tetap relevan di tengah perubahan zaman.

	Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X8.1	X8.2	8.3
1	9	8	8
2	9	9	9
3	7	7	7
4	9	9	9
5	8	8	8
6	1	2	2
4453	7	7	8
4454	6	3	8
4455	9	9	8
4456	5	5	4
4457	8	8	8
4458	6	5	5
4459	7	7	7
4460	8	8	8
Skor PPA Var.	6,71	6,84	6,74
StanDev	2,14	2,05	1,99
Skor Var Xi	6,77		

Data Responden Untuk Variabel X8

1. Jumlah Responden 4460 (Standar WM min.1250)
2. SSP PPA: 6,71; 6,84; 6,74 (signifikan SAS 6,0)
3. Standar Deviasi PPA: 2,14; 2,05; 1,99 (signifikan SAS 1,0-2,0).
4. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) : 413/4460 = 9,3 % (maks 10%)
5. Skor Variabel X8=6,77 (kategori baik)

Secara umum Hasil Penilaian Variabel X8 masih menunjukan nilai yang baik. Hasil ini perlu dibandingkan dengan observasi lapangan sepanjang tahun 2025

Gambar 3.17 : Data Resume Skor PPA Variabel X8

Berdasarkan data yang dihimpun dari **4.460 responden**, **Variabel X8** menunjukkan hasil yang tergolong **baik**, baik dari sisi persepsi publik, partisipasi, maupun tingkat akseptabilitasnya. Nilai **SSP PPA (Signifikansi Skor Penilaian untuk Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas)** berada pada angka **6,71; 6,84; dan 6,74**, yang secara konsisten **melebihi SAS (Standar Acuan Signifikansi) sebesar 6,0**, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memperoleh penerimaan publik yang cukup kuat.

Dari sisi distribusi penilaian, **standar deviasi PPA** berkisar antara **1,99 hingga 2,14**, yang masih berada dalam rentang **signifikan SAS sebesar 1,0–2,0**. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini relatif seragam dan tidak menyimpang secara ekstrem. Sementara itu, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** sebesar **9,3%** tetap berada di bawah ambang batas toleransi 10%, yang berarti bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif.

Dengan **skor rata-rata variabel X8 sebesar 6,77**, maka variabel ini secara kuantitatif dapat dikategorikan **baik**, setara dengan beberapa variabel lain yang juga menonjol dalam penilaian publik. Untuk memperkuat kesimpulan ini, tetap disarankan dilakukan **verifikasi melalui observasi lapangan sepanjang tahun 2025**, sehingga dapat dikonfirmasi apakah skor persepsi tersebut mencerminkan kondisi faktual yang terjadi dalam masyarakat.

BAB IV HASIL DAN TEMUAN

Hasil Kajian IHaI 2025 dan Analisisnya

Kajian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memahami dan mengukur tingkat harmoni sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis Wellbeing Methodology (WM), kajian ini mengintegrasikan berbagai sumber data, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Pendekatan dan Metodologi

Kajian ini melibatkan survei publik yang dilakukan secara daring dengan jumlah responden yang melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) guna melengkapi data kuantitatif dengan perspektif kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif serta pemetaan geospasial untuk memahami pola sebaran harmoni sosial di berbagai wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial dianalisis guna mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam meningkatkan stabilitas sosial.

Temuan Utama

Hasil kajian ini mengungkap sejumlah temuan utama yang dapat menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

1. **Dinamika Harmoni Sosial** Kajian ini menunjukkan bahwa secara umum, harmoni sosial di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup baik. Namun, terdapat variasi antarwilayah yang mencerminkan perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingkat harmoni di masing-masing daerah.
2. **Perbedaan Berdasarkan Wilayah** Terdapat kecenderungan bahwa daerah perkotaan dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki tingkat harmoni sosial yang lebih tinggi. Namun, pada saat yang sama, ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah-daerah ini juga dapat menjadi faktor pemicu ketegangan sosial. Sebaliknya, daerah dengan keterikatan budaya yang kuat menunjukkan tingkat harmoni yang lebih stabil meskipun menghadapi tantangan dalam integrasi sosial lintas kelompok.
3. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harmoni Sosial** Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat harmoni sosial meliputi:
    a) **Pendidikan budaya dan partisipasi generasi muda**, yang terbukti berkontribusi dalam membangun kesadaran akan keberagaman dan toleransi sosial.
    b) **Kepercayaan terhadap pemerintah dan efektivitas kebijakan publik**, di mana transparansi dan keadilan dalam kebijakan berperan penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

c) **Dukungan terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal**, yang berfungsi sebagai elemen perekat sosial terutama di daerah dengan keberagaman etnis dan budaya yang tinggi.

4. **Tingkat Ketidakpuasan dalam Masyarakat** Kajian ini juga menemukan bahwa meskipun harmoni sosial secara umum terjaga dengan baik, terdapat sebagian masyarakat yang masih merasa kurang puas dengan kondisi sosial di daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat isu-isu yang perlu diperhatikan guna memastikan keberlanjutan harmoni sosial.

5. **Keselarasan antara Persepsi Publik dan Kondisi Faktual** Dalam beberapa kasus, ditemukan perbedaan antara persepsi masyarakat terhadap harmoni sosial dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat harmoni yang tinggi, beberapa daerah masih mengalami ketegangan sosial akibat faktor ekonomi, politik, atau budaya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam data kuantitatif.

Pengaruh Transformasi Digital terhadap Harmoni Sosial

Transformasi digital semakin berperan dalam membentuk dinamika sosial di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif maupun tantangan bagi harmoni sosial. Beberapa temuan utama terkait transformasi digital meliputi:

1. **Meningkatnya Interaksi Sosial Virtual**: Penggunaan media sosial dan platform digital telah memperluas ruang interaksi sosial. Hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial, namun juga berpotensi meningkatkan polarisasi jika tidak dikelola dengan baik.

2. **Akses Informasi yang Lebih Merata**: Teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan luas, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat memicu ketegangan sosial.

3. **Peluang dalam Pendidikan dan Inklusi Sosial**: Digitalisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan baru, yang pada akhirnya dapat memperkuat integrasi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. **Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Data**: Meningkatnya penggunaan teknologi digital juga membawa risiko terhadap privasi individu dan keamanan data, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi sosial lainnya.

Untuk mengoptimalkan dampak positif transformasi digital dalam menjaga harmoni sosial, diperlukan regulasi yang jelas serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan yang diperoleh, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. **Meningkatkan Pendidikan Budaya dan Keterlibatan Generasi Muda**

a) Mengintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum formal dan informal.

b) Mendorong program pelatihan dan kegiatan budaya untuk memperkuat identitas sosial dan kebersamaan.

2. **Memperkuat Transparansi dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah**

    a) Mengembangkan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

    b) Memastikan akses informasi publik yang luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. **Menjaga Harmoni Sosial di Daerah Rentan**

    a) Memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menjaga harmoni sosial melalui kebijakan pembangunan berbasis kesejahteraan sosial.

    b) Mengembangkan program fasilitasi dialog antar-kelompok untuk mengurangi potensi konflik sosial.

4. **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**

    a) Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data yang dapat memberikan gambaran real-time mengenai dinamika harmoni sosial.

    b) Melakukan kajian berkala dengan pendekatan yang lebih holistik guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

5. **Regulasi dan Literasi Digital untuk Mendukung Harmoni Sosial**

    a) Mendorong regulasi yang melindungi privasi dan keamanan data.

    b) Mengembangkan program literasi digital guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang dikonsumsi secara daring.

Kajian IHaI 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi harmoni sosial di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat harmoni sosial masih berada dalam kategori baik, meskipun terdapat variasi antarwilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Temuan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial. Ke depan, pendekatan yang lebih integratif dan berbasis data akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa harmoni sosial tetap terjaga di seluruh lapisan masyarakat.

4.1 Skor IHaI 2025

Penjelasan Skor IHaI 2025: Definisi, Skala, dan Terminologi

Skor IHaI 2025 merupakan ukuran utama dalam kajian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang digunakan untuk menilai dan menggambarkan tingkat harmoni sosial di berbagai wilayah di

Indonesia. Skor ini dihitung berdasarkan pengukuran berbagai indikator yang mencerminkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

1. Skala dan Jenis Skor

Skor IHaI 2025 disajikan dalam bentuk angka pada rentang tertentu yang dikategorikan dalam beberapa tingkat penilaian. Skala ini mencerminkan Kondisi Harmoni suatu wilayah dengan pembagian kategori sebagai berikut:

a) **Sangat Baik (Skor: Xi ≥ 7,0)** → Menunjukkan Kondisi Harmoni yang kuat dan stabil, dengan tingkat toleransi yang tinggi serta minimnya potensi konflik.

b) **Baik (Skor: 6,5 ≤ Xi < 7,00)** → Menandakan tingkat harmoni yang cukup baik dengan interaksi sosial yang positif, meskipun masih terdapat tantangan tertentu.

c) **Moderat (Skor: 5,5 ≤ Xi < 6,5)** → Mengindikasikan kondisi harmoni yang masih stabil, tetapi dengan beberapa faktor yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan sosial.

d) **Kurang Baik (Skor: Xi < 5,5)** → Menggambarkan Kondisi Harmoni yang lemah, dengan tingginya ketegangan sosial, polarisasi masyarakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan antar kelompok.

2. Definisi dan Terminologi

Dalam pengukuran Skor IHaI 2025, terdapat beberapa istilah kunci yang digunakan, yaitu:

a) **Harmoni Sosial** → Tingkat keseimbangan, kerukunan, dan interaksi yang positif dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

b) **Indikator Sosial** → Faktor-faktor yang mencerminkan keterlibatan sosial, kohesi antar kelompok, dan tingkat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

c) **Indikator Ekonomi** → Mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat, distribusi kesejahteraan, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial.

d) **Indikator Budaya** → Menilai pelestarian budaya, keberagaman adat, serta peran budaya dalam membangun harmoni sosial.

e) **Kepercayaan Publik** → Indikator yang menggambarkan sejauh mana masyarakat percaya terhadap institusi pemerintah dan kebijakan yang diterapkan dalam menjaga stabilitas sosial.

f) **Variasi Wilayah** → Perbedaan dalam tingkat harmoni sosial berdasarkan karakteristik daerah, baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan.

3. Validitas dan Pengukuran

Skor IHaI dihitung melalui kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dari survei publik, wawancara, serta analisis kondisi sosial di lapangan. Penggunaan pendekatan berbasis **Wellbeing Methodology (WM)** memastikan bahwa hasil pengukuran mencerminkan realitas sosial secara objektif.

Dengan adanya Skor IHaI 2025, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi harmoni sosial di berbagai wilayah, serta merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat.

4.1.1 Skor IHaI 2025 : Direct Measurement

Pendekatan dalam pengukuran **Skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** menggunakan metode **Direct Measurement**, di mana skor yang diperoleh berasal langsung dari respon dan penilaian masyarakat tanpa melalui konversi atau transformasi skala lainnya. Hal ini memastikan bahwa hasil yang didapatkan tetap mencerminkan realitas sosial sesuai dengan persepsi dan pengalaman responden di setiap wilayah yang diukur.

Skala 9 sebagai Basis Pengukuran

Skor IHaI 2025 tetap menggunakan **skala 9**, tanpa dilakukan konversi ke skala lain. Skala ini telah dirancang untuk memberikan tingkat sensitivitas yang optimal dalam menangkap dinamika harmoni sosial, sehingga setiap variasi dalam penilaian masyarakat dapat terekam secara akurat.

Pada sistem ini, **Skor IHaI**, **Skor Dimensi (Di)**, **Skor Variabel (Xi)**, dan **Skor PPA (Persepsi, Partisipasi, dan Acceptability)** semuanya diperoleh langsung dari responden. Skor-skor ini tidak dimanipulasi atau disesuaikan melalui skala baru, tetapi dihitung berdasarkan agregasi langsung dari jawaban masyarakat yang telah dikumpulkan melalui survei daring, wawancara, serta metode partisipatif lainnya.

Proses Pengukuran Langsung

1. **Skor IHaI** → Merupakan hasil akhir dari keseluruhan pengukuran harmoni sosial yang diperoleh dari agregasi berbagai dimensi dan variabel, semuanya berbasis pada respons masyarakat.
2. **Skor Dimensi (Di)** → Mengukur aspek-aspek spesifik dari harmoni sosial, seperti kesejahteraan ekonomi, keterlibatan sosial, serta pelestarian budaya, berdasarkan persepsi langsung masyarakat.
3. **Skor Variabel (Xi)** → Berasal dari indikator yang lebih spesifik dalam setiap dimensi, memberikan gambaran lebih rinci mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harmoni sosial. Level Variabel Xi ini yang dilakukan proses kuantifikasi dengan sudut pandang Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA)
4. **Skor PPA** → Menunjukkan tingkat **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (Penerimaan masyarakat)** terhadap kondisi sosial yang ada, serta kebijakan atau program yang dijalankan di suatu daerah.

Keunggulan Direct Measurement dalam Skor IHaI 2025

a) **Mengutamakan Transparansi dan Akuntabilitas** → Karena skor diperoleh langsung dari masyarakat, hasilnya mencerminkan opini dan pengalaman publik secara otentik tanpa intervensi dari pihak lain.

b) **Menjaga Konsistensi Metodologi** → Dengan tetap menggunakan skala 9 tanpa konversi, hasil pengukuran IHaI dari tahun ke tahun tetap konsisten, memungkinkan perbandingan yang lebih valid antar periode dan antar wilayah.

c) **Meningkatkan Akurasi dan Sensitivitas Data** → Skala 9 memungkinkan variasi respons yang lebih beragam, sehingga dapat menangkap perubahan kecil dalam harmoni sosial yang mungkin terabaikan dalam skala yang lebih terbatas.

Dengan pendekatan **Direct Measurement**, **Skor IHaI 2025** tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebuah refleksi nyata dari kondisi harmoni sosial di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sosial di berbagai wilayah.

	Skor IHaI 2025 : Direct Measurement																					
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																					
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
7	8	9	8	8	9	8	9	8	9	9	9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4449	1	4	5	2	3	3	4	1	5	5	4	2	2	4	3	1	5	4	1	5	3	1	5	4
4450	9	9	2	9	9	3	9	9	5	9	9	8	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5
4451	8	8	6	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	7	9	8	7	8	8	8	7	8	8	8
4452	7	6	7	7	7	6	8	8	7	6	6	6	6	7	6	6	6	5	7	6	6	7	9	8
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skor PPA Var.	6,32	6,66	6,28	6,30	6,57	6,28	6,58	6,79	6,58	6,42	6,64	6,46	6,48	6,68	6,48	6,46	6,62	6,48	6,69	6,84	6,74	6,71	6,84	6,74
StanDev	2,09	2,01	2,00	2,04	2,04	1,97	2,06	1,98	1,93	1,98	1,91	1,90	2,02	1,96	1,94	2,01	1,96	1,93	2,17	2,07	2,01	2,14	2,05	1,99
Skor Var Xi	6,44			6,40			6,66			6,52			6,56			6,53			6,77			6,77		
Skor Dimensi Di	6,42						6,59						6,55						6,77					
Skor IHaI 2025	6,58																							

Gambar 4.1 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Direct Measurement

Analisis Skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025

Berdasarkan hasil kajian **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**, skor keseluruhan IHaI berada pada angka **6,58 of 9,0**, yang masuk dalam **kategori baik**. Skor ini mencerminkan kondisi harmoni sosial yang relatif stabil di berbagai daerah, dengan berbagai faktor yang turut berkontribusi dalam pembentukan indeks ini.

Analisis Skor Dimensi

Berdasarkan data skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sebesar **6,58** dari skala maksimum 9, nilai tersebut merupakan hasil komposit atau rerata dari empat dimensi utama, yaitu:

1. **Dimensi Ekonomi** = 6,42
2. **Dimensi Sosial** = 6,59
3. **Dimensi Budaya** = 6,53
4. **Dimensi Keberagamaan** = 6,77

Analisis Singkat:

Pertama, skor **dimensi keberagamaan** merupakan yang **tertinggi** (6,77) di antara keempat dimensi, menunjukkan bahwa aspek kehidupan beragama di daerah tersebut dinilai paling harmonis dan mendapatkan persepsi positif dari masyarakat. Ini bisa mencerminkan toleransi, kebebasan beragama, serta kerukunan antar umat beragama yang terjaga baik.

Kedua, **dimensi ekonomi** adalah yang **terendah** (6,42), menunjukkan masih terdapat tantangan dalam aspek kesejahteraan, ketimpangan, atau akses ekonomi yang dirasakan masyarakat. Skor ini menjadi indikator penting untuk perhatian kebijakan lebih lanjut dalam rangka memperkuat fondasi kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Ketiga, karena ketiga dimensi lainnya (sosial, budaya, keberagamaan) berada di atas skor rata-rata IHaI (6,58), maka bisa dikatakan bahwa **dimensi ekonomi menjadi penarik skor turun**. Oleh karena itu, untuk meningkatkan skor IHaI ke depannya, perlu ada strategi intervensi atau penguatan di sektor ekonomi lokal.

4.1.2 Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement

Skor **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** menggunakan pendekatan **Dynamic Measurement**, yang berarti bahwa skor indeks ini dihasilkan melalui proses pengukuran statistik yang dinamis dan berbasis data. Indeks ini diperoleh dari hasil penilaian terhadap **persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA)** masyarakat, yang kemudian diuji menggunakan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)** guna memastikan validitas dan reliabilitasnya.

Dalam pendekatan ini, setiap titik penilaian didefinisikan menggunakan sistem **on-off** dengan skala **0 atau 100**, yang berarti bahwa suatu kondisi dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, tanpa adanya nilai antara. Metode ini memberikan kejelasan dalam menginterpretasikan data, sehingga setiap variabel dalam IHaI dapat diukur secara objektif dan menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai harmoni sosial di berbagai wilayah.

Dengan pendekatan **Dynamic Measurement**, skor IHaI 2025 tidak hanya mencerminkan kondisi yang ada pada satu waktu tertentu, tetapi juga mampu menangkap perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam serta perumusan kebijakan yang lebih adaptif dalam menjaga dan meningkatkan harmoni sosial di Indonesia.

4.1.2.A Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: 1# Signifikansi Skor Penilaian (SSP)

Pendekatan **Dynamic Measurement** dalam **Skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** menekankan pentingnya **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)** sebagai alat uji utama dalam menilai hasil persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA) masyarakat. SSP digunakan untuk mengukur sejauh mana skor PPA memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)**, yang dalam kajian ini ditentukan pada nilai **6,5**.

Proses pengujian ini memastikan bahwa skor yang diperoleh bukan hanya sekadar hasil penilaian subjektif masyarakat, tetapi telah melewati analisis statistik untuk menentukan apakah skor tersebut benar-benar memiliki makna signifikan dalam konteks harmoni sosial. Jika skor yang dihasilkan memenuhi atau melampaui SAS **(≥6,5)**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat harmoni sosial berada dalam kategori yang baik atau lebih tinggi. Sebaliknya, jika skor berada di bawah batas SAS, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harmoni di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan ini, **Dynamic Measurement** dalam IHaI 2025 tidak hanya sekadar menyajikan angka, tetapi juga memberikan landasan ilmiah yang lebih kuat dalam memahami dan menginterpretasikan kondisi harmoni sosial di Indonesia.

	Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement; Signifikansi Skor Penilaian (SSP)																						
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																						
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skor PPA Var.	6,32	6,66	6,28	6,30	6,57	6,28	6,58	6,79	6,58	6,42	6,64	6,46	6,48	6,68	6,48	6,46	6,62	6,48	6,69	6,84	6,74	6,71	6,84	6,74
SAS SSP	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Signifikansi	n-sign	Signfk	n-sign	n-sign	Signfk	n-sign	Signfk	Signfk	Signfk	n-sign	Signfk	n-sign	n-sign	Signfk	n-sign	n-sign	Signfk	n-sign	Signfk	Signfk	Signfk	Signfk	Signfk	Signfk

Gambar 4.2 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Dynamic Measurement; SSP

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Signifikansi Skor Penilaian (SSP)

Hasil pengukuran **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)** dalam **Dynamic Measurement** menunjukkan bahwa dari **24 titik uji**, seluruhnya memenuhi **Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 6,5**, yang berarti **14 dari 24** titik tersebut masuk dalam kategori **signifikan**.

Dalam sistem penilaian, SSP memiliki **bobot penilaian sebesar 40%**, yang menunjukkan peran pentingnya dalam penghitungan keseluruhan skor IHaI. Dengan seluruh titik uji memenuhi kriteria yang ditetapkan, skor akhir SSP dihitung berdasarkan formula berikut:

Skor SSP = 14/24x100x40%=23,33

Hasil pengukuran *Signifikansi Skor Penilaian* (SSP) dalam pendekatan *Dynamic Measurement* menunjukkan bahwa dari 24 titik uji yang tersebar di berbagai daerah, seluruhnya berhasil memenuhi ambang *Standar Acuan Signifikansi* (SAS) sebesar 6,5. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun semua titik berada pada atau di atas ambang minimum yang disyaratkan, hanya 14 dari 24 titik uji yang mencapai skor yang tergolong dalam kategori "signifikan", yaitu menunjukkan pencapaian harmonisasi yang tidak hanya sesuai standar tetapi juga berdampak nyata terhadap dinamika sosial di daerah masing-masing. Hal ini menjadi dasar penting dalam evaluasi kualitas implementasi IHaI dan arah penguatan intervensi kebijakan berbasis nilai ke depan.

4.1.2.B Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: 2# Standar Deviasi (SD)

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Standar Deviasi (SD)

Dalam **Dynamic Measurement**, **Standar Deviasi (SD)** merupakan indikator penting yang mencerminkan **variabilitas skor penilaian PPA** di masyarakat. SD menunjukkan sejauh mana persebaran opini atau penilaian masyarakat terhadap harmoni sosial dalam berbagai dimensi yang diukur.

Standar Acuan Signifikansi (SAS) untuk SD ditetapkan dalam rentang 1,0 – 2,0. Rentang ini menjadi tolok ukur ideal untuk keseimbangan antara dinamika pemikiran masyarakat dan stabilitas sosial.

- **Jika SD terlalu kecil (<1,0)** → Mengindikasikan kurangnya **keragaman pandangan, kreativitas, ide, dan inovasi** dalam merespons variabel Xi. Hal ini menunjukkan homogenitas yang terlalu tinggi, yang bisa menghambat perkembangan pemikiran dan inovasi sosial.
- **Jika SD terlalu tinggi (>2,0)** → Menunjukkan adanya perbedaan yang **terlalu tajam** dalam persepsi masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksepahaman sosial yang sulit dikendalikan, yang dalam beberapa kondisi dapat menjadi indikasi **potensi konflik**.

Dengan demikian, pemantauan SD dalam **Skor IHaI 2025** menjadi aspek penting dalam memastikan keseimbangan antara **stabilitas sosial dan dinamika perkembangan pemikiran**, sehingga harmoni sosial tetap terjaga tanpa menghambat inovasi dan kebhinekaan dalam masyarakat.

	Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement; Standar Deviasi (SD)																							
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																							
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4460	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
StanDev	2,09	2,01	2,00	2,04	2,04	1,97	2,06	1,98	1,93	1,98	1,91	1,90	2,02	1,96	1,94	2,01	1,96	1,93	2,17	2,07	2,01	2,14	2,05	1,99
SAS SD	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
Signifiknsi	n-sign	n-sign	Signfk	n-sign	n-sign	Signfk	n-sign	Signfk	Signfk	Signfk	Signfk	Signfk	n-sign	Signfk	Signfk	n-sign	Signfk	Signfk	n-sign	n-sign	n-sign	n-sign	n-sign	Signfk

Gambar 4.3 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Dynamic Measurement; SD

Hasil Pengukuran Standar Deviasi (SD) dalam Skor IHaI 2025

Pengukuran Standar Deviasi (SD) dalam **Dynamic Measurement** diterapkan pada **24 titik PPA**, dengan bobot penilaian **20%**. Hasil analisis menunjukkan bahwa rentang **SD berada antara posisi bervariasi**, dan **12 dari 24 titik memenuhi kriteria signifikan** sesuai dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS) 1,0 – 2,0**.

Karena seluruh titik memenuhi kriteria, skor SD dihitung sebagai berikut:

Skor SD = 12/24x100x20%=10,00

Hasil ini menunjukkan bahwa **variabilitas persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA) masyarakat dalam harmoni sosial masih dalam batas optimal**, yaitu cukup dinamis untuk mencerminkan adanya ide, kreativitas, dan inovasi, namun tetap terkendali sehingga tidak menciptakan potensi perpecahan sosial.

4.1.2.C Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: 3# Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)

Hasil Pengukuran Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dalam Skor IHaI 2025

Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dalam **Dynamic Measurement** diterapkan khusus pada skor **X(i.3) Akseptabilitas**. PRMR mengukur persentase responden yang memberikan penilaian rendah, yaitu skor **1, 2, dan 3** pada skala 9.

Standar Acuan Signifikansi (**SAS**) yang ditetapkan untuk PRMR adalah **maksimum 10%**, yang berarti bahwa jika proporsi responden yang memberikan penilaian rendah melebihi batas ini, maka dapat menjadi indikasi adanya permasalahan dalam penerimaan sosial terhadap kebijakan atau kondisi yang diukur.

Pengujian PRMR bertujuan untuk memahami tingkat penerimaan masyarakat terhadap aspek harmoni sosial. Jika hasilnya masih dalam batas SAS, maka tingkat akseptabilitas dapat dikategorikan stabil dan tidak menunjukkan ketidakpuasan signifikan di masyarakat. Namun, jika melebihi batas 10%, maka perlu ada perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut.

	Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement; Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)																					
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																					
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skor PRMR	11,7%			11,7%			9,4%			9,5%			8,4%			9,5%			9,7%			9,3%		
SAS PRMP	10% Maks			10% Maks			10% Maks			10% Maks			10% Maks			10% Maks			10% Maks			10% Maks		
Signifikansi	Tidak Signifikan			Tidak Signifikan			Signifikan			Signifikan			Signifikan			Signifikan			Signifikan			Signifikan		

Gambar 4.4 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Dynamic Measurement; PRMR

Hasil Pengukuran Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dalam Skor IHaI 2025

Dalam **Dynamic Measurement**, pengukuran **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** dilakukan pada **8 titik uji**, dengan fokus pada skor **X(i.3) Akseptabilitas**. PRMR mengevaluasi seberapa banyak responden yang memberikan penilaian rendah (**skor 1, 2, dan 3**) dalam skala 9.

Berdasarkan hasil pengukuran, **6 dari 8 titik uji menunjukkan proporsi PRMR yang berada di bawah batas maksimal 10%**, sesuai dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)** yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat akseptabilitas dalam masyarakat masih belum berada dalam kategori yang stabil dan menunjukkan potensi ketidakpuasan yang signifikan. Terutama pada Variabel X1 dan X2.

Dengan bobot penilaian **20%**, maka skor PRMR dihitung sebagai berikut:

Skor PMRM= 6/8×100×20%=15,00

Skor ini berkontribusi secara positif terhadap **Skor IHaI 2025**, mencerminkan bahwa tingkat penerimaan sosial terhadap harmoni di berbagai wilayah masih dalam batas yang aman dan terkendali.

4.1.2.D Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: 4# Korelasi Respon Publik (KRP)

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Korelasi Respon Publik (KRP)

Dalam **Dynamic Measurement**, pengukuran **Korelasi Respon Publik (KRP)** dilakukan untuk menguji keterkaitan antara **skor nilai Persepsi (X(i.1)) dengan Partisipasi (X(i.2))** serta **Persepsi (X(i.1)) dengan Akseptabilitas (X(i.3))** menggunakan metode **korelasi Pearson**.

KRP bertujuan untuk melihat seberapa kuat hubungan antarvariabel dalam penilaian masyarakat terhadap harmoni sosial. Korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin baik persepsi publik terhadap harmoni, semakin tinggi pula partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial.

Hasil pengukuran KRP menjadi indikator penting dalam mengevaluasi konsistensi respon publik serta mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel dalam **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025**.

	Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement; Korelasi Respon Publik (KRP)																							
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHaI)2025 : Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Data 3-24 Maret 2025)																							
	Dimensi Ekonomi						Dimensi Sosial						Dimensi Budaya						Dimensi Keberagamaan					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (15,0%)			Variabel X3 (11,5%)			Variabel X4 (11,5%)			Variabel X5 (11,0%)			Variabel X6 (11,0%)			Variabel X7 (12,5%)			Variabel X8 (12,5%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3
1	8	9	8	8	9	9	9	8	8	8	7	8	8	8	8	9	9	8	9	9	9	9	8	8
2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
5	7	9	7	8	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	2	3	3	4	3	1	4	4	2	3	4	1	2	2
4453	5	5	5	7	8	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8
4454	8	7	6	8	7	5	9	2	5	1	8	7	5	5	7	5	9	3	3	1	8	6	3	8
4455	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8
4456	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4
4457	7	9	5	6	8	7	6	8	7	7	7	7	8	8	9	7	7	7	7	7	7	8	8	8
4458	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	6	6	5	6	5	6	5	7	6	5	5
4459	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Korelasi Respon Publik (KRP) : Skor Persepsi Vs Skor Partisipasi																							
		0,81			0,84			0,87			0,86			0,87			0,88			0,91			0,91	
	Korelasi Respon Publik (KRP) : Skor Persepsi Vs Skor Akseptabilitas																							
			0,77			0,79			0,84			0,84			0,84			0,85			0,88			0,87

Gambar 4.5 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Dynamic Measurement; KRP

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Korelasi Respon Publik (KRP)

Dalam pengukuran **Dynamic Measurement**, Korelasi Respon Publik (KRP) menjadi salah satu komponen penting dalam menilai hubungan antara **Persepsi (X(i.1)) dengan Partisipasi (X(i.2))**, serta **Persepsi (X(i.1)) dengan Akseptabilitas (X(i.3))**.

Metode korelasi Pearson digunakan untuk mengukur keterkaitan antarvariabel ini, dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar 0,7 positif**. Jika korelasi memenuhi atau melebihi SAS, maka hubungan antara variabel dianggap signifikan dan konsisten dalam menggambarkan harmoni sosial.

Hasil pengukuran KRP dilakukan pada **16 titik**, di mana seluruhnya memenuhi kriteria signifikan. Dengan **bobot penilaian sebesar 10%**, maka perhitungan skor KRP adalah:

$$SkorKRP = \left(\frac{16}{16} \times 100 \times 10\%\right) = 10$$

Dengan demikian, kontribusi KRP dalam perhitungan Skor IHaI 2025 telah mencapai nilai maksimum berdasarkan bobot yang ditetapk

4.1.2.E Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: 5# Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)

Dalam pengukuran **Dynamic Measurement**, aspek **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)** menjadi indikator penting dalam menilai distribusi harmonis antara **Persepsi (X(i.1)), Partisipasi (X(i.2)), dan Akseptabilitas (X(i.3))**.

Definisi Keseimbangan:

Kondisi dianggap **seimbang** jika memenuhi aturan:

$$X(i.1) > X(i.2) > X(i.3)$$

Artinya, tingkat persepsi masyarakat terhadap suatu variabel harus lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi, dan partisipasi harus lebih tinggi dibandingkan akseptabilitas.

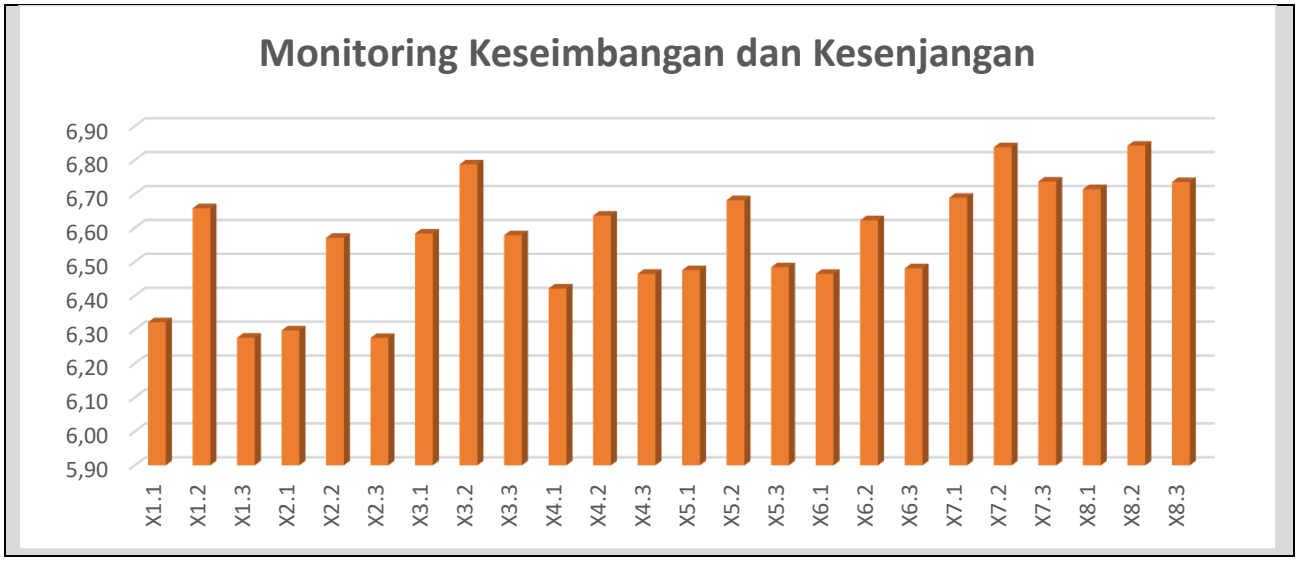
Definisi Kesenjangan:

Kesenjangan terjadi jika terdapat **perbedaan yang cukup besar antara Partisipasi (X(i.2)) dan Akseptabilitas (X(i.3))**, yang didefinisikan dengan:

$$X(i.2) - X(i.3) > 0,5$$

Jika kesenjangan terlalu tinggi, hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam penerimaan publik terhadap suatu isu, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, K&K menjadi parameter penting dalam memastikan bahwa persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas tidak hanya memiliki hubungan yang kuat tetapi juga memiliki distribusi yang proporsional dalam struktur sosial.



Gambar 4.6 : Tabel Ilustrasi Grafik IHaI 2025: Dynamic Measurement; K&K

Hasil Pengukuran Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement – Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)**, ditemukan bahwa seluruh data variabel **X(i)** menunjukkan ketidakseimbangan. **Partisipasi (X(i.2)) lebih besar dari Persepsi (X(i.1))**, yang mengindikasikan bahwa responden cenderung **overconfidence**, yaitu terlalu percaya diri dalam berpartisipasi sebelum memiliki persepsi yang cukup mendalam terhadap isu yang dinilai.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat **rasionalitas responden masih belum seimbang**, di mana idealnya **Persepsi lebih tinggi dari Partisipasi, dan Partisipasi lebih tinggi dari Akseptabilitas**.

Sementara itu, **pengukuran kesenjangan** menunjukkan bahwa semua variabel mengalami **kesenjangan**, di mana terdapat perbedaan signifikan antara **Partisipasi (X(i.2)) dan Akseptabilitas (X(i.3))** dengan nilai lebih dari 0,5.

Dari total **16 titik yang diuji**, hanya **8 titik yang memenuhi kategori signifikan**, sehingga skor K&K dihitung sebagai berikut:

Skor K&K = 8/16x100x10%= 5

Hasil ini menunjukkan bahwa keseimbangan dan kesenjangan dalam persepsi publik masih menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial yang lebih stabil dan rasional.

4.1.2.E Skor IHaI 2025 : Dynamic Measurement: Resume Skor IHaI

Skor IHaI 2025: Dynamic Measurement dihitung berdasarkan lima metrik dinamis, yaitu **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)** dengan skor 40, **Standar Deviasi (SD)** dengan skor 20, **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)** dengan skor 20, **Korelasi Respon Publik**

(KRP) dengan skor 10, dan **Keseimbangan & Kesenjangan (K&K)** dengan skor 5. Dengan demikian, total **Skor IHaI 2025 berdasarkan Dynamic Measurement adalah 95**, yang menunjukkan tingkat harmoni yang tinggi dengan variabilitas yang tetap terkontrol dalam batas signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam keseimbangan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat.

Resume Skor Penilaian: Pengukuran Dinamis; IHaI 2025 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten					
No.	Metrik Dinamis	Skor Hasil Pengukuran	Skor	Bobot	Total Skor
1	Metrik 1# SSP	Hasil = 14/24* 100 ; SAS 6,0	50,33	40%	23,33
2	Metrik 2# SD	Hasil = 12/24*100; SAS 1,0-2,0	50,0	20%	10,00
3	Metrik 3# PRMR	Hasil=6/8*100; SAS 10% maks	75	20%	15,00
4	Metrik 4# KRP	Hasil= 16/16*100; SAS 0.7	100	10%	10,00
5	Metrik 5# K&K	Hasil =8/16*100;	50	10%	5,00
		Total Skor Pengukuran Dinamis			63,33

Gambar 4.7 : Tabel Perhitungan IHaI 2025: Dynamic Measurement

4.1.3 Skor IHaI 2025 : Comprehensive Measurement

Skor IHaI 2025: Comprehensive Measurement adalah pendekatan pengukuran yang mengintegrasikan **skor langsung (direct measurement)**, **skor dinamis (dynamic measurement)**, serta hasil evaluasi berbasis **data kualitatif dan eksploratif**. Dalam metodologi Wellbeing Measurement (WM), pengukuran dilakukan dengan pembobotan **100 untuk skor langsung**, **100 untuk skor dinamis**, serta masing-masing **50 untuk evaluasi data kualitatif dan eksploratif**. Pendekatan ini memberikan gambaran holistik mengenai tingkat harmoni dengan mempertimbangkan tidak hanya hasil kuantitatif, tetapi juga faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat.

4.2 Analisis Data Dinamis

Pentingnya Analisis Data Dinamis dalam Pengukuran dengan Responden Besar

Dalam pengukuran data publik dengan jumlah responden yang besar, analisis data tidak bisa hanya mengandalkan rata-rata atau skor agregat, karena data yang luas dan beragam sering kali mengandung variasi, pola, serta dinamika yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan **Analisis Data Dinamis** melalui **5 metrik utama** yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA) masyarakat berkembang dalam suatu konteks sosial. Berikut adalah alasan mengapa masing-masing metrik ini menjadi sangat penting dalam analisis data skala besar:

1. Signifikansi Skor Penilaian (SSP) – Menguji Keandalan Hasil

Dalam populasi besar, distribusi data bisa sangat bervariasi, sehingga diperlukan **batas signifikansi** untuk memastikan bahwa hasil pengukuran memang mencerminkan kondisi sebenarnya, bukan hanya fluktuasi acak. **SSP menguji apakah skor nilai PPA telah mencapai atau melebihi Standar Acuan Signifikansi (SAS)** yang telah ditentukan (misalnya SAS = 6,5). Dengan cara ini, kita dapat menyaring titik-titik data yang benar-benar memiliki **makna signifikan**, bukan hanya outlier atau anomali statistik.

2. Standar Deviasi (SD) – Mengukur Konsistensi dan Dinamika Variasi Data

Dalam populasi besar, pola distribusi data bisa mencerminkan **seberapa stabil atau beragamnya** persepsi publik. **Standar deviasi (SD) digunakan untuk mengukur sebaran skor PPA** dalam suatu rentang yang telah ditetapkan (SAS SD = 1,0 – 2,0). Jika **SD terlalu kecil**, artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam jawaban responden, yang bisa menunjukkan kurangnya kreativitas, inovasi, atau bahkan bias dalam cara pertanyaan diajukan. Sebaliknya, **SD yang terlalu tinggi** bisa menjadi indikasi ketidakseimbangan ekstrem dalam persepsi masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik atau kesenjangan dalam penerimaan kebijakan publik.

3. Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) – Mengidentifikasi Potensi Ketidakpuasan

Dalam pengukuran opini publik, penting untuk melihat **seberapa banyak responden yang memberikan penilaian sangat rendah (skor 1, 2, dan 3) terhadap variabel akseptabilitas (X(i.3))**. Jika **PRMR melebihi ambang batas SAS 10%**, maka ada indikasi bahwa kebijakan atau layanan publik tertentu mengalami tingkat penolakan yang signifikan. Dengan mengidentifikasi titik-titik di mana tingkat kepuasan rendah, pengambil kebijakan dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

4. Korelasi Respon Publik (KRP) – Mengukur Keterkaitan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas

Dalam populasi besar, pola hubungan antara **persepsi (X(i.1)), partisipasi (X(i.2)), dan akseptabilitas (X(i.3))** menjadi indikator penting dalam memahami keterlibatan masyarakat. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat apakah hubungan antara persepsi dan partisipasi, serta antara persepsi dan akseptabilitas, **mencapai SAS KRP ≥ 0,7 (positif)**. Korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin positif persepsi masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka berpartisipasi dan menerima suatu kebijakan. Jika korelasi rendah atau negatif, ini bisa menjadi tanda bahwa meskipun masyarakat memiliki persepsi yang baik, mereka tetap enggan terlibat atau menerima suatu kebijakan, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal lain seperti kurangnya kepercayaan atau hambatan struktural.

5. Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K) – Mengukur Rasionalitas dan Stabilitas Dinamika Sosial

Dalam populasi besar, perbedaan persepsi dan partisipasi sering kali menghasilkan **ketidakseimbangan** yang bisa berdampak pada stabilitas sosial. Metrik **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)** digunakan untuk melihat dua aspek utama:

a) **Keseimbangan**: Jika **Partisipasi (X(i.2)) lebih besar dari Persepsi (X(i.1))**, ini bisa menunjukkan fenomena *overconfidence*, di mana masyarakat berpartisipasi aktif tanpa dasar persepsi yang cukup kuat, sehingga berpotensi menciptakan keputusan yang kurang rasional.

b) **Kesenjangan**: Jika **selisih antara Partisipasi (X(i.2)) dan Akseptabilitas (X(i.3)) lebih dari 0,5**, ini bisa menjadi indikasi bahwa meskipun masyarakat aktif berpartisipasi, mereka tetap belum sepenuhnya menerima suatu kebijakan atau kondisi sosial tertentu. Kesenjangan semacam ini dapat menjadi pemicu ketidakstabilan dalam jangka panjang.

Kesimpulan: Mengapa 5 Metrik Dinamis Ini Penting dalam Analisis Data Publik dengan Responden Besar?

Dengan populasi responden yang besar, **sekadar melihat angka rata-rata tidak cukup untuk memahami kompleksitas dinamika sosial**. **5 metrik dinamis ini diperlukan karena:**

1. **SSP memastikan keandalan data**, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar signifikan dan bukan sekadar fluktuasi.
2. **SD membantu memahami variasi dan stabilitas opini masyarakat**, yang bisa menjadi indikator kreativitas atau potensi konflik.
3. **PRMR mengidentifikasi titik-titik ketidakpuasan**, memungkinkan intervensi lebih dini sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi ketidakstabilan sosial.
4. **KRP membantu melihat keterkaitan antarvariabel utama**, sehingga dapat memahami bagaimana pola pikir masyarakat berkembang.
5. **K&K mengungkap ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam keterlibatan publik**, yang bisa menjadi faktor risiko dalam implementasi kebijakan.

Dengan menerapkan **Analisis Data Dinamis** melalui **5 metrik ini**, hasil pengukuran menjadi lebih **akurat, reflektif, dan actionable**, sehingga dapat mendukung **perumusan kebijakan yang lebih berbasis data dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat**.

4.2.1 SAS Dinamis

Standar Acuan Signifikansi (SAS) Dinamis dalam Pengujian SSP dan PRMR

Dalam pengukuran indeks dengan pendekatan **Dynamic Measurement**, **Standar Acuan Signifikansi (SAS) Dinamis** digunakan untuk menguji **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)** dan **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)**. SAS ini bertindak sebagai **benchmark atau tolok ukur** yang fleksibel, disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Tidak seperti SAS tetap yang menggunakan satu angka referensi statis, SAS Dinamis memungkinkan adanya **penyesuaian berdasarkan data historis, target capaian pemerintah daerah, serta kondisi spesifik yang terjadi di masyarakat**.

1. SAS Berdasarkan Data Historis (3-5 Periode Sebelumnya)

Salah satu pendekatan dalam menentukan SAS adalah dengan melihat **rata-rata pencapaian indeks dalam 3 hingga 5 periode sebelumnya**. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami tren jangka panjang serta pola perubahan persepsi masyarakat. Jika rata-rata skor SSP atau PRMR dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil atau meningkat, maka

SAS dapat ditetapkan berdasarkan rerata capaian tersebut. Namun, jika terjadi fluktuasi yang besar atau tren penurunan, maka diperlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah kondisi tersebut mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat atau hanya faktor sementara.

2. SAS Berdasarkan Target Capaian yang Ditetapkan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sering kali memiliki **rencana strategis dan target capaian** terkait partisipasi publik dan penerimaan kebijakan. Oleh karena itu, SAS Dinamis juga dapat merujuk pada **target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah**, baik melalui dokumen perencanaan, RPJMD, atau kebijakan sektoral lainnya. Misalnya, jika suatu daerah menargetkan peningkatan akseptabilitas kebijakan publik dengan **mengurangi PRMR hingga di bawah 8% dalam 5 tahun**, maka SAS untuk PRMR dapat ditetapkan berdasarkan angka tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran indeks menjadi lebih relevan dengan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh daerah tersebut.

3. SAS Berdasarkan Kondisi Spesifik Daerah

Selain data historis dan target capaian pemerintah, SAS Dinamis juga harus mempertimbangkan **kondisi sosial-ekonomi dan dinamika masyarakat yang terjadi di lapangan**. Misalnya, jika suatu daerah mengalami demonstrasi besar terkait kebijakan tertentu, perubahan ekspektasi masyarakat yang drastis, atau tuntutan publik yang meningkat akibat perubahan ekonomi, maka SAS dapat **disesuaikan untuk mencerminkan realitas tersebut**. Dalam konteks ini, jika ada peningkatan ketidakpuasan publik yang terekam dalam PRMR, maka batas SAS dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga analisis tetap objektif dan kontekstual.

Manfaat SAS Dinamis dalam Pengujian SSP dan PRMR

Penerapan SAS Dinamis memberikan manfaat besar dalam memastikan bahwa **pengukuran SSP dan PRMR benar-benar mencerminkan kondisi yang ada**. Dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel ini, indeks tidak hanya menjadi alat statistik yang statis, tetapi juga menjadi **alat analisis kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial**. Hal ini juga memungkinkan **evaluasi berbasis bukti (evidence-based evaluation)** yang lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan: SAS Dinamis Sebagai Instrumen Pengukuran yang Adaptif

Dalam pengukuran indeks publik dengan jumlah responden yang besar, penggunaan **SAS Dinamis dalam SSP dan PRMR sangat penting** untuk menjaga relevansi dan akurasi hasil. Dengan mempertimbangkan **data historis, target pemerintah daerah, serta kondisi spesifik masyarakat**, SAS dapat menjadi tolok ukur yang lebih adaptif, memastikan bahwa analisis tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar merefleksikan kondisi sosial yang dinamis dan terus berkembang.

4.2.2 SAS Dinamis Mengacu Pada Ketentuan Metodologi

SAS Dinamis Mengacu pada Ketentuan Metodologi

Selain berdasarkan data historis, target capaian pemerintah daerah, dan kondisi spesifik masyarakat, **Standar Acuan Signifikansi (SAS) Dinamis** juga harus **mengacu pada ketentuan metodologi yang telah ditetapkan dalam Wellbeing Methodology (WM)**. Pendekatan berbasis metodologi ini memastikan bahwa **pengukuran dilakukan secara objektif, terstandarisasi, dan dapat dibandingkan antarwilayah serta antarperiode**. Beberapa contoh penerapan SAS yang berbasis metodologi dalam pengukuran indeks adalah sebagai berikut:

1. SAS Standar Deviasi (SD) dalam Skala 9

Dalam skala pengukuran **IHaI yang menggunakan skala 9**, standar deviasi (**SD**) yang dianggap **ideal dan signifikan berada dalam rentang 1,0 – 2,0**. **SD yang terlalu kecil (<1,0) menandakan homogenitas yang berlebihan**, yang bisa diartikan sebagai kurangnya kreativitas, variasi pendapat, atau bahkan adanya bias dalam penilaian. Sebaliknya, **SD yang terlalu tinggi (>2,0) menunjukkan perbedaan pendapat yang sangat besar**, yang dapat menjadi indikasi adanya **potensi konflik atau ketidakseimbangan persepsi di masyarakat**. Oleh karena itu, SAS untuk SD dalam skala 9 telah **ditetapkan dalam rentang 1,0 – 2,0 sebagai ukuran ideal dari variabilitas skor penilaian PPA masyarakat**.

2. SAS Korelasi Respon Publik (KRP) dengan Batas 0,7

Dalam analisis hubungan antarvariabel, **SAS untuk Korelasi Respon Publik (KRP) menggunakan metode Pearson telah ditetapkan pada nilai minimum 0,7**. Nilai ini didasarkan pada standar analisis statistik di mana **korelasi positif di atas 0,7 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel**. Dalam konteks IHaI, KRP digunakan untuk mengukur hubungan antara:

a) **Persepsi (X(i.1)) vs Partisipasi (X(i.2))**

b) **Persepsi (X(i.1)) vs Akseptabilitas (X(i.3))**

Jika nilai korelasi berada di bawah 0,7, maka ada kemungkinan terjadi **ketidakseimbangan dalam pola penilaian responden**, misalnya **persepsi publik terhadap suatu kebijakan belum diikuti oleh partisipasi yang aktif** atau **akseptabilitas masih lemah meskipun persepsi positif meningkat**. Oleh karena itu, **nilai SAS sebesar 0,7** digunakan sebagai tolok ukur minimal untuk memastikan bahwa hubungan antarvariabel mencerminkan keterpaduan yang baik dalam respons publik.

3. SAS Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K) dalam Metodologi WM

Dalam **Wellbeing Methodology (WM)**, **keseimbangan dan kesenjangan dalam penilaian publik** didefinisikan dengan aturan tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa skor yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sosial yang harmonis. Dua aspek utama yang diuji dalam K&K adalah:

a) **Keseimbangan**, yang didefinisikan dengan aturan **X(i.1) > X(i.2) > X(i.3)**. Jika pola ini tidak terpenuhi, maka terjadi **ketidakseimbangan dalam rasionalitas publik**, misalnya **partisipasi lebih tinggi dari persepsi, yang mengindikasikan adanya overconfidence dalam keterlibatan masyarakat tanpa didukung oleh persepsi yang kuat**.

b) **Kesenjangan**, yang diukur dengan aturan **X(i.2) – X(i.3) > 0,5**. Jika nilai ini terlalu besar, maka ada indikasi bahwa partisipasi publik jauh lebih tinggi dibandingkan akseptabilitas terhadap kebijakan, yang bisa menjadi sinyal adanya **konflik potensial atau resistensi terhadap kebijakan tertentu**.

Dengan menggunakan SAS yang telah didefinisikan dalam **Metodologi WM**, analisis keseimbangan dan kesenjangan dapat dilakukan secara lebih sistematis untuk mengidentifikasi **apakah respon publik menunjukkan dinamika sosial yang sehat atau justru mengarah ke ketimpangan yang berisiko menimbulkan konflik sosial**.

Kesimpulan: SAS Dinamis Berbasis Metodologi sebagai Standar Pengukuran yang Konsisten

Penggunaan **SAS Dinamis yang mengacu pada metodologi WM** sangat penting untuk menjaga **akurasi, konsistensi, dan validitas hasil pengukuran indeks**. Dengan menerapkan batas standar yang jelas, seperti **rentang SD 1,0 – 2,0, korelasi minimal 0,7, dan aturan keseimbangan-kesenjangan dalam variabel PPA**, maka analisis IHaI menjadi lebih terarah dan dapat dibandingkan secara lebih adil antarwilayah dan antarperiode.

Pendekatan ini juga memastikan bahwa **pengukuran indeks tidak hanya sekadar menghitung angka, tetapi juga mampu menangkap dinamika sosial yang lebih dalam**, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di masyarakat.

4.3 Korelasi Respon Publik (KRP)

Korelasi Skor Nilai sebagai Interpretasi Sosial dalam Analisis IHaI

Korelasi antara skor nilai dalam pengukuran **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)** memiliki makna sosial yang sangat penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Salah satu hubungan utama yang dianalisis adalah **korelasi antara Persepsi (X(i.1)) dan Partisipasi (X(i.2))**, yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat yang memiliki persepsi tertentu terhadap suatu isu atau kebijakan juga tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Korelasi ini menjadi **indikator keberhasilan manajerial pemerintah** dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap isu-isu publik. Jika korelasinya tinggi dan positif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah **berhasil membangun kesadaran masyarakat**, sehingga persepsi yang terbentuk diikuti oleh tindakan nyata berupa keterlibatan aktif dalam berbagai program atau kebijakan yang diterapkan.

Sebaliknya, jika korelasi antara **Persepsi vs Partisipasi rendah atau bahkan negatif**, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satunya adalah **rendahnya**

efektivitas komunikasi pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Bisa jadi masyarakat memiliki persepsi yang cukup baik terhadap suatu kebijakan atau program, tetapi tidak merasa terdorong untuk ikut serta dalam implementasi atau kegiatannya. Hal ini bisa disebabkan oleh **kurangnya sosialisasi, minimnya akses terhadap sarana partisipasi, atau kurangnya insentif yang diberikan**. Dengan demikian, analisis korelasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat.

Selain itu, korelasi antara **Persepsi (X(i.1)) dan Akseptabilitas (X(i.3))** juga memiliki peran yang sangat krusial dalam memahami hubungan antara **pengetahuan masyarakat dengan tingkat penerimaan mereka terhadap kebijakan atau layanan publik**. Akseptabilitas mengukur sejauh mana kebijakan diterima oleh masyarakat dan seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap kebijakan tersebut. Korelasi yang tinggi antara persepsi dan akseptabilitas menunjukkan bahwa **masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap suatu kebijakan cenderung lebih mudah menerimanya dan merasa puas dengan kebijakan tersebut**.

Namun, jika korelasi antara **Persepsi dan Akseptabilitas rendah**, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa **pengetahuan masyarakat mengenai suatu kebijakan belum cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat penerimaan mereka**. Misalnya, masyarakat mungkin memiliki persepsi yang baik terhadap sebuah kebijakan karena mengikuti narasi yang berkembang di media, tetapi ketika kebijakan tersebut diterapkan, mereka justru tidak merasa puas atau tidak menerimanya sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi karena **ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas implementasi kebijakan** atau adanya faktor lain yang membuat kebijakan tersebut kurang diterima. Oleh karena itu, **pemerintah perlu memastikan bahwa sosialisasi kebijakan dilakukan secara lebih menyeluruh dan transparan**, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki persepsi yang baik, tetapi juga benar-benar memahami kebijakan tersebut dan menerima dampaknya dengan lebih rasional.

Pentingnya analisis korelasi dalam konteks sosial juga dapat digunakan untuk mendeteksi **potensi ketidakseimbangan dalam respons publik terhadap kebijakan tertentu**. Jika ditemukan bahwa **partisipasi lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi**, maka ada indikasi **overconfidence atau keterlibatan yang tidak berbasis pengetahuan yang cukup**. Sebaliknya, jika akseptabilitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan persepsi, maka ada kemungkinan bahwa **masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi tetapi merasa kecewa dengan hasil yang mereka rasakan secara langsung**. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga aspek ini perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik.

Dengan memahami **korelasi antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas**, analisis IHaI tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga berfungsi sebagai **alat diagnostik sosial** yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan publik diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan hasil analisis ini untuk **meningkatkan efektivitas kebijakan, memperbaiki komunikasi publik, serta mengoptimalkan strategi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan**. Dengan demikian, pemanfaatan korelasi skor nilai dalam IHaI dapat menjadi **instrumen penting**

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.4 Identifikasi Keseimbangan dan Kesenjangan

Pentingnya Identifikasi Keseimbangan dan Kesenjangan dalam Evaluasi Rasionalitas Responden

Identifikasi keseimbangan dan kesenjangan dalam penilaian responden adalah metrik yang sangat penting dalam **mengukur rasionalitas publik terhadap suatu kebijakan atau isu sosial**. Dalam analisis **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)**, keseimbangan terjadi jika pola penilaian responden mengikuti urutan yang logis, yaitu **Persepsi (X(i.1)) lebih tinggi dari Partisipasi (X(i.2)), dan Partisipasi lebih tinggi dari Akseptabilitas (X(i.3))**. Sebaliknya, kesenjangan terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara variabel-variabel ini, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan atau isu publik.

Salah satu temuan yang sering muncul adalah **Partisipasi (X(i.2)) lebih tinggi dibandingkan dengan Persepsi (X(i.1))**, yang dapat menjadi indikasi **overconfidence**. Fenomena ini terjadi ketika masyarakat **lebih banyak terlibat dalam suatu kebijakan atau program tanpa memiliki pemahaman atau persepsi yang cukup terhadapnya**. Misalnya, seseorang aktif dalam suatu program pemerintah, namun tidak benar-benar memahami tujuan, mekanisme, atau dampak jangka panjang dari program tersebut. Hal ini bisa menjadi perhatian karena **partisipasi yang tidak didasarkan pada pemahaman yang kuat dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis dan potensi kekecewaan di kemudian hari**.

Meskipun dalam jangka pendek **partisipasi yang tinggi dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan kebijakan publik**, dalam jangka panjang, **ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah**. Jika tindakan masyarakat lebih cepat daripada pemahaman mereka, ada risiko bahwa partisipasi tersebut **hanya bersifat reaktif, emosional, atau didorong oleh faktor eksternal seperti insentif jangka pendek atau pengaruh sosial**. Hal ini dapat menyebabkan **ketidakkonsistenan dalam keterlibatan masyarakat**, di mana mereka berpartisipasi secara aktif pada tahap awal tetapi kemudian kehilangan minat atau merasa tidak puas ketika harapan mereka tidak terpenuhi.

Di sisi lain, jika **kesenjangan antara Partisipasi (X(i.2)) dan Akseptabilitas (X(i.3)) terlalu besar**, hal ini juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan atau program yang telah mereka ikuti. Misalnya, jika masyarakat telah berpartisipasi dalam suatu inisiatif tetapi pada akhirnya merasa kecewa atau tidak puas dengan hasilnya, ini bisa menjadi tanda bahwa **kebijakan tersebut belum mampu memenuhi harapan mereka secara substansial**. Kesenjangan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti **kurangnya transparansi, perubahan dalam implementasi kebijakan, atau perbedaan antara harapan awal dan realitas yang mereka hadapi**.

Oleh karena itu, **pemerintah perlu memonitor keseimbangan dan kesenjangan dalam penilaian publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta pemahaman masyarakat**. Strategi seperti

peningkatan edukasi publik, komunikasi yang lebih efektif, serta penyediaan mekanisme umpan balik yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan ini. Dengan mengelola keseimbangan antara **persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas**, kebijakan publik dapat lebih **berkelanjutan dan diterima secara rasional oleh masyarakat**, sehingga dampak positifnya lebih terasa dalam jangka panjang.

Dengan demikian, **Identifikasi Keseimbangan dan Kesenjangan bukan sekadar alat ukur teknis dalam analisis data**, tetapi juga **alat diagnostik sosial yang membantu memahami bagaimana masyarakat berpikir, bertindak, dan menerima kebijakan yang diterapkan**. Ketika keseimbangan dapat dijaga dan kesenjangan dapat diminimalkan, maka **keberlanjutan kebijakan publik akan lebih terjamin, partisipasi masyarakat lebih bermakna, dan tingkat kepuasan terhadap kebijakan dapat meningkat secara signifikan**.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** memberikan gambaran mengenai tingkat harmoni sosial dalam masyarakat melalui berbagai pendekatan pengukuran. Penggunaan **Direct Measurement, Dynamic Measurement, dan Comprehensive Measurement** memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas publik terhadap berbagai isu sosial. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa harmoni sosial di wilayah yang diteliti berada dalam kategori **baik**, namun tetap terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama dalam keseimbangan antara partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik.

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah adanya **ketidakseimbangan antara persepsi dan partisipasi**, yang mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam isu publik tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Selain itu, analisis kesenjangan menunjukkan bahwa perbedaan dalam penerimaan kebijakan masih terjadi di beberapa kelompok masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi dan edukasi yang lebih efektif agar partisipasi masyarakat semakin didukung oleh pemahaman yang rasional.

Dari perspektif kebijakan, hasil kajian ini memberikan **informasi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan program-program sosial dan pembangunan daerah**. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Selain itu, diperlukan upaya untuk **mengurangi kesenjangan sosial** dan meningkatkan kohesi sosial agar harmoni dapat terus terjaga di masyarakat.

Sebagai rekomendasi, disarankan agar pemerintah memperkuat **pendekatan berbasis data dalam perencanaan kebijakan**, termasuk dengan menggunakan metode pengukuran yang lebih komprehensif. Edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemahaman publik terhadap kebijakan yang diterapkan semakin baik. Selain itu, pemantauan terhadap tren sosial dan dinamika masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang dibuat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Ke depan, implementasi IHaI di berbagai daerah dapat terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis bukti (evidence-based policy). Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data juga dapat membantu meningkatkan akurasi pengukuran dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, IHaI dapat menjadi alat yang tidak hanya mengukur harmoni sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya **peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan**.

5.1 Kesimpulan Umum

Kesimpulan umum dari kajian **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** menegaskan bahwa IHaI merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial dalam masyarakat melalui pendekatan berbasis data, dengan mempertimbangkan aspek **persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA)**. Kajian ini menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak

hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu publik. Melalui metode pengukuran **direct, dynamic, dan comprehensive**, IHaI memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial di suatu wilayah serta tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan meningkatkan strategi komunikasi kebijakan, memperkuat partisipasi berbasis pemahaman, serta mengembangkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) guna memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan sosial yang berkelanjutan.

5.1.1.A Sebagai Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kajian **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025** tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kondisi harmoni sosial, tetapi juga sebagai bagian dari **kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat** dalam memahami peran mereka dalam membangun keharmonisan. Dengan melibatkan **4460 responden**, angka ini telah melampaui batas minimum yang ditetapkan, yaitu **1250 responden**, dengan estimasi **response rate sebesar 10%-30%**. Instrumen survei yang digunakan dalam pengukuran ini berhasil menjangkau sekitar **30.000 responden**, menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang cukup baik. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan pengukuran IHaI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi dalam kebijakan sosial, serta sebagai sarana edukasi mengenai keterkaitan antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas dalam harmoni sosial.

Meskipun capaian ini cukup signifikan, ke depan upaya peningkatan jumlah responden masih diperlukan agar survei menjadi lebih inklusif dan representatif bagi seluruh kelompok masyarakat. Partisipasi yang lebih luas akan memberikan **potret yang lebih akurat** tentang harmoni sosial di berbagai wilayah, termasuk kelompok yang mungkin belum terjangkau dalam survei sebelumnya. Selain itu, strategi pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital dapat semakin dioptimalkan untuk meningkatkan keterlibatan responden dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, IHaI dapat semakin berfungsi sebagai **instrumen yang tidak hanya mengukur harmoni sosial, tetapi juga membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas**.

5.1.1.B Memotret dan Memetakan Skor PPA Masyarakat

Pemotretan dan pemetaan **Skor PPA (Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas) masyarakat** dapat dibuktikan melalui tiga tahap utama: **pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi sosial atas data**. Data yang diperoleh dari responden dikonversi ke dalam **skala kuantitatif** (skala 9) untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai bagaimana masyarakat menilai berbagai aspek harmoni sosial. Dengan menggunakan metodologi **Direct Measurement dan Dynamic Measurement**, data yang terkumpul dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antarvariabel. Analisis ini mencakup berbagai metrik dinamis, seperti **Signifikansi Skor Penilaian (SSP), Standar Deviasi (SD), Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Korelasi Respon Publik (KRP), serta Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)**, yang memberikan pemahaman mendalam tentang pola penilaian masyarakat terhadap isu-isu sosial di daerah mereka.

Selain analisis kuantitatif, **interpretasi sosial atas data** menjadi kunci dalam memahami makna di balik angka-angka yang diperoleh. Misalnya, **kohesi sosial dapat diukur dari pola keseimbangan skor PPA**, di mana kesenjangan yang signifikan antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas dapat menjadi indikator adanya perbedaan pemahaman atau kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. PRMR juga menjadi indikator penting dalam melihat **kelompok yang kurang terlibat atau merasa tidak memiliki keterwakilan dalam isu publik**. Interpretasi ini menghasilkan **Evidence-Based Data (EBD)** yang dapat digunakan untuk **menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas sosial masyarakat**. Dengan demikian, pemetaan skor PPA tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur statistik, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memahami **persepsi, keterlibatan, dan tingkat penerimaan masyarakat dalam dinamika kehidupan sosial mereka**.

5.1.1.C Menggali Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) Masyarakat

Penggalian **Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK) masyarakat** dalam kajian IHaI 2025 telah dilakukan dengan baik, memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek yang menjadi perhatian publik. Melalui pendekatan **kualitatif dan eksploratif**, DUSK mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kebijakan yang ada, mengidentifikasi permasalahan utama, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan. Data ini dikumpulkan melalui survei terbuka, diskusi kelompok, serta analisis sentimen dari tanggapan responden, yang kemudian dikategorikan berdasarkan tema dan urgensi. Dengan adanya DUSK, pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki **evidence-based insights** yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.1.1.D Mendapatkan Evidence Based Data (EBD)

Evidence-Based Data (EBD) dalam kajian IHaI 2025 diperoleh melalui kombinasi **data kuantitatif dan kualitatif**, yang mencerminkan kondisi objektif masyarakat berdasarkan skor PPA serta analisis mendalam dari DUSK. EBD menjadi landasan utama dalam memahami dinamika sosial, tingkat partisipasi, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dapat lebih **terukur, akurat, dan relevan** dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan harmoni sosial.

5.1.1.E Memberikan Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian IHaI 2025, **saran dan rekomendasi kebijakan** disusun dengan mempertimbangkan **data kuantitatif, kualitatif, serta interpretasi sosial** yang telah dianalisis. Rekomendasi difokuskan pada upaya **peningkatan kohesi sosial, optimalisasi partisipasi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan dalam persepsi dan akseptabilitas** terhadap kebijakan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan hasil IHaI sebagai acuan dalam **merancang kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti**, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat harmoni sosial di wilayahnya.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pengukuran IHaI 2025, rekomendasi kebijakan disusun dengan mempertimbangkan **evidence-based data (EBD)** yang diperoleh dari **data kuantitatif (skor PPA), data kualitatif (DUSK), serta analisis keseimbangan dan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat**. Data ini menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan berbasis partisipasi publik guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan hasil analisis ini dalam penyusunan program kerja yang lebih inklusif, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keberagamaan.

Dari sisi **analisis data**, pola korelasi antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas menunjukkan bahwa **keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan perlu ditingkatkan**. Ketidakseimbangan antara persepsi dan partisipasi, yang mengarah pada overconfidence, menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengelola ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, **peningkatan transparansi informasi, edukasi publik, serta mekanisme umpan balik yang lebih efektif** perlu diperkuat untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan pemahaman dan kesadaran yang rasional terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dari **interpretasi sosial atas data**, ditemukan adanya **kelompok masyarakat yang cenderung kurang terlibat (non-engaged people) dalam isu-isu publik**. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif guna menjangkau kelompok ini, baik melalui edukasi, media sosial, maupun pendekatan berbasis komunitas. Selain itu, pengelolaan kesenjangan dalam skor PPA perlu dilakukan dengan **kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial**, khususnya dalam menanggapi perubahan ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari IHaI 2025 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

5.2.1 Rekomendasi 1#: Penggalian Data Responden

Hasil pengukuran IHaI 2025 menunjukkan bahwa jumlah responden yang diperoleh sebanyak **4460 orang**, telah memenuhi **batas minimum yang disyaratkan** serta menunjukkan **proporsionalitas geografis yang baik**. Hal ini mencerminkan bahwa metodologi pengumpulan data yang diterapkan sudah cukup efektif dalam menjangkau berbagai wilayah yang menjadi target penelitian. Namun, untuk **meningkatkan validitas dan representasi data**, perlu dilakukan optimalisasi dalam **menyesuaikan komposisi karakteristik responden**, terutama dalam aspek sosial-demografi seperti tingkat pendidikan dan status pekerjaan.

Untuk tahun **2026**, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggalian data, **terutama Badan Kesbangpol**, diharapkan dapat **meningkatkan jumlah responden secara signifikan** agar lebih inklusif dan representatif. Strategi perlu difokuskan pada **peningkatan partisipasi masyarakat dari kelompok dengan tingkat pendidikan dan status pekerjaan yang lebih beragam**, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, metode **sampling dan strategi sosialisasi survei** juga perlu diperbaiki agar dapat **menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili**. Dengan demikian, hasil pengukuran IHaI akan semakin akurat dalam merepresentasikan kondisi sosial di berbagai wilayah, serta memberikan **evidence-based data (EBD)** yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran.

5.2.2 Rekomendasi 2#: Fokus Perbaikan

Hasil pengukuran IHaI 2025 menunjukkan bahwa **dimensi ekonomi memiliki skor terendah**, sehingga perlu menjadi fokus utama dalam perbaikan kebijakan. Upaya perbaikan harus mengacu pada **Variabel X1** dan **Variabel X2** beserta indikator-indikatornya. Untuk Variabel X1, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat dilakukan dengan **meningkatkan akses terhadap informasi ekonomi**, mendorong **stabilitas harga kebutuhan pokok**, serta **memperkuat program bantuan dan pemberdayaan ekonomi lokal**. Sementara itu, pada Variabel X2, diperlukan **strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi**, seperti melalui **pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan akses terhadap modal dan pasar. Dengan perbaikan berbasis data ini, diharapkan keseimbangan antara persepsi dan partisipasi ekonomi masyarakat dapat tercapai, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.**

Resume Saran dan Rekomendasi Kebijakan – Dimensi Ekonomi

1. **Perluasan Lapangan Kerja Baru**
   Banyak responden menyoroti terbatasnya lapangan kerja sebagai masalah utama. Rekomendasi: Pemerintah daerah perlu menciptakan dan mendorong sektor padat karya, terutama di bidang UMKM, pertanian, dan ekonomi digital lokal.
2. **Penguatan UMKM dan Industri Rumah Tangga**
   Ada aspirasi untuk membangun UMKM dan *home industry* sebagai solusi. Rekomendasi: Perlu disediakan fasilitas pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses modal, serta pasar digital untuk produk lokal.
3. **Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Intervensi Ekonomi**
   Masyarakat berharap peran lebih besar dari pemerintah dalam membantu ekonomi. Rekomendasi: Alokasikan anggaran daerah untuk program bantuan usaha, insentif ekonomi, dan pendampingan kelompok ekonomi kreatif.
4. **Pemberdayaan Masyarakat Secara Inklusif**
   Beberapa responden menyarankan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan harmoni ekonomi. Rekomendasi: Dorong partisipasi komunitas lokal melalui forum musyawarah ekonomi dan inklusi kelompok rentan dalam kebijakan ekonomi.
5. **Perbaikan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program Ekonomi**
   Terdapat ketimpangan persepsi antara warga yang merasa “tidak ada masalah” dan yang menghadapi kesulitan. Rekomendasi: Pemerintah perlu menyosialisasikan program bantuan ekonomi secara terbuka dan transparan agar semua lapisan masyarakat mengetahui dan dapat mengaksesnya.

5.2.3 Rekomendasi 3#: Interpretasi Data Dinamis

Hasil analisis data dinamis dalam pengukuran **IHaI 2025** menunjukkan capaian moderat dengan **skor 63,33 dari 100**. Namun, ketika melihat lebih dalam ke setiap **Variabel Xi**, ditemukan bahwa **skor Persepsi X(i.1) lebih rendah dibandingkan dengan skor Partisipasi X(i.2)** di seluruh variabel yang diukur. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kondisi di mana masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam isu-isu publik, tetapi tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran mereka terhadap isu tersebut masih lebih rendah.

Secara **filosofis**, dalam dinamika sosial dan kebijakan publik, **persepsi yang kuat akan menarik partisipasi yang lebih berkualitas**. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap suatu isu cenderung berpartisipasi dengan lebih rasional dan efektif. Jika ketidakseimbangan ini terus berlanjut, ada risiko **overconfidence** dalam partisipasi tanpa dasar pemahaman yang cukup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, **Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi publik terkait berbagai isu kebijakan dan program pemerintah**. Melalui strategi komunikasi yang lebih inklusif, program edukasi yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih memahami **latar belakang, tujuan, dan dampak kebijakan publik**. Dengan demikian, diharapkan **skor Persepsi X(i.1) dapat meningkat**, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara **pengetahuan, partisipasi, dan akseptabilitas dalam pembangunan daerah**.

5.2.4 Rekomendasi 4#: Menjaga Isu Sensitif

Hasil skor **Penilaian Dimensi Keberagamaan** dalam **IHaI 2025** menunjukkan angka yang baik, yaitu **6,77 dari skala 9**, yang mengindikasikan keberhasilan dalam menjaga harmoni keberagamaan di masyarakat. Namun, mengingat bahwa **keberagamaan adalah isu yang sensitif**, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan harmoni tersebut. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus **menguatkan dialog lintas agama, meningkatkan literasi keberagamaan yang moderat, serta membangun mekanisme respons cepat terhadap potensi konflik**. Selain itu, pemantauan dinamika sosial di tingkat lokal harus diperkuat agar setiap potensi gesekan dapat diantisipasi lebih awal, sehingga harmoni keberagamaan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Resume Saran dan Rekomendasi Kebijakan – Dimensi Keberagamaan (Isu Sensitif)

1. **Penguatan Dialog Lintas Agama dan Keyakinan**
   Rekomendasi: Fasilitasi ruang dialog rutin antar pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah prasangka serta memperkuat toleransi antar umat beragama.

2. **Perlindungan terhadap Hak Minoritas dan Kepercayaan Lokal**
   Rekomendasi: Pemerintah daerah harus menjamin kebebasan beribadah semua kelompok, termasuk komunitas minoritas dan penganut kepercayaan, melalui regulasi yang adil dan perlindungan hukum yang tegas.
3. **Pendidikan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah dan Komunitas**
   Rekomendasi: Integrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum sekolah dan kegiatan keagamaan komunitas secara lintas usia, untuk mencegah radikalisme dan intoleransi.
4. **Respons Cepat Terhadap Potensi Gesekan Keagamaan**
   Rekomendasi: Bentuk tim deteksi dini berbasis masyarakat yang dapat segera mengidentifikasi isu-isu sensitif di lapangan dan merespons secara damai dan preventif.
5. **Pengaturan Media Sosial dan Narasi Keberagamaan di Ruang Publik**
   Rekomendasi: Pemerintah dan masyarakat sipil perlu mengawasi serta menangkal narasi keagamaan provokatif atau hoaks di media sosial melalui literasi digital danpelibatan influencer agama yang kredibel.

5.2.5 Rekomendasi 5#: Dimensi Budaya dan Generasi Muda

Skor **Dimensi Budaya** dalam **IHaI 2025** menunjukkan hasil yang baik, yaitu **6,55 dari skala 9**. Namun, dinamika sosial yang terus berkembang dan tantangan globalisasi dapat mempengaruhi pelestarian budaya daerah, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk **memperkuat literasi budaya bagi siswa tingkat SLTP dan SLTA**, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas budaya lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui **penguatan kurikulum muatan lokal, penyelenggaraan festival budaya, serta kolaborasi dengan tokoh budaya dan akademisi** guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya.

Budaya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu dari **masa lalu**, tetapi juga mencakup **kekinian dan masa depan**. Oleh karena itu, strategi pelestarian budaya harus **adaptif terhadap perubahan zaman**, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan budaya lokal. Generasi muda perlu diberikan ruang untuk **mengekspresikan dan mengembangkan budaya daerah dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman**, sehingga keberlanjutan budaya tetap terjaga tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Peran Dinas Pendidikan dalam Literasi Budaya

Dinas Pendidikan perlu mengadakan survei online **"Indeks Literasi Budaya Generasi Muda"** di semua institusi sekolah sebagai upaya pemetaan pemahaman dan keterlibatan siswa terhadap budaya lokal. Survei ini dapat dilaksanakan **setiap libur sekolah (6 bulan sekali)** dengan **durasi 10 menit secara online**, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Hasil survei akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan literasi budaya, termasuk integrasi budaya dalam kurikulum, program ekstrakurikuler, serta kegiatan sosial yang melibatkan generasi muda.

5.3 Rekomendasi Untuk RPJMD

Berdasarkan analisis data DUSK, ditemukan beberapa isu utama dalam bidang ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat. Berikut adalah rekomendasi kebijakan RPJMD yang dapat diimplementasikan:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan

- **Permasalahan:** Banyak responden mengungkapkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama di daerah mereka.
- **Rekomendasi:**
    a) Mendorong investasi di sektor industri kreatif, manufaktur, dan agribisnis untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
    b) Mempermudah akses modal bagi pelaku UMKM melalui skema pinjaman berbunga rendah atau hibah usaha.
    c) Mengembangkan program inkubasi bisnis bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan.

2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal

- **Permasalahan:** Beberapa responden menyarankan agar pemerintah memberikan lebih banyak dukungan bagi UMKM dan home industry.
- **Rekomendasi:**
    a) Menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk.
    b) Mendorong program kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar agar mereka bisa masuk ke dalam rantai pasok industri.
    c) Membantu pemasaran produk lokal melalui platform digital dan event ekonomi kreatif.

3. Peningkatan Akses terhadap Modal dan Bantuan Usaha

- **Permasalahan:** Masyarakat berharap adanya bantuan usaha dari pemerintah untuk mendukung bisnis kecil.
- **Rekomendasi:**
    a) Meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
    b) Mempermudah proses perizinan dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar mereka lebih mudah mendapatkan pendanaan.
    c) Mengembangkan program kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses pinjaman berbunga rendah.

4. Peningkatan Peran Pemerintah dalam Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

- **Permasalahan:** Masyarakat menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- **Rekomendasi:**
    a) Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan investasi yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal.
    b) Meningkatkan sinergi antara sektor pendidikan dan dunia kerja agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
    c) Meningkatkan transparansi dan kemudahan perizinan usaha agar lebih banyak investor tertarik menanamkan modal di daerah.

5. Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas

- **Permasalahan:** Beberapa responden menekankan pentingnya peran serta lingkungan dalam penguatan ekonomi.
- **Rekomendasi:**
    a) Mendorong model ekonomi berbasis komunitas melalui koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB).
    b) Memberdayakan desa wisata dan ekowisata untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
    c) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam mendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan di atas, diharapkan RPJMD dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tangerang serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5.4 Arahan Pengembangan IHaI

IHaI 2025 telah dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan berbagai tantangan, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan partisipasi publik yang luas, menjaga akurasi data, serta mengadaptasi pendekatan pengukuran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di setiap daerah. Meskipun demikian, hasil pengukuran IHaI telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai harmoni sosial dan kesejahteraan publik, yang menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di tingkat daerah.

Ke depan, arah pengembangan IHaI akan lebih mendalam dengan harapan dapat mencapai objek kajian hingga tingkat kecamatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemetaan yang lebih rinci terhadap dinamika sosial di tingkat lokal, mengidentifikasi potensi konflik,

serta menemukan strategi efektif dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan skala yang lebih kecil, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons permasalahan yang muncul dan mengambil langkah intervensi yang lebih tepat sasaran.

Salah satu strategi utama dalam pengembangan IHaI ke tingkat kecamatan adalah meningkatkan kapasitas survei dan pengolahan data. Teknologi digital dan sistem survei online akan menjadi instrumen utama dalam memastikan partisipasi yang lebih luas dan efisien. Dengan memanfaatkan platform daring, pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, serta mencakup lebih banyak responden di berbagai wilayah. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti diskusi kelompok terarah (FGD) dan wawancara mendalam tetap diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual.

Selain itu, integrasi IHaI dengan kebijakan pembangunan daerah perlu diperkuat agar hasil pengukuran tidak hanya menjadi laporan statistik, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menjadikan IHaI sebagai alat evaluasi dalam mengukur efektivitas program-program sosial yang telah dijalankan, sekaligus sebagai indikator dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Agar pengembangan IHaI berjalan optimal, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Akademisi, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memperkaya analisis data dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial. Di sisi lain, peran media dalam menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya IHaI juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam survei dan diskusi kebijakan.

Dengan arah pengembangan yang lebih dalam dan mencakup tingkat kecamatan, diharapkan IHaI 2025 tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam isu publik, serta mendorong kebijakan yang lebih berbasis pada data dan kebutuhan nyata di tingkat lokal.

===== Selesai =======

Daftar Pustaka

1. Choudhury, M. A. (2013). *Complexity and endogeneity in economic modeling*. Kibernetes, Vol.42 no.2 pp.226-240, Emeral Group Publishing Limited
2. Choudhury, M. A. (2013). *Hand book of tawhidi methodology: economic, finance, society and science*. Trisakti University Press, Jakarta.
3. Choudhury, M.A. (2019). "*Wellbeing Objective Criterion (Maslaha*)"; Chapter 4 of author's The Tawhidi Methodological Worldview, A Transdisciplinary Study of Islamic Economics. SpringerNature.
4. Creswell, J. W. (2014). **Research Design: *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*** Sage Publications.
5. Gujarati, D. N., Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*, 5th edition, Singapore :McGraw Hill International Edition
6. Moeheriono, (2012). Indikator Kinerja Utama (IKU). Rajagrafindo Persada, jl. Leuwinanggung No.121 Kel. Leuwinanggung. Kec.Tapos, Kota Depok 16956, Indonesia.
7. Muktiono,M.,Suriadi,J., 2023. Pedoman Penggunaan Metode Wellbeing. Wedina, Bandung, Nov.2023
8. Suriadi, J.,Halim,P.,Muktiono,A.,Kususanto,A.,Saksono,H., Hargen,B.,(2021). Riset Publik Model Wellbeing Methodoloy., Penerbit Widina, Bandung, 2021